

MAHARANI | SUHERMAN

# KEMISKINAN

DAN

# TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

*"Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap amal.  
Ini adalah perlindungan hak asasi manusia yang mendasar,  
hak atas martabat dan kehidupan yang layak."*

Nelson Mandela - Mantan Presiden Afrika Selatan



MENDAGKANG KETIDAKJAKAN  
BERBASIS PENGETAHAN



# KEMISKINAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH



MAHARANI | SUHERMAN

Mendorong Kebijakan Berbasis Pengetahuan

# KEMISKINAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penulis:**

Maharani  
Suherman

**Editor:**

Baiq Titis Yulianty

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Suherman HM. Sahir

**Penerbit:**

Lombok Research Center

**Alamat:**

Jl. Raya Mataram Masbagik KM. 45 Perumahan Bumi Catra Regency Blok B3  
No. 8 Semat, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur  
- NTB

Email: [info.lrc2014@gmail.com](mailto:info.lrc2014@gmail.com)

Website: [lrcfoundation.com](http://lrcfoundation.com)

Ukuran Buku: 15.5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman: I + 255 Halaman

Cetakan Pertama, Juli 2023

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Buku ini tidak untuk kegiatan komersialisasi. Mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi harus dengan seizin dari Lombok Research Center selaku penerbit.

ISBN : 978-623-92952-6-4

## KATA PENGANTAR



Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi NTB juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur dasar.

Namun, tantangan dalam tata kelola keuangan daerah di NTB tidak dapat diabaikan. Terbatasnya sumber daya keuangan dan keterbatasan infrastruktur administrasi keuangan sering kali menjadi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Selain itu, tantangan lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan

Dalam menghadapi tantangan kemiskinan ini, tata kelola keuangan daerah memegang peran yang sangat penting. Tata kelola keuangan daerah mencakup perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah.

Melalui tata kelola keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buku “Kemiskinan dan Tata kelola Keuangan Daerah” ini merupakan kumpulan dari tulisan penulis yang dimuat dalam berbagai media pemberitaan maupun berbagai jurnal pengetahuan. Didalam buku ini penulis juga membahas beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya adalah tentang berbagai strategi yang ditawarkan oleh penulis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, kita dapat bergerak menuju solusi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi kemiskinan di NTB.

Salam Penerbit,

**Lombok Research Center**

# DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Balik Halaman Judul.....	II
Kata Pengantar.....	III
Daftar Isi.....	V

## **BAB I Kemiskinan**

Keroyok Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat.....	1
Pembangunan Pertanian Menjadi Strategi Penurunan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	7
Mengurai Kemiskinan Masyarakat Lingkar Hutan .....	11
Bagaimana Indikator Kesejahteraan Kabupaten Lombok Timur ?.....	17
Belajar Menurunkan Kemiskinan Dari Kabupaten Lombok Tengah .....	31
Mengefektifkan Sasaran Target Pengentasan Kemiskinan Di Lombok Tengah .....	37
Pembangunan Pariwisata VS Kemiskinan Ekstrem NTB .....	43

## **BAB II Dinamika Pembangunan Daerah**

Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Di NTB, Perlukah ?....	53
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Tengah Turun ....	59
HUT Ke-76 Lombok Tengah & Tantangan Pembangunan .....	65
Sekda & Tantangan Pembangunan Di Lombok Tengah.....	71
Tata Kelola Pemerintahan Lombok Tengah Berjalan Lamban, Kenapa? .....	77
Estafet Kepemimpinan Untuk Lombok Timur Baru.....	83
“PR” Di Ulang Tahun Lombok Timur Ke-126 .....	89
Pembangunan Kawasan Utara Lombok Timur Harus Terintegrasi.....	95
Kocok Ulang OPD: Optimalisasi Kinerja vs Balas Budi.....	101

IPM Lombok Timur Meningkatkan : Kualitas Atau Kuantitas ? .....	107
IPM Dan Pengangguran Di Lombok Timur.....	113
IPM Dan Indeks Kebahagiaan Lotim .....	119
<b>BAB III BUMD Dan Pembangunan Daerah</b>	
Alternatif Strategi Pengembangan BUMDes Di NTB.....	127
Bank NTB Syariah Belum Merakyat Di NTB .....	135
Menunggu Jurus Jitu Bank NTB Syariah Untuk bertahan .....	141
Strategi UMKM Di NTB Bertahan Di Masa Pandemi .....	145
Industrialisasi, Siapkah NTB.....	151
Dampak Keberadaan Ritel Modern Di Lombok Timur .....	157
Pembangunan & Investasi Di Lombok Timur, Pentingkah?.....	167
Format Ulang BUMD Di Lombok Timur.....	173
BUMD Lombok Timur: Antara PAD Atau Beban APBD .....	177
MTQ Ke-29 Tingkat Provinsi NTB Berkah Bagi UMKM Di Lombok Timur.....	187
<b>BAB IV Tata Kelola Keuangan Daerah</b>	
Kebijakan Fiskal NTB: Antara Kemandirian Atau Hutang.....	195
NTB: Industrialisasi, Hutang, Dan Capres.....	203
Tata Kelola Pembangunan Di NTB Melalui Hutang.....	209
Kemampuan Fiskal Lombok Timur & Peluang Peningkatan PAD.....	215
Hutang & Strategi Fiskal Lombok Timur Di Masa Pandemi .....	223
Tantangan Peningkatan Pajak Restoran Lombok Timur .....	231
Menunggu Strategi Peningkatan PAD Lombok Tengah .....	239
Potensi & Strategi Memaksimalkan PAD Lombok Tengah.....	243
Aset Untuk PAD Kabupaten Lombok Tengah .....	247
Referensi.....	253



# **BAB I**

## **KEMISKINAN**



## 1

"KEROYOK" KEMISKINAN  
DI NUSA TENGGARA BARAT

**D**alam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 akan fokus menggarap program pembangunan yang menjadi prioritas yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bappeda NTB menyatakan bahwa saat ini terdapat 500

dari 995 desa tertinggal di NTB yang akan "dikeroyok" pembangunannya. Program penanggulangan kemiskinan terutama yang dimulai dari desa sangat perlu lebih digiatkan lagi terlebih kesenjangan antara daerah perkotaan dengan desa hampir terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Untuk itu istilah "keroyok" dalam menjalankan program penanggulangan desa tertinggal

sangatlah tepat. Hal ini karena permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang cukup kompleks dan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Menurut data yang disadur dari laman BPS NTB, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2022 mencapai 744.690 orang (13,82 persen). Jika dilihat dalam periode Maret 2022 - September 2022, jumlah penduduk miskin berkurang 12.750 orang (1,71 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2022, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar Rp361.266 untuk perdesaan dan Rp373.497 untuk perkotaan.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2013 menunjukkan prevalensi gizi kurang dan buruk di provinsi NTB sebesar 25,7 persen % dan pada Riskesmas 2018 naik menjadi 26,4%. Angka stunting mengalami penurunan dari 45,2% (Riskesmas 2013) menjadi 33,49% (Riskesmas 2018). Sedangkan Wasting (kurus) menurun dari 11,9 % (2013) menjadi 14,41% (2018). Risiko kekurangan gizi pada wanita usia subur (hamil) dan wanita usia subur (tidak hamil) di NTB masih cukup tinggi. Proporsi risiko kurang gizi pada wanita usia subur (hamil) berdasarkan hasil Riskesmas 2018 mencapai 21,5 persen dan pada wanita usia subur (tidak hamil) sebesar 20,97 persen.

Pendidikan yang memadai merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang bijak untuk masa depan yang baik namun, karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi di NTB telah menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB masih bertahan pada posisi 30 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. IPM Provinsi NTB pada tahun 2022 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM dari 68,65 tahun 2021 menjadi 69,46 pada tahun 2022 atau meningkat

dengan pertumbuhan 0,81 persen setahun. Peningkatan IPM Provinsi NTB ini melebihi dari peningkatan IPM nasional yang tumbuh sebesar 0,62 (BPS, 2023). Di NTB, pertumbuhan IPM tertinggi 2021-2022 yakni Kabupaten Lombok Utara dengan pertumbuhan sebesar 1,42 persen, disusul kemudian oleh Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,38 persen dan Kabupaten Bima sebesar 1,35 persen. Untuk pertumbuhan IPM paling rendah adalah Kota Mataram sebesar 0,57 persen.



Masih rendahnya kualitas SDM di daerah ini telah menyebabkan tingginya masalah pernikahan dini yang sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan masyarakat di provinsi NTB. Rata-rata lama sekolah di NTB periode 2020-2022 masih berkisar pada 7,43 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk NTB masih rendah atau hanya tamat SMP. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah masih belum dapat mengatasi kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan karena belum tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas sehingga, masyarakat NTB masih menjadi

kantong TKI di Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dalam datanya menyebutkan pada periode 2019-2022 jumlah pekerja migran NTB sebanyak 49.448 orang atau rata-rata dalam periode yang sama mencapai 12.362 orang setiap tahun. Kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah dengan penempatan pekerja migran paling banyak di NTB, yaitu mencapai 22.299 orang.

Kompleksnya masalah penanganan kemiskinan ini sehingga memang wajar apabila Pemprov NTB harus mengeroyok program penanggulangannya ditambah lagi dengan peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Selama ini program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan masih lebih dominan pada program yang bersifat konsumtif padahal disisi lain penanggulangan kemiskinan pada aspek produksi harus lebih didorong lagi yaitu melalui pemberian intensif yang lebih besar ketika berhasil naik kelas daripada bantuan yang diberikan.

Berbicara masalah penanggulangan desa miskin/desa tertinggal di Provinsi NTB dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa. Pertumbuhan ekonomi NTB yang masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan. Khusus untuk sektor pertanian memberikan kontribusi pada PDRB NTB Tahun 2022 sejumlah 21,39 persen (NTB Dalam Angka, 2023). Jadi, kalau melihat kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di NTB, potensi ini harusnya dapat dimaksimalkan pengembangannya dalam upaya program penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi prioritas pembangunan 2019-2023. Pengembangan komoditi pertanian di NTB saat ini hanya fokus pada padi, jagung, dan kedelai saja sehingga, fokus sektor pertanian NTB hanya berkuat pada tiga komoditi itu saja.

Pengembangan pembangunan desa dengan berbasiskan pada kawasan komoditi perlu digerakkan. Salah satu contohnya adalah pengembangan kawasan desa dengan berbasis pengembangan komoditi buah nanas yang ada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Peluang pengembangan dan penambahan nilai ekonomi sangat terbuka karena potensi yang sangat besar. Pengembangannya dapat melalui penerapan teknologi pengolahan makanan yang sudah sangat berkembang seperti dodol, selai, kerepek, sirup, dan masih banyak jenis-jenis olahan yang berbahan dasar buah Nanas.

Melalui pengembangan kawasan perdesaan yang berbasiskan komoditi akan menggairahkan industri rumahan yang pada akhirnya akan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Pengembangan ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas gizi masyarakat, semakin tingginya tingkat pendidikan, menurunkan angka pernikahan dini yang selama ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan serta masih banyak lagi sisi positif dari penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Untuk menekan angka kemiskinan di NTB dapat dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih *pro poor planning and budgeting*, sehingga dapat menuju kemandirian masyarakat yang madani. Penanggulangan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang dan terstruktur adalah melalui program ekonomi yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Mayoritas penduduk NTB yang yang bergantung pada pertanian yang merupakan basis sumber daya alam. Pengembangan ekonomi pada tingkat lokal diharapkan akan mampu membuka kembali daya saing daerah yang kapasitasnya saat ini sudah tidak dapat menampung populasi pedesaan. Dengan menciptakan ekonomi lokal, kapasitas produksi daerah dapat dikembangkan.

Untuk itu, pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014 Bab 10). Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Akhirnya, semoga dengan ikhtiar Pemprov NTB yang akan “mengeroyok” 500 desa miskin di NTB yang termuat dalam RPJMD NTB 2019-2023 dapat berjalan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Kata kuncinya adalah program penanggulangan kemiskinan yang akan dijalankan harus terintegrasi terprogram, jelas dan fokus menyelesaikan kemiskinan perorang yang tinggi. Pemda harus fokus menyelesaikan permasalahan ini melalui integrasi program antar OPD.

## 2

## PEMBANGUNAN PERTANIAN MENJADI STRATEGI PENURUNAN KEMISKINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19



**D**imasa pandemi virus corona (Covid-19) ini mengakibatkan semua sektor pembangunan mengalami penurunan pertumbuhan, bahkan ada yang sampai minus. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat, tak terkecuali di Lombok Timur. Pada Desember 2019 yang lalu, jumlah penduduk miskin di Lombok Timur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur sebanyak 193.650 orang atau 16,15 persen. Sedangkan garis

kemiskinan berada pada Rp. 430.727 per kapita per bulan.

Dilihat dari aspek ekonomi, hanya sektor pertanian dan perdagangan yang masih bertahan di masa pandemi ini. Pertanian memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang sangat sulit ini. Terutama peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. BPS menyebutkan pada Maret 2020, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,71 persen di perkotaan dan 74,73 persen di pedesaan.

Selama September 2019 dan Maret 2020, garis kemiskinan mengalami kenaikan. Yaitu dari Rp 414.721 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 430.727 per kapita per bulan pada Maret 2020. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan (GK) terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Melihat hal tersebut, di masa pandemi ini akan berpengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mengapa begitu?.

Perekonomian yang lesu, menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban perusahaan. Selain itu, pola pembelian konsumen yang berubah akibat dari kebijakan social distancing. Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Banyak sektor perekonomian yang mengalami keterpurukan sejak wabah pandemi ini hadir. Mulai dari sektor real estate yang sepi pembeli, sektor hiburan yang mengalami pemberhentian sementara, sektor barang dan jasa yang mengalami penurunan permintaan, dan masih banyak lainnya.

Namun tanpa kita sadari, ada salah satu sektor dari sekian sektor lainnya yang tidak mengalami kerugian. Bahkan dapat dikatakan untung akibat dari pandemi Covid-19 yaitu sektor pertanian. Memang pertanian memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian

Lombok Timur, namun pertanian tidak bisa berdiri sendiri. Ada sektor lain yang menjadi pendukungnya, seperti transportasi, pariwisata terutama perhotelan dan jasa restoran. Jika hal ini mengalami kontradiksi, maka akan berpengaruh pula kepada sektor pertanian ini.

Pada kondisi keadaan apapun, manusia akan tetap mempertahankan kebutuhan pangan masing-masing. Menurut penulis, hal tersebutlah yang sangat mendasar sehingga sektor pertanian tidak mengalami pengaruh dan perubahan yang cukup berarti pada kondisi pandemi Covid-19. Hasil dari produk sektor pertanian adalah sayuran dan buah-buahan, yang dimana kedua produk tersebut terus mengalami permintaan yang sangat signifikan sejak wabah pandemi virus corona melanda. Selain dikarenakan himbauan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan.

Pergeseran masa panen dari Maret menjadi April sehingga puncak panen padi terjadi pada triwulan kedua 2020 juga memberikan hal yang positif bagi pertanian di masa pandemi ini. Sementara itu ditinjau dari sisi epidemiologi, virus corona mayoritas menyebar di perkotaan atau kawasan padat penduduk. Artinya, pertanian yang mayoritas tidak berada di perkotaan relatif lebih aman.

Pandemi Covid-19 memiliki potensi krisis pangan global. Rantai pasokan pangan terancam di tengah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan perjalanan. Kebijakan terkait pencegahan penyebaran covid-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi pangan. Realitas itu menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat.

Lombok Timur harus berani membuat suatu terobosan jelas di bidang pertanian ini untuk menghambat peningkatan jumlah

kemiskinan di daerah. Maka, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi petani melalui kebijakan input dan memberikan intensif bagi harga komoditi andalan daerah.

Hasil dari Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menyebutkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lombok Timur mencapai 170.174 atau mencapai 567.661 jumlah anggota rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki profesi sebagai petani dan menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian.

Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani merupakan bantuan berupa benih/bibit, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan yang merupakan bantuan agar petani bisa mandiri. Anggaran tersebut menjadi modal pemerintah mendongkrak produktivitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberpihakan terhadap petani kecil pun harus ditunjukkan dengan optimalisasi peran penyuluh. Pandemi covid-19 tidak boleh menjadi penghalang penyuluh untuk terus mendampingi petani. Penyuluh pertanian dapat memanfaatkan teknologi informasi digital sehingga pendampingan bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Tidak hanya satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) teknis yang harus berbuat. Semua SKPD pun harus focus dalam menjalankan program yang dibuat. Jangan ada ego sektoral yang terjadi. Program harus terkoneksi dan melibatkan semua pihak seperti akademisi, privat sektor maupun lembaga social yang ada di daerah.

Semoga dengan adanya program yang langsung efektif terhadap petani memberikan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur ini.

## 3

MENGURAI KEMISKINAN  
MASYARAKAT LINGKAR HUTAN

**A**ngka kemiskinan di lingkaran kawasan hutan Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbilang sangat tinggi. Begitupun juga yang terjadi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2021 meningkat 0,14 persen dibanding tahun 2020 (BPS Lotim 2021). Angka kemiskinan tahun

lalu 15,24 persen atau sebanyak 183.840 jiwa, naik menjadi 15,38 persen atau 190,840 jiwa. Dari angka tersebut, terdapat 6.244 penduduk miskin Lotim yang baru selama masa pandemi Covid-19. Dan sekitar 55 persennya berada di lingkaran kawasan hutan.

Meskipun kekayaan sumber daya alam terutama hutan melimpah (64,5 ribu ha), pada kenyataannya Lombok Timur belumlah mampu menjamin kehidupan dan

penghidupan yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakatnya. Sedangkan untuk garis kemiskinan di Lombok Timur sebesar Rp 472,304. Garis kemiskinan ini naik dari sebelumnya Rp 447,263. Tingkat keparahan kemiskinan naik dari 1,84 tahun 2020 menjadi 2,88 tahun 2021.

Walaupun modernisasi dan dinamika pembangunan di Lombok Timur terus berlangsung, namun peran hutan dan kebun bagi masyarakat lingkaran hutan belum tergantikan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar sumber penghasilan keluarga berasal dari hutan dan kebun, baik untuk konsumsi maupun sebagai sumber penghasil uang tunai.

Nurkse (1961) menjelaskan tentang fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat masyarakat miskin di negara-negara miskin. Lemahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan. Proses melingkar itu menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar.

Dalam konteks ekonomi wilayah, Myrdal (1968) memiliki pemikiran yang serupa dimana lemahnya total tabungan di wilayah miskin menyebabkan minimnya investasi di wilayah itu yang kemudian menyebabkan rendahnya produktifitas wilayah dan kemudian berujung pada lemahnya pendapatan wilayah. Pendapatan wilayah yang lemah kemudian menyebabkan rendahnya tingkat tabungan wilayah dan terus mengikuti lingkaran setan semacam itu.

Wilayah pedesaan adalah wilayah yang paling rentan mengalami lingkaran setan kemiskinan semacam itu. Kemiskinan masyarakat bersifat multidimensi dengan faktor penyebab yang kompleks. Secara

umum penyebab kemiskinan masyarakat di Kawasan lingkaran Hutan Lombok Timur dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal antara lain: sumber daya manusia rendah, budaya masyarakat, motivasi lemah, Pola hidup konsumtif. Rendahnya sumber daya masyarakat lokal turut mengkondisikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Meski secara historis tradisional mereka memiliki ketangguhan untuk bertahan hidup di tengah hutan lengkap dengan kemampuan meramu pengalaman menjadi sebuah kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan di lingkungannya, belum cukup menjadikan mereka kuat menghadapi berbagai intervensi pihak luar yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di sekitarnya.

Rendahnya sumberdaya masyarakat berpengaruh pula terhadap kecilnya peluang dan daya saing masyarakat secara ekonomi dan sosial termasuk memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan, bahkan kemampuan mengakses birokrasi. Ketidaksiapan masyarakat lokal dalam menghadapi modernisasi juga menjadi salah satu faktor yang semakin memarjinalkan posisi mereka secara ekonomi politik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Lombok Timur. Salah satu upaya itu adalah mendorong peningkatan investasi di wilayah Lombok Timur, terutama investasi dalam bidang pariwisata dan pertanian. Sebagaimana dikatakan Roy dan Pal (2002) bahwa investasi di bidang pertanian jauh lebih efektif dalam meningkatkan produksi pertanian dari pada kebijakan subsidi dimana peningkatan produksi pertanian sangat diperlukan untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan. Investasi bidang pertanian yang berkembang di wilayah Lombok Timur umumnya berupa perusahaan pengepul produk hasil pertanian, bukan perusahaan industri pengolahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan di masyarakat desa terutama masyarakat pinggir hutan. Yang paling utama persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lingkaran kawasan hutan yang masih rendah.

Memang jika bicara program, sudah cukup banyak yang diluncurkan bagi masyarakat lingkaran kawasan hutan dalam upaya menekan angka kemiskinan. Salah satunya program Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Di mana masyarakat lingkaran kawasan hutan diberikan hak mengelola kawasan hutan. Dengan harapan bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lingkaran kawasan hutan itu sendiri.

Hanya saja, karena tidak ditopang kualitas SDM masyarakat yang baik sehingga target dari program tersebut belum bisa maksimal dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di lingkaran kawasan hutan.

Secara garis besar strategi mengurangi beban masyarakat melalui berbagai bansos dan strategi meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan tak berubah, hanya perlu disesuaikan dengan pola pemulihan dan tahapan penanganan krisis.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga harus mempertimbangkan tiga tahapan pemulihan sebelum perekonomian dapat pulih dan mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan potensinya, yakni tahap bertahan (survival), pemulihan (recovery), dan transformasi (transformation). Ketiganya dapat berjalan paralel dengan penekanan yang berbeda.

Dilihat dari kacamata ekonomi, hanya sektor pertanian dan perdagangan yang masih bertahan dimasa pandemi ini dan sektor ini yang paling cocok bagi masyarakat lingkaran kawasan hutan dan bagian Utara Lombok Timur.

Pertanian memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dimasa yang sangat sulit ini. Terutama peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. BPS menyebutkan pada Maret 2020, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,71 persen di perkotaan dan 74,73 persen di pedesaan.

Lombok Timur harus berani membuat suatu trobosan konkrit dibidang pertanian ini untuk menghambat peningkatan jumlah kemiskinan di daerah. Maka, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi petani melalui kebijakan input dan memberikan intensif bagi harga komoditi andalan daerah.

Tidak hanya satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) teknis yang harus berbuat. Semua SKPD pun harus focus dalam menjalankan program yang dibuat. Jangan ada ego sektoral yang terjadi. Program harus terkoneksi dan melibatkan semua pihak seperti akademisi, privat sector maupun lembaga sosial yang ada di Daerah.

Semoga dengan adanya program yang langsung efektif terhadap petani memberikan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur, khususnya bagian Utara.



## 4

BAGAIMANA INDIKATOR KESEJAHTERAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR ?

**D**ewasa ini, tema pengukuran kesejahteraan menjadi hangat dibicarakan di berbagai jurnal dan literatur umum. Bahkan yang menariknya adalah dengan dikeluarkannya instruksi oleh presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstem. Presiden meminta semua jajarannya termasuk semua gubernur dan semua Bupati dan Walikota untuk menghapus kemiskinan ekstrem sampai tahun 2024. Berbicara kemiskinan tentu tidak terlepas dari kesejahteraan.

Todaro (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud sejahtera adalah kondisi manusia saat mampu untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan kehormatan (esteem) dan mencapai kebebasan untuk memilih (freedom of choice). Kebutuhan akan barang dan jasa yang bersifat material dapat dipenuhi melalui tambahan pendapatan (Higgins, 2015) akan tetapi kebutuhan akan kehormatan dan kebebasan untuk memilih belum tentu dan tidak semuanya dapat dijangkau oleh tambahan pendapatan dan kedua hal tersebut secara umum bersifat subjektif (Wolfers, 2008).

Untuk menjangkau kebutuhan bersifat subjektif tersebut, Bank Dunia mengembangkan ukuran kesejahteraan yang baru yakni Indeks Kebahagiaan. Indeks Kebahagiaan merupakan laporan penilaian individu terhadap tingkat kebahagiaannya secara subjektif dengan menggunakan ukuran skala (1-5, 1-10, 1-100).

Secara normatif jika mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila, maka konsep kesejahteraan di Indonesia sudah sesuai dengan perkembangan konsep kesejahteraan yang memaknai sejahtera lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan materi (Ismail, dkk, 2014).

Akan tetapi, pada implementasinya, sasaran pembangunan makro ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) misalnya, hanya terfokus pada percepatan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan perkapita. Sebagai negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia memiliki nilai-nilai ideologis, dimana pemenuhan kesejahteraan di Indonesia seharusnya lebih dekat kepada aspek spiritual yang lebih bersifat subjektif. Persepsi subjektif inilah yang diharapkan dapat diukur dengan indeks kebahagiaan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Suryono (2014) mengemukakan empat pengertian kesejahteraan, yakni (1) dalam istilah umum, sejahtera berarti keadaan manusia yang baik, makmur, sehat dan damai; (2) dalam tujuan ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat suatu hal dalam menunjang kesejahteraan; (3) dalam tinjauan kebijakan sosial, sejahtera berkaitan dengan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (4) dalam tinjauan lain, sejahtera identik dengan aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang memiliki kebutuhan finansial, tetapi tidak dapat bekerja untuk memenuhinya.

Lalu, bagaimana dengan tingkat kesejahteraan Lombok Timur?. Berdasarkan Proyeksi SUPAS 2015, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 sebanyak 1,24 juta jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 586 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 657 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 1.605,55 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2021 mencapai 774 jiwa per km<sup>2</sup>, yang berarti setiap luasan wilayah 1 km<sup>2</sup> hanya ditempati oleh 774 penduduk. Begitu pula dengan kondisi perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, tahun 2020 sex ratio Kabupaten Lombok Timur sebesar 89,31 persen. Angka tersebut berarti pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 89 penduduk laki-laki.

Dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat diketahui sejauh mana tingkat ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif. Usia produktif adalah kelompok umur 15-64 tahun, sedangkan usia tidak produktif pada kelompok umur 0-14 dan 65+.

Gambaran tersebut yang di namakan Angka Beban Ketergantungan. Pada tahun 2020 setiap seratus penduduk usia produktif di Lombok Timur rata-rata menanggung 51 penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan sangat ditentukan oleh komposisi kelompok umur di suatu daerah, terutama penduduk usia muda. Penduduk yang menjadi beban tanggungan terbesar di Lombok Timur yaitu penduduk di usia 0-14 tahun. Pada tahun 2020, penduduk usia muda mencapai 390.328 jiwa (29,45 persen dari penduduk total).

## Kesehatan dan Gizi

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia adalah indikator bidang kesehatan. Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, berbagai program terkait peningkatan kesehatan masyarakat perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Program tersebut akan diarahkan dalam bentuk

peningkatan status kesehatan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Tingkat kesakitan atau morbiditas dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggunya aktivitas. Yang dimaksud dengan keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Pada umumnya keluhan kesehatan yang sering terjadi pada penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan, walaupun pada waktu survei penyakitnya tidak kambuh. Usia di bawah lima tahun merupakan masa emas pertumbuhan anak. Oleh karena itu kualitas kesehatan balita perlu menjadi perhatian. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kualitas kesehatan balita dapat dilihat dari imunitas dan gizi.

Tingkat imunitas diukur dari persentase anak usia 12-59 bulan yang pernah mendapatkan imunisasi menurut jenis imunisasi. Sementara itu karena keterbatasan data yang tersedia, status gizi dalam publikasi ini diukur dengan indikator persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah dan masih mendapatkan ASI. Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti bodi untuk mencegah penyakit tertentu. Dengan diberikan imunisasi diharapkan tingkat kematian bayi menurun dan meningkatkan harapan hidup bagi bayi yang dilahirkan.

Hampir seluruh balita (91,87 persen) di Lombok Timur memiliki Kartu imunisasi dan sebanyak 60,02 telah mendapatkan imunisasi yang diwajibkan pemerintah, antara lain BCG (Bacille Calmette-

Guerin), DPT (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), Polio, Campak dan Hepatitis B. Sementara itu, jika ditinjau menurut jenis kelamin maka persentase balita laki-laki yang memperoleh imunisasi lebih sedikit dibandingkan balita perempuan. Menurut kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki persentase paling besar untuk balita yang mendapatkan imunisasi lengkap yaitu 68,38 persen. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran terbawah hanya setengahnya yang mendapatkan imunisasi lengkap.

## Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kualitas pendidikan yang baik dibutuhkan untuk mencapai bangsa yang bermoral dan sejahtera. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, agama, dan karakteristik lainnya.

Hak dan kewajiban warga negara dalam dalam pendidikan tertuang dalam pasal 31 UUD 1945. Ayat 1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemenuhan atas hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan atas pembangunan negara. Beberapa indikator pendidikan yang disajikan dalam bab ini antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2020. Nilai-nilai indikator tersebut diperoleh dari hasil Susenas yang dilakukan BPS pada bulan Maret 2020.

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mendefinisikan melek huruf sebagai kemampuan mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan. Seseorang dapat dikatakan melek huruf apabila dapat menggunakan kemampuan baca tulis huruf latin atau huruf lainnya dalam berbagai situasi.

Angka Melek Huruf (AMH) yang disajikan dalam publikasi ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya. AMH berkaitan erat dengan Angka Buta Huruf (ABH), semakin tinggi AMH maka ABH semakin rendah. Sehingga AMH digunakan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan program pemberantas buta huruf.

Pemerintah NTB menggalakan Program Buta Aksara Nol (Absano). Program tersebut ditujukan agar semua warga di NTB bisa membaca dan menulis huruf latin, terutama bagi kelompok usia tua yang pernah bisa membaca atau tidak pernah sama sekali bisa membaca. Tujuan awal dari program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia NTB.

Program ini sulit mencapai goal karena sulit menjaga agar para penduduk usia lanjut yang menjadi sasaran program bisa terus membaca tulis. Pada kenyataannya, hingga pada tahun 2020 masih terdapat 14,03 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca/menulis huruf lain. Angka tersebut didominasi oleh penduduk perempuan. Hal ini dikarenakan, pada generasi yang lalu kesempatan sekolah pada perempuan sangat kecil.

## **Ketenagakerjaan**

Batasan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan

kerja terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja.

Dengan kata lain penduduk yang secara aktif mencari pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT memberikan gambaran jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, tetapi tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Sumber data TPAK adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Berdasarkan Hasil Sakernas pada tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lombok Timur sebanyak 904.390 orang terdiri dari Angkatan Kerja sebanyak 628.396 orang dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 275.994 orang. Dari jumlah Angkatan Kerja tersebut, sebanyak 610.870 orang bekerja diberbagai lapangan usaha dan sisanya 17.526 orang merupakan pengangguran.

Pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lombok Timur mencapai 69,48 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 68,11 persen. Dirinci menurut jenis kelamin TPAK penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (masing-masing 82,50 persen dan 58,42 persen).

## **Pola Konsumsi**

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran jumlah pendapatan yang diterima, akan tetapi data mengenai pendapatan masyarakat sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu, data pendapatan rumah tangga diperkirakan nilainya melalui pendekatan pengeluaran.

Sesuai dengan teori ekonomi bahwa tingkat pendapatan dapat memengaruhi tingkat pengeluaran, semakin tinggi pendapatan seseorang maka pengeluarannya juga akan semakin banyak.

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan untuk non makanan. Jika pendapatan seseorang berubah, maka pola konsumsinya akan berubah.

Semakin tinggi pendapatan, maka proporsi pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih sedikit daripada untuk non makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sedangkan permintaan terhadap non makanan tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung.

Komposisi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh konsumsi untuk makanan yaitu sebesar 59,64 persen, sisanya 40,36 persen untuk konsumsi non makanan. Lebih dari setengah dari konsumsi non makanan dihabiskan untuk perumahan. Konsumsi untuk barang dan jasa tidak sampai 10 persen dari total pengeluaran.

Sedangkan konsumsi lainnya yang meliputi pakaian, barang tahan lama dan lainnya di bawah 5 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 sebesar Rp 940.586,- Dengan rincian Rp 517.101,- atau sekitar 54,98 persen untuk pengeluaran makanan dan Rp 423.486,- atau sekitar 45,02 persen untuk pengeluaran selain makanan. Nilai Rata-rata

pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang pada saat itu bernilai Rp 823.172,-. Angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi pada tahun 2020, karena tidak merekam kondisi setelah terjadi pandemic covid-19.

Pelaksanaan dari Survei ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran kapita sebulan penduduk Kabupaten Lombok Timur untuk makanan yang paling tinggi adalah kelompok makanan dan minuman jadi yang mencapai Rp 163.486,- atau sekitar 17,38 persen. Sedangkan untuk kelompok non makanan, hampir setengah dari konsumsi non makanan dihabiskan untuk perumahan. Konsumsi untuk barang dan jasa sekitar 23,72 persen dari total pengeluaran. Sedangkan konsumsi lainnya yang meliputi pakaian, barang tahan lama dan lainnya di bawah 15 persen.

Jika dilihat dari pengeluaran perkapita, sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki pengeluaran per kapita dalam rentang Rp 500.000,- hingga Rp 799.999,-. Sebagai tambahan, terdapat 27,87 persen penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki pengeluaran per kapita sebulan dalam rentang ini. Kelompok terbanyak kedua berada di rentang Rp 300.000,- hingga Rp 499.000,- yaitu sebanyak 22,23 persen.

Hal ini, jika dikaitkan dengan teori Hirarki Kebutuhan Maslow dan teori Kualitas Hidup Todaro, maka masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahapan pemenuhan kebutuhan dasar. Maslow (1943) dalam Theory of Human Motivation menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraannya, manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya yang terdiri dari lima hirarki kebutuhan. Kebutuhan pada hirarki yang pertama merupakan kebutuhan fisik.

Kebutuhan ini merupakan aspek utama yang mau tidak mau harus dipenuhi manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya secara fisik seperti makan, minum dan tidur. Seseorang yang sangat kelaparan contohnya akan menjadi sangat bahagia apabila dapat menemukan sepotong roti.

Saat kebutuhan fisik sudah terpenuhi, manusia akan memiliki kebutuhan baru sebagai ambang batas kebahagiaan. Pada hirarki kedua, kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan rasa aman, seperti Maslow mencontohkannya dengan tersedianya rumah dan asuransi kesehatan. Setelah memenuhi kebutuhan pada hirarki kedua, manusia akan sampai pada hirarki ketiga yakni untuk memenuhi kebutuhan untuk berhubungan sosial, seperti berkeluarga dan berteman. Setelah ketiga hirarki tersebut terpenuhi, manusia akan berusaha untuk memenuhi selfesteem atau kebutuhan akan penghargaan diri. Puncaknya, setelah seluruh kebutuhan terpenuhi, manusia dapat disebut sejahtera secara utuh apabila ia mampu untuk memperoleh kebebasan untuk memilih (freedom of choice).

Teori hirarki kebutuhan dasar Maslow tersebut sejalan dengan teori kualitas hidup milik Todaro. Todaro (2010) menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi tiga tahapan kebutuhan agar dapat disebut memiliki kualitas hidup yang baik. Tahapan yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan dan pendidikan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tahapan kebutuhan selanjutnya adalah terpenuhinya penghargaan diri dari orang sekitar seperti merasa dihormati dan disegani. Tahapan yang terakhir kebutuhan manusia menurut Todaro adalah tercapainya kebebasan untuk memilih (freedom of choice).

## **Perumahan dan Lingkungan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah merupakan bangunan

gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. UU ini juga mencantumkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Sementara itu, perumahan dapat diartikan sebagai kumpulan rumah dalam suatu pemukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Kemenkes RI (2002) menyatakan beberapa kriteria rumah sehat, yaitu: pertama dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kemudian, dapat memenuhi kebutuhan psikologis, antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vector penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Selain sehat sebuah rumah juga harus memiliki kriteria layak huni.

Salah satu konsep rumah layak huni yang digunakan adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Adapun indikator-indikator untuk mengukur kelayakan sebuah rumah dilihat dari jenis atap, lantai, dan dinding rumah. Berdasarkan data Susenas tahun 2020 sekitar 87,21 persen rumah tangga di Lombok Timur menempati tempat tinggal milik sendiri, sisanya menempati rumah milik orang tua, sewa, rumah dinas dan bebas sewa. Kualitas hunian dapat dinilai dari luas lantai per kapita.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu indikasi rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m<sup>2</sup>. Berdasarkan data Susenas, di Kabupaten Lombok Timur masih terdapat hampir sepertiganya (23,27 persen) rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2020 sekitar 77,55 persen rumah tangga di Kabupaten Lombok Timur sudah menggunakan atap genteng/beton. Selebihnya ada yang menggunakan seng, asbes dan lainnya masing-masing sebesar 7,73 persen, 13,33 persen dan 1,38 persen. Sisi lain dari perumahan adalah jenis dinding terluas dimana sekitar 94,37 persen rumah tangga sudah berdinding tembok dan sisanya ada yang menggunakan bambu, kayu dan lainnya. Menurut jenis lantai terluas, yang terbanyak adalah rumah tangga dengan lantai terluas dari semen/bata merah sebesar 62,08 persen. Masih terdapat juga rumah tangga yang memiliki rumah dengan alas tanah yaitu sebesar 1,48 persen.

## Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Metode yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah Head Count Index (HCI). Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada dibawah suatu batas, yang disebut sebagai garis kemiskinan. Yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum di suatu daerah. Kebutuhan hidup tersebut dibagi dalam dua kelompok, yakni kebutuhan makanan dan bukan makanan. Kebutuhan non makanan mencakup perumahan,

kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya.

Untuk kebutuhan makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan energi minimal 2100 kkal/kapita/hari. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah non makanan itulah yang disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan yang bertahap dari tahun 2011 hingga 2020. Peningkatan yang tajam terjadi antara tahun 2011 hingga 2013. Garis kemiskinan pada tahun 2011 sebesar Rp. 278.118,- meningkat hingga 15 persen menjadi Rp. 321.249,- pada tahun 2013. Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp 447,263,- pada tahun 2020. Meningkatnya garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok (inflasi) dari tahun ke tahun. Berdasarkan garis kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur masih cukup tinggi, walaupun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 7 tahun, kemiskinan berhasil ditekan hingga 4 persen dari jumlah penduduk, walaupun jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.

Penurunan yang signifikan dapat dilihat antara tahun 2010 hingga 2013. Dalam waktu tersebut, kemiskinan menurun hampir 6 persen dari total penduduk tiap tahunnya. Sementara itu, persentase penduduk miskin tahun 2020 adalah sebanyak 15,24 persen. Angka ini menurun dari tahun 2019 sebesar 16,15 persen. Penurunan penduduk miskin pada tahun 2018-2020 bisa dikatakan cukup lambat dibandingkan penurunan yang terjadi pada tahun 2017-2018. Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Timur tidak terlepas dari program pengentasan kemiskinan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Adapun program-program pengentasan kemiskinan tersebut diantaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beasiswa bagi penduduk miskin untuk melanjutkan pendidikan, bantuan beras miskin (Raskin), dan sebagainya.



## 5

BELAJAR MENURUNKAN KEMISKINAN  
DARI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**K**ebijakan berbagai pembatasan pergerakan penduduk yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 juga mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat di daerah dengan motto “Tatas Tuhu Tresna”. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi yang mengalami penurunan drastis yaitu dari 4,04 persen pada 2019 menjadi -6,67

persen pada 2020. Namun, seiring dengan mulai beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang ada di daerah Kuta serta berbagai jenis bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi, perekonomian Lombok Tengah perlahan mulai bangkit. Terakhir, BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah pada 2021 berada pada posisi positif yaitu 4,03 persen dan 3,55 persen pada 2022.



Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah yang semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dari 1.049 juta jiwa lebih penduduk Lombok Tengah pada tahun 2021, terdapat 131.940 jiwa atau 13,44 persen masuk dalam kategori penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin ini bertambah atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 128.100 jiwa. Jumlah penduduk miskin yang keberadaannya yang masih cukup besar di Kabupaten Lombok Tengah secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan penduduk miskin yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok tengah. Namun, apabila melihat dalam lima tahun ke belakang, terjadi tren penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah.

Menyadari bahwa angka kemiskinan masih tinggi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari berbagai dimensi. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut membutuhkan upaya multisektor yang tentunya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, keberadaan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertujuan untuk mengkoordinir berbagai macam kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah sangatlah penting untuk terus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

### **Akurasi Data Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan**

Meskipun terjadi tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, bukan berarti kinerja pemerintah daerah, terutama tim TKPKD tidak menemukan berbagai tantangan di dalam upaya penurunan kemiskinan di Lombok Tengah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Tim TKPKD menemukan masih terdapat persoalan yang sedikit menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah.

Adapun berbagai persoalan tersebut antara lain seperti masih terdapatnya beberapa program OPD yang tidak sinkron dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, bahkan terdapat kesan beberapa OPD berjalan dengan program sendiri tanpa ada koordinasi yang baik. Ketidaktepatan sasaran memiliki potensi menjadikan bias implementasi program di tingkat bawah/masyarakat yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

Meskipun terkesan sepele namun, berbagai persoalan tersebut dikhawatirkan akan menghambat atau upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak tepat sasaran. Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) melihat bahwa diperlukan suatu basis data yang kuat dan akurat untuk melaksanakan suatu program bantuan bagi masyarakat miskin, misalnya dalam program bantuan rehab rumah, ekonomi, hingga pendidikan.

Data yang terkumpul dari level paling bawah, RT/RW, Desa/Kelurahan dan terus berjenjang sampai kecamatan harus dapat terdokumentasi dan terverifikasi akurasi. Tim TKPKD harus dapat terus mendorong setiap OPD agar mampu memaksimalkan peran pemerintah Desa/Kelurahan dan dari pihak Kecamatan. Namun perlu disadari bahwa dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh, prosesnya pasti berlangsung bertahap, namun berkelanjutan.

Sasaran utama kebijakan pengentasan kemiskinan adalah untuk mengurangi persentase angka kemiskinan per jumlah keseluruhan penduduk, namun kebijakan tersebut harus bersifat sustainable/berkelanjutan. Bagi masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dan pendampingan telah berdaya maka akan dipantau dan didampingi secara terus menerus. Harapannya, mereka juga mampu membantu memberdayakan lingkungan sekitarnya sehingga program pengentasan kemiskinan ini berlangsung secara kolektif

Apabila semua data sudah terkumpul maka, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah berperan dan bertanggungjawab untuk melakukan validasi dan verifikasi data-data kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah secara akurat sehingga mampu menjadi bahan untuk merumuskan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien. Artinya, dengan basis data yang kuat maka fokus dan ketepatan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang akan berjalan dengan baik.

### **Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan**

Selain menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah bersama tim TKPKD Kabupaten Lombok Tengah maka, diperlukan juga berbagai ide-ide baru yang memiliki semangat yang sama dengan program penanggulangan kemiskinan yang telah ada.

Penanganan kemiskinan yang melibatkan multi-sektor akan membutuhkan suatu komitmen bersama untuk menumbuhkan semangat gotong royong semua pihak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Research Center (LRC) berpandangan bahwa program satu OPD satu desa dampingan layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu upaya dalam penanganan kemiskinan di Lombok Tengah.

Tim TKPDK selain berperan untuk mengkoordinir pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan juga dapat berperan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Setiap perangkat daerah harus didorong untuk dapat menghasilkan ide-ide baru dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah. Kemudian setiap perangkat daerah juga harus dapat mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat miskin di desa dampingan melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKP) Desa/Kelurahan.

Artinya, setiap OPD di Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran sebagai fasilitator pada semua proses pendampingan desa lokasi dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini juga akan dapat membangun sinergitas program/kegiatan lintas sektoral dalam penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah. Selain itu, setiap OPD yang menjadi pendamping dapat berperan sebagai koordinator dan membantu proses kerjasama dengan berbagai pihak-pihak terkait melalui berbagai program kemitraan.



## 6

## MENGEFEKTIFKAN SASARAN TARGET PENGENTASAN KEMISKINAN DI LOMBOK TENGAH

**D**i tahun 2022 ini, Pemerintah daerah Lombok Tengah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022, anggaran yang dibelanjakan sekitar 120 milyar dan tersebar di beberapa Organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, apakah anggaran yang besar tersebut akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Lombok Tengah sesuai dengan target yang ingin di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)?.

Diskusi kecil yang dilakukan oleh Penulis bersama beberapa kepala OPD teknis di Rumah dinas Jabatan wakil Bupati pada minggu ke empat atau minggu terakhir dibulan Juli lalu menghasilkan beberapa catatan-

catatan penting. Catatan-catatan ini memang tidak formal, namun paling tidak menghasilkan sebuah gagasan baru dalam pengentasan kemiskinan di Lombok tengah.

Diawal diskusi, Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah memulai diskusi santai dengan cerita pengalamannya turun ke lapangan beberapa hari yang lalu. Di Desa Bilelando, Wakil Bupati turun menemui masyarakat yang mampu bangkit pasca Covid-19. Salah satu masyarakat menjalankan usaha pembuatan kue. Dan hasil kuenya sudah terdistribusi di wilayah sekitar bahkan mampu menembus kecamatan Lombok Timur. Dengan Bangka masyarakat tersebut menceritakan bahwa dia mampu mempekerjakan tetangga dan masyarakat lainnya. Bahkan omsetnya sudah diatas dua digit.

Yang lebih mengejutkan lagi adalah selama ini dia tidak pernah mendapatkan pembinaan dari dinas terkait. Dia jalan sendiri dengan insting bisnis yang dimiliki. Hal inilah yang membuat bapak wakil bupati merasa ada beberapa hal teknis yang harus dipelajari oleh dinas terkait mengenai konsep bisnis dan konsep pembinaan langsung dari masyarakat. Dinas jangan ketinggalan kereta dan ketinggalan zaman. Harus mampu berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

## **Kemiskinan dan UMKM**

Persoalan kemiskinan sangatlah kompleks, sehingga memerlukan berbagai disiplin ilmu untuk mengurai dan menemukan strategi bersama untuk menyelesaikannya. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam mengurai kemiskinan adalah (1) bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya, terutama menyangkut kondisi sosial dan potensi ekonomi masyarakat; (2) Mengapa mereka miskin, apakah mereka bekerja namun pendapatan sedikit atau mereka menganggur tanpa pekerjaan, atau karena tidak ada peluang usaha; (3) apakah masyarakat terlayani dengan baik terutama menyangkut perizinan; (4) apakah mereka terlindungi dan apakah ada pembangunan inklusif yang berorientasi pada penciptaan pekerjaan; dan (5) apakah ada kebijakan dan fiskal yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa teknik yang melibatkan masyarakat.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia dan dunia di awal tahun 2020 yang lalu. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sector usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan

dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dan mampu Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dan semua kabupaten/Kota yang ada di NTB, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro menyerap lebih banyak tenaga kerja. Secara Nasional, serapan lapangan kerja sector ini sekitar 99,45% lapangan kerja dari total sekitar 76,54 juta pekerja (data diolah). Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%.

Lalu bagaimana kondisi UMKM di NTB?. Seperti apa pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan yang secara Nasional tersebut?. Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, pemerintah daerah memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dengan melakukan berbagai terobosan. Harapannya, dengan berbagai terobosan kebijakan yang dilakukan akan meningkatkan peran serta dan keterlibatan sector UMKM yang ada di daerah.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTB terus melakukan pembinaan dan melatih semua pelaku usaha UMKM di seluruh daerah NTB demi meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Semua itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Program-program UMKM yang dilakukan oleh dinas untuk mendorong agar kewirausahaan di NTB berkembang diantaranya Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan 16 macam latihan, pendamping koperasi, pendamping Kredit Usaha Rakyat, bantuan peralatan dan masih banyak program-program yang membantu masyarakat untuk membangun usaha. Termasuk juga pelatihan mental dalam membentuk karakter jiwa pengusaha.

Kebijakan alokasi anggaran sudah diarahkan dengan prinsip pro poor budget yaitu kebijakan publik (kebijakan anggaran) yang memihak pada orang miskin. Semangat ini ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan orang miskin antara lain (1) menyediakan lapangan kerja, yang dilakukan dengan mengembangkan pembangunan yang berorientasi padat karya, (2) menyediakan lapangan usaha, dilakukan dengan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memfasilitasi pasar. Program-program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan tidak berada pada satu OPD, tetapi tersebar di berbagai OPD, mengingat tugas dan fungsinya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan integrasi program dengan fokus wilayah yang sama. Persoalan utamanya adalah menyangkut waktu pelaksanaan yang harus sesuai dengan alur proses program.

Selain berbagai kebijakan yang dilakukan, hal yang tidak boleh dilupakan yaitu melakukan Konvergensi. Konvergensi adalah cara berpikir analitis yang bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan, berdasarkan data, fakta dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika melakukan analisis sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata, dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subyektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Persoalan penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi fokus dan tidak terbiaskan pada persoalan lain. Fokus ini akan menjadi penentu bagi suksesnya program penanggulangan kemiskinan.

Identifikasi program dapat dilakukan pada suatu wilayah dengan beberapa program yang sudah pernah berlangsung. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa program yang sudah pernah berlangsung tidak mampu memberikan dampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Hal ini harus diuraikan sehingga diperoleh masalah yang sebenarnya sehingga program selanjutnya dapat diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. Identifikasi dapat dilakukan dengan menginventarisir beberapa program yang sudah pernah dilakukan serta ditelisik mengapa program tersebut tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mengevaluasi dan agar program yang hendak dirancang agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama.



## 7

PEMBANGUNAN PARIWISATA  
VS KEMISKINAN EKSTREM NTB

**B**adan Pusat Statistik (BPS) NTB telah merilis data penduduk miskin ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu pada Maret 2021 sebanyak 4,78 persen atau 252.048 jiwa. Namun di bulan Maret 2022 kemiskinan ekstrem turun menjadi 3,29 persen atau 176.029 jiwa. Dengan kata lain ada penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1,49 persen. Tiga Kabupaten di NTB yang menjadi lumbung penduduk miskin

ekstrem di daerah ini. Masing-masing Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lombok Tengah (Loteng) serta Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ketiga daerah tersebut menyumbangkan total sebanyak 40.285 kepala keluarga (KK) dari 61.590 KK miskin ekstrem di NTB.

Lotim menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di NTB, mencapai 19.081 KK. Baru kemudian diikuti Loteng dan KLU dengan

masing-masing 11.072 KK dan 10.132 (KK). Namun kalau dilihat secara prosentase KLU menjadi yang tertinggi mencapai 11,97 persen. Sedangkan Lotim dan Loteng hanya 4,06 persen serta 3,00 persen.

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ketiga daerah ini sebagai penyumbang kemiskinan ekstrem?. Padahal kita ketahui bersama bahwa ketiga daerah ini di NTB menjadi daerah dengan pembangunan pariwisata yang cukup pesat.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrem?. Kemiskinan ekstrem adalah mereka yang paling miskin di antara orang miskin (*the poorest of the poor*). Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemiskinan ekstrem dipandang sebagai bentuk kemiskinan yang paling buruk, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kondisi ini tidak hanya bergantung pada pendapatan tetapi juga pada akses ke layanan publik.

Secara terukur, Bank Dunia mengidentifikasi seseorang mengalami kemiskinan ekstrem saat seseorang tersebut hidup dengan pendapatan/pengeluaran kurang dari USD 1,90 per hari berdasarkan ukuran varitas daya beli (*purchasing power parity*). Sejak September 2022, Bank Dunia menaikkan standar tersebut menjadi USD 2,15 per hari guna menyesuaikan dengan efek inflasi.

Di Provinsi NTB ada dua kejadian bencana yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin ekstrem bertambah. Namun, bencana kedua yaitu covid-19 lebih parah dibandingkan bencana gempa bumi pada pertengahan tahun 2018 yang lalu. Hal ini juga berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin ekstrem secara Nasional. Dalam catatan BPS, COVID-19 telah mendorong angka kemiskinan ke level yang lebih tinggi dan memunculkan orang miskin baru. Jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 2,76 juta jiwa selama periode

September 2019 (sebelum munculnya COVID- 19) ke September 2020 (setelah wabah COVID-19 merebak). Tingkat kemiskinan bergeser ke atas dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen pada periode yang sama, atau kembali ke level yang hampir sama dengan lima tahun lalu. Semua upaya penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun terakhir seolah-olah tidak meninggalkan bekas.

Bagi mereka yang sudah miskin sebelum datangnya hantaman pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global, mengalami kondisi kemiskinan yang semakin parah. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021. Angka ini diperkirakan merambat naik di tahun 2022 seiring dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Memerangi kemiskinan ekstrem menjadi semakin menantang, bukan hanya karena harus menangani yang termiskin dari yang miskin, tetapi juga target pemerintah untuk mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024 menjadi tampak mustahil.

Sesungguhnya pemerintah dapat mengurangi dampak kenaikan inflasi pangan pada keluarga miskin melalui kebijakan perlindungan sosial. Namun, agak berbeda dengan periode inflasi pangan yang tinggi pada periode sebelumnya, keuangan pemerintah terkuras akibat berbagai langkah fiskal yang dilakukan selama merebaknya pandemi COVID-19. Pemerintah terpaksa harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19. Untuk ekonomi yang masih belum pulih dari pandemi, inflasi tinggi benar-benar memberi tekanan berat bagi pemerintah.

Padahal berdasarkan arahan Presiden dalam rapat terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta rapat terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi

intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat not persen pada 2024.

Jika melihat penyebab utama meningkatnya kemiskinan ekstrem tersebut, akan sangat sesuai dengan kondisi tiga daerah di NTB. Covid-19 secara langsung merontokkan industri pariwisata secara nasional. Bahkan Provinsi Bali yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata langsung terjun bebas menjadi minus 20 persen. Sedangkan di NTB walaupun tidak separah Bali tetap pertumbuhannya rontok sampai minus 5 persen.

Saat pandemi COVID-19 mulai mereda dan perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, di NTB pemerintah daerah menggenjot sektor pariwisata dengan memperbanyak event berkelas lokal, nasional maupun internasional. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah NTB percaya diri untuk mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol pada tahun 2024.

Secara global, krisis ekonomi yang terjadi akan berdampak kepada naiknya harga-harga kebutuhan pokok, telah menyebabkan mereka yang hidup di bottom level dalam hierarki distribusi pendapatan, benar-benar mengalami kesulitan. Inflasi yang berbasis luas dan cenderung persisten mengakibatkan kerawanan pangan meningkat secara signifikan. Begitu pula jumlah orang yang menderita kekurangan gizi menjadi bertambah. Masalah ketahanan pangan dan nutrisi tampaknya telah menjadi masalah serius saat ini.

### **Pembangunan Pariwisata di NTB Pasca Covid-19**

Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 adalah meningkatnya daya saing pariwisata dengan indikator pertambahan nilai PDRB sector yang terkait kepariwisataan (Penyediaan akomodasi dan makan minum). Program prioritas pembangunan bidang kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan melalui

pelaksanaan program unggulan pariwisata andalan yang terdiri dari :

1. Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika
2. Penataan tiga gili di KLU (Trawangan-Meno-Air)
3. Wisata Halal dan Sehat
4. Penataan 99 Desa Wisata
5. Geopark – Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora
6. Kawasan Samota
7. Revitalisasi Islamic Center

Arah kebijakan program pengembangan pariwisata adalah mendorong pembentukan desa wisata sesuai dengan potensi wilayah, mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal, meningkatkan pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata, meningkatkan kualitas atraksi pariwisata. Rencana strategis pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunyoto dan Widayati menunjukkan bahwa sector pariwisata berperan dalam menunjang perekonomian dalam tiga bentuk, yakni: perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan antar-wilayah. Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sektor pariwisata dengan konsep pemberdayaan masyarakat dengan menggali dan memunculkan kesadaran kritis masyarakat (miskin) serta mendorong partisipasi mereka dalam mengelola kegiatan kepariwisataan. Masyarakat miskin tidak lagi menjadi obyek tetapi sebagai subyek pembangunan pariwisata. Untuk itu dibutuhkan adanya kelembagaan yang representatif dan dapat dipercaya sebagai wadahnya serta adanya kebijakan dari pemerintah yang pro-poor, terintegrasi dan berkesinambungan.

Dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan pembangunan kepariwisataan terdiri daerah meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Selain pada aspek pengembangan kepariwisataan Dinas Pariwisata Provinsi NTB juga memiliki tanggungjawab dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus dilakukan sejalan dalam rangka memperkuat pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Sejak diperbolehkannya (diberikan izin) dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan event, maka pemerintah daerah NTB dengan gencar melakukan sosialisasi dan promosi event-event yang ada di NTB. Salah satu event yang besar dan menjadi salah satu embrio kebangkitan pariwisata yaitu dengan terselenggaranya event Moto GP di sirkuit mandalika.

Event Motogp ini menjadi daya ungkit baru kebangkitan sector pariwisata di NTB. Semua pemerintah daerah yang ada di NTB diwajibkan untuk mensukseskan Event tersebut. Kolaborasi multi pihak dilakukan. Berbagi peran pun di rancang mulai dari pengembangan UMKM dan yang lainnya. Bahkan untuk mendukung beberapa kegiatan event berstandar internasional, pemerintah daerah “Berlomba-lomba” membangun sirkuit. Mulai dari Sirkuit Lantan 459 di Lombok Tengah, Sirkuit Samota di Sumbawa, Sirkuit Tohpati di Kota Mataram dan Sirkuit Selaparang bekas bandara Selaparang di Kota Mataram.

Melihat keseriusan Pemerintah daerah ini, maka secara usaha sudah layak di apresiasi. Namun catatan yang harus diberikan adalah mengapa daerah-daerah yang nota bene menjadi pusat atraksi pariwisata dan memiliki destinasi wisata tujuan masih tinggi jumlah masyarakat miskin ekstremnya?. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Dimana letak kesalahannya?.

## Kolaborasi Menurunkan Kemiskinan Ekstrem

Selain melakukan kolaborasi bersama, penurunan angka kemiskinan ekstrem pun harus dilakukan melalui multiple intervention. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

Dengan adanya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pada Implementasi tahap pertama, upaya khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 ini di Nusa Tenggara Barat seharusnya dilaksanakan di tiga Kabupaten penyumbang angka kemiskinan yang tertinggi yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Upaya yang harus dilakukan adalah melalui kolaborasi intervensi, salah satunya dengan melakukan pemetaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD. Berdasarkan pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupun daerah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Sebagai kelanjutan dari implementasi Tahap pertama, dilakukan perluasan wilayah Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024. Dalam rangka memperkuat koordinasi

dan konsolidasi program/kegiatan dan anggaran pemerintah pusat dan daerah terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, maka perlu diselenggarakan kegiatan asistensi kepada TKPK daerah di 10 kabupaten kota yang ada di NTB.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuri Taufik (2022) menunjukkan bahwa Ikerangka kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan peningkatan pendapatan seperti peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan masih relevan dan harus dipertajam untuk mencapai ketepatsasaran program.

Hal ini harus dilakukan dikarenakan pada rumah tangga miskin ekstrem memiliki kepala rumah tangga yang masih termasuk dalam usia produktif namun dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang masih terbatas. Mengutip kembali dari World Bank (2021) bahwa berinvestasi pada manusia melalui pendidikan yang berkualitas, pekerjaan dan keterampilan dapat membantu mengembangkan sumber daya manusia, inilah kunci untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif



# **BAB II**

## **DINAMIKA PEMBANGUNAN DAERAH**



## 8

KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN  
ANTAR DAERAH DI NTB, PERLUKAH ?

**D**alam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2019-2023, pemerintah mempunyai visi NTB Gemilang. Hal itu dijabarkan dalam enam misi.

- Pertama, NTB Tangguh dan Mantap. Dilakukan melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
- Kedua, NTB Bersih dan

Melayani. Membentuk birokrasi berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

- Ketiga, NTB Sehat dan Cerdas. Misi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
- Keempat, NTB Asri dan Lestari. Diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan.

- Kelima, NTB Sejahtera dan Mandiri. Dilakukan melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. "Perekonomian ini bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi," katanya.
- Keenam yakni NTB Aman dan Berkah. Misi itu diwujudkan melalui pembangunan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Tema pembangunan yang diusung tahun 2020 adalah pembangunan manusia untuk NTB tangguh, mantap dan lestari. Ada lima program prioritas, yakni mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Kemudian program pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan kemiskinan. Menggenjot nilai investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi. Serta Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.

Berdasarkan kebutuhan dan arah pengembangan, prioritas pembangunan di Pulau Lombok dan Sumbawa berbeda. Pembangunan Pulau Lombok menggunakan pendekatan pulau atau Lombok Eco City Island (Leci), sedangkan Pulau Sumbawa menggunakan pendekatan kawasan atau Sumbawa Eco Zone (Suez). Gubernur Zul menekankan, dua kegiatan berskala internasional perlu mendapat perhatian, yaitu Motogp 2021 dan pembangunan Smelter dan industri turunannya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) di Sumbawa Barat. Rencananya smelter akan beroperasi tahun 2021/2022. Kegiatan besar ini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, betulkah?.

Keselarasan pembangunan antar daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan perputaran ekonomi di NTB. Namun, konektivitas pembangunan antar daerah apakah bisa terwujud?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu merupakan pertanyaan yang dapat dijadikan pelecut dan energy bagi SKPD dan Daerah dalam menelurkan kebijakan. Pertanyaan ini juga dapat dijadikan sebuah renungan. Kenapa begitu?.

Dalam membuat konektivitas kebijakan, diperlukan pemahaman bersama antar SKPD maupun antara Daerah. Dalam SKPD saja sangat sulit untuk mau duduk bersama dalam memecahkan permasalahan bersama, apalagi antar Daerah. Disinilah diperlukan sebuah Leader yang kuat menjadi perekat.

Tulisan ini akan mengambil salah satu contoh dalam membedah dan membuka ruang pemikiran kita dalam mendorong sebuah kebijakan pembangunan yang terkoneksi. Di awal tulisan ini, Bapak gubernur telah mengatakan ada dua prioritas pembangunan kedepannya. Salah satunya yaitu Lombok eco Cuty Island dengan peluang didepepan yaitu Moto GP tahun 2021.

Perkembangan ini juga didukung dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika ke depannya akan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.

Pengembangan KEK Mandalika ini tentunya juga akan memberikan ruang investasi yang sangat menjanjikan yang terbukti dengan akan beroperasinya 8 investor hotel dengan nilai investasi 13 Triliyun dan diperkirakan akan menyerap 58 ribu tenaga kerja/karyawan. Keberadaan hotel bertaraf Internasional serta berbagai hotel/penginapan yang telah ada tentunya akan membutuhkan berbagai macam kebutuhan logistik. Salah satu kebutuhan logistik yang harus dipenuhi oleh hotel adalah berupa kebutuhan logistik makanan

disamping berbagai macam kebutuhan logistik lainnya seperti kebutuhan logistik interior dan eksterior, logistik kamar, perawatan, dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan logistiknya tersebut, tentunya pihak manajemen hotel membutuhkan kerjasama dengan para supplier yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing hotel. Mengingat banyaknya hotel/penginapan yang membutuhkan logistik di KEK Mandalika ini maka, peluang supplier untuk bekerjasama akan sangat terbuka. Namun, untuk lebih menertibkan serta mempersempit peluang persaingan tidak sehat antar supplier tentunya dibutuhkan suatu asosiasi yang mewadahi kepentingan antara pihak hotel dengan para supplier.

Lombok Tengah dengan segala energinya sedang focus kepada pembangunan dengan slogan yang dimiliki KEK mandalika. Prioritas pembangunan baik sumberdaya Manusia maupun Financial focus dalam mendukung pembangunan tersebut. Sebut saja, sekarang ini melalui Pemerintah Pusat Lombok Tengah sedang membangun infrastruktur jalan dari Bandara Internasional Lombok Menuju Kute dengan anggaran yang cukup besar yaitu lebih dari 1 triliun. Belum lagi pembangunan sikuit yang dikebut dan harus bisa beroperasi tahun 2021. Tidak hanya itu, kawasan lingkaran KEK juga focus untuk berbenah, baik SDM maupun bidang yang lainnya.

Namun kita tidak pernah belajar banyak dari model pembangunan yang seperti itu. Model pembangunan yang focus terhadap pengembangan kepariwisataan pernah dilakukan oleh NTB dengan Lombok Barat sebagai leader daerahnya. Awal tahun 1900-an. Lombok Barat bergeliat dengan pengembangan Pariwisata senggiginya. Pengembangan Infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya dikembangkan untuk mendukung kawasan senggigi. Namun apa yang diperoleh oleh masyarakat sekitar?.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), hanya Daerah saja yang mendapatkan keuntungan dalam bentuk Pajak kamar. Itu pun, Pemerintah daerah berdarah-darah dalam melakukan penagihan, bahkan banyak pengusaha nakal yang memanipulasi ijin. Sedangkan masyarakat Lombok Barat secara umum dan masyarakat sekitar senggigi secara khusus hanya mendapatkan kebisingan dan limbah permasalahan sosialnya saja. Manfaat ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat Lombok barat kurang dari 10%-nya. Bahkan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat NTB secara umum tidak lebih dari 20 persennya saja.

Kenapa bisa terjadi hal seperti itu?. Ini merupakan pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Dan sesegera mungkin untuk kita mau duduk dan berbuat bersama.

Saat ini, Lombok Barat dan Lombok Tengah memiliki pasar, dalam bentuk pembangunan dan pemanfaatan dari hasil pembangunan tersebut. Dan Daerah yang memiliki barang/Komoditi adalah Lombok Timur dan Lombok Utara. Sedangkan Mataram sebagai Daerah penyangga dan pendukung segala kegiatan ekonomi yang ada. Bagaimana caranya agar daerah-daerah di Pulau Lombok ini mau duduk bersama dan bersinergi dalam pembangunan?.

Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah dalam rangka percepatan penguatan konektivitas dan meningkatkan multiplier effect dari Pembangunan ini, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Berani tidak NTB membuat peraturan turunannya, untuk mempercepat konektivitas tersebut?.

Sislognas berperan memberikan arah kebijakan dan strategi bagi pengembangan logistik dan konektivitas nasional. Sislognas juga diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan khususnya di

bidang logistik dan infrastruktur, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Sislognas juga diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dengan biaya yang kompetitif, meningkatkan peluang investasi bagi usaha besar, menengah, kecil dan mikro, serta membuka peluang bagi pelaku dan penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala regional dan global.

Selain penguatan konektivitas di koridor ekonomi KEK, Senggigi dan tiga Gili melalui pembangunan infrastruktur jaringan jalan, baik di pusat industri hulu dan hilir maupun di pusat kegiatan, prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang menghubungkan antar daerah dimaksudkan agar konektivitas antar wilayah di kawasan pariwisata dapat segera terintegrasi. sehingga kegiatan ekonomi utama masyarakat yakni dalam pengelolaan hasil pertanian, kerajinan, transportasi, jasa dan hasil perikanan dapat berkembang lebih pesat.

Karena itu prioritas provinsi dan kabupaten/kota harus selaras. Kemudian program Pemprov, Pemkab hingga ke tingkat desa harus juga bersinergi, baik dalam perencanaan maupun penganggarannya.

Ada beberapa program yang dapat disinergikan antara lain, bagaimana mendorong agar iklim pasar bagi pengusaha local, perusahaan daerah dan BUMDES bisa saling terkoneksi dan memiliki ruang yang lebih besar. Jaminan pasar ini, bagi komoditi daerah sangat diperlukan. Pembuatan zona produser, produsen dan konsumen harus dipetakan agar kualitas dan keberlanjutan dapat terpenuhi.

Seluruh program haru berbasis data yang sama dan terkini. Misalnya dalam program kebutuhan dan ketersediaan komoditi harus ter up date sehingga dalam distribusi akan tepat (waktu, jumlah dan kualitasnya).

## 9

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
LOMBOK TENGAH TURUN

**M**engutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Tengah pada 2022 sebesar 65,75, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu, dari 66,72. Meskipun dari capaian IPM meningkat namun, peringkat IPM Kabupaten Lombok Tengah diantara 10 daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di peringkat ke-8 atau turun satu digit dibandingkan peringkat IPM pada 2021 yang berada di peringkat ke-7 (BPS, 2023).

Diawal tahun 2023 ini, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapatkan kado yang kurang baik. Kabupaten Lombok Tengah belum mampu meningkatkan capaian pembangunan yang dilaksanakannya. Hal ini tercermin dari peringkat IPM atau Indeks Pembangunan Manusia pada 2022 yang berada pada posisi ke-8 dari 10 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Turunnya peringkat IPM Kabupaten Lombok Tengah ini tentunya memberikan gambaran mengenai bagaimana kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang masih belum mampu membawa roda pembangunan kearah yang lebih baik. Masyarakat Lombok Tengah masih belum maksimal mengakses hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan dimensi kebutuhan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Didalam komponen penghitungan IPM dengan metode baru, akses pendidikan menjadi salah satu indikator penghitungan (dimensi pendidikan), yaitu melalui kontribusi Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Berdasarkan data BPS, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Tengah pada 2022 mencapai 6,44, walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,29, namun masih kalah jauh dari peningkatan yang dialami oleh Kabupaten sebelah. Kemudian untuk harapan lama sekolah, pun masih sama, walaupun mengalami peningkatan, namun masih kalah jauh dari peningkatan yang dialami oleh Kabupaten sebelah.

Kemudian pada dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 66,38 pada 2021 menjadi 66,75 pada 2022. Hal ini memberikan gambaran sebagai usia rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat Lombok Tengah sejak lahir. Hal ini juga dapat menjadi cerminan kondisi derajat kesehatan masyarakat Lombok Tengah. Selanjutnya dalam penghitungan IPM terdapat komponen atau dimensi ekonomi dimana, komponen ini diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Dalam komponen ini terjadi peningkatan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Lombok Tengah dari Rp9.450.000/kapita/tahun pada 2021 menjadi Rp9.631.000/kapita/tahun pada 2022. Untuk pengeluaran per kapita masyarakat Lombok tengah meningkat dari 9.962 menjadi 10.470.

Tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat/penduduk dapat dilihat dari kemampuan segi indeks pembangunan manusianya berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan ekonominya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, distribusi pendapatan tidak merata, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan semakin meningkat serta masih tingginya tingkat pengangguran (Noviyanti, 2014).

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh suatu daerah. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2016), pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Lombok Tengah pada tahun 2021 mencapai 3,02 persen.

## Tantangan Kedepan

Peningkatan dimensi pendidikan dan kesehatan dalam upaya perbaikan IPM Kabupaten Lombok Tengah di masa depan memiliki tantangan yang seragam, yaitu masih tingginya angka perkawinan usia anak. Menurut data Pengadilan Agama (PA) Praya terjadi peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 156 perkara pada 2020 naik 307 persen perkara pada 2021.

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap dimensi pendidikan dan kesehatan dalam komponen IPM. Masih tingginya angka prevalensi stunting di Lombok Tengah salah satunya disebabkan oleh usia perkawinan usia anak. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 32,6 persen. Kemudian, Masih rendahnya capaian UHH juga disebabkan beberapa hal yang menjadi penyebabnya, antara lain masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah, pada 2021 terdapat 183 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk angka kematian bayi pada 2021 mencapai 10 bayi meninggal per 1.000 kelahiran.

Persoalan lainnya yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yaitu mengenai persoalan kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan pada 2021 volume timbulan sampah mencapai 480,24 ton per hari atau mencapai 176.454 ton per tahun. Dari jumlah volume sampah setiap tahun tersebut, baru 55.115 ton sampah per tahun yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah.

Lalu bagaimana dengan pemerintahan Lombok Tengah pada tahun 2023?. Sampai saat ini, masih belum ada pernyataan serius yang dikeluarkan oleh Bupati maupun Wakil Bupati dan pejabat yang ada di Lombok Tengah mengenai turunnya IPM Lombok Tengah. Sehingga

penulis berpendapat bahwa kegagalan pembangunan ini sengaja ditutupi atau memang pemimpin di Lombok Tengah masih belum mampu berbuat dan menyusun strategi pembangunan yang lebih baik?

Jika memang pemerintah daerah Lombok Tengah serius, maka ke depannya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus lebih memperhatikan nasib masyarakat yang belum memiliki pekerjaan/pengangguran serta adanya lapangan kerja yang luas dan adanya kerja sama antar pemerintah dan berbagai instansi/perusahaan agar pengangguran di daerah yang kita cintai ini dapat tertanggulangi, sesuai dengan Janji-janjinya dulu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Peran pemerintah dalam menangani masalah ini adalah, pemerintah harus mampu memperhatikan pembangunan manusia dengan meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja dan meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat kecil. Melalui peningkatan pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup setiap manusia yang akhirnya dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Daerah tercinta ini.

Itu pun jangan hanya menjadi pemanis pada saat pidato saja. Semoga pidato tersebut diikuti oleh Political will yang kuat dalam hal penganggaran khususnya terkait bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Lombok Tengah. Semoga dengan sudah akan berjalannya belanja daerah di tahun 2023 ini sudah tertuang semua terkait dengan program mengurangi tingkat pengangguran. Agar tidak terkesan bahwa tahun 2023 merupakan tahun politik sehingga kebijakan yang pro masyarakat miskin juga terabaikan.

## 10

HUT KE-76 LOMBOK TENGAH  
& TANTANGAN PEMBANGUNAN

**T**anggal 15 oktober 2021 ini, Lombok Tengah merayakan hari jadinya yang ke 76. Dikarenakan saat ini kita masih dalam suasana pandemic Covid-19, maka beberapa perayaan yang sifatnya pengerahan masa tidak dilakukan. Numaun dilaman-laman media social kita akan melihat ucapan-ucapan selamat hari jadi Lombok tengah yang ke 76 terus dan masih berseliweran.

Perayaan dilakukan lebih sederhana dan lebih kepada

bagaimana menata Lombok Tengah lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Lombok Tengah (Loteng) saat ini menjadi sebuah magnet pembangunan di Nusa tenggara Barat (NTB). Apalagi pemerintah pusat saat ini menjadikan Lombok Tengah sebagai daerah kawasan strategis nasional dengan adanya Kawasan ekonomi Khususnya (KEK) Mandalika.

Tahun ini juga Lombok tengah menjadi daerah percobaan Pemerintah Pusat untuk

menyelenggarakan Event Internasional yaitu Event World Superbike (WSBK). Untuk tahun 2022 akan diadakan event MotoGP.

Event WSB Mandalika sudah di depan mata. November 2021 nanti, event yang diperkirakan menyedot tak kurang dari 30 ribu pengunjung ini akan dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah. Persiapan maksimal dilakukan dengan matang oleh ITDC, Pemprov NTB, Pemda Lombok Tengah dan stakeholders terkait lainnya.

## **Pertumbuhan Ekonomi**

Di tahun 2020 yang lalu, semua kabupaten/kota yang ada di NTB ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Begitupun yang terjadi di Lombok Tengah. Walaupun tertatih tatih, keseimbangan perekonomian Lombok Tengah masih bisa bertahan.

Keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah masih berbasis kepada sector pertanian, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2020 yang lalu, sector ini menyumbang PDRB sebesar 27,05 persen. Ditengah laju pertumbuhan sector ini minus 0,42 persen.

Untuk itu, sudah seharusnya bupati terpilih yaitu Lalu Pathul Bahri dan Nursiah lebih memperhatikan sektor ini dalam pembangunannya kedepan. Tidak hanya sekedar wacana saja, namun betul betul dituangkan dalam aksi nyata dalam bentuk kebijakan anggaran. Saat ini di tahun 2021, sector pertanian diberikan alokasi anggaran tidak sampai 5% dari total belanja daerah.

Sehingga penulis menyarankan, jika Lombok Tengah ingin lebih maju lagi, harus ada perencanaan pembangunan yang berdasarkan kepada potensi lokal. Mana yang memberikan kontribusi besar harus diperhatikan. Jangan melakukan pembangunan hanya berdasarkan asumsi. Sehingga akan dihasilkan model pembangunan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan.

## Kesehatan Dasar

Di Bidang Kesehatan dasar, banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi Lombok Tengah dan masih harus memerlukan kolaborasi bersama dalam memecahkannya. Dikarenakan ini menyangkut generasi bangsa dan penerus bangsa. Permasalahan stunting dan gizi buruk yang ada di Lombok Tengah masih terbilang cukup tinggi. Yaitu masih berada pada angka dua digit.

Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masuk ke dalam enam daerah dengan kasus anak stunting tertinggi di NTB, bahkan secara nasional dengan persentase sekitar 27,79 persen. Itu artinya ada sekitar 20 ribu lebih anak usia hingga 5 tahun di daerah ini yang mengalami stunting atau gangguan tumbuh kembang. Yang bisa berdampak pada kualitas anak di masa yang akan datang.

Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi/Anak (AKB) serta stunting di Lombok Tengah (Lotim) masih menempati peringkat kedua tertinggi se NTB. Jumlah kasus AKB di Loteng mencapai 113 kasus dari 516 kematian di Provinsi NTB. Sementara AKI maternal angkanya mencapai 13 kasus kasus dari 97 kasus di Provinsi NTB. Tiga persoalan besar di sektor kesehatan itu menjadi persoalan besar di Lombok Tengah.

Terkait kondisi ini bupati Lombok Tengah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap beberapa permasalahan kesehatan dasar tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat tim koordinasi dengan menggandeng Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Bupati Lombok tengah menegaskan dalam beberapa kali pertemuan penting bersama para stakeholder, Pemkab Loteng berkomitmen untuk menekan AKI, AKB dan stunting.

Salah satu upaya yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah adalah melakukan digitalisasi kesehatan dalam upaya menurunkan AKI, AKB dan stunting. Bupati memastikan tahun 2022 akan

memberikan perhatian serius dalam kebijakan anggaran. Dikarenakan program penanganan kesehatan khususnya penekanan AKI, AKB dan stunting ini akan dijadikan prioritas.

Diharapkan, saat diprioritaskan, maka kasus AKI, AKB, dan stunting bisa diturunkan lebih signifikan. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti, komitmen Bupati direalisasikan dengan pemberian anggaran khusus terkait dengan permasalahan ini. Atau apakah hanya sebatas wacana saja?.

### **Infrastruktur Dasar**

Kondisi ruas jalan kabupaten di Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih banyak yang rusak. Dari total 809 km panjang ruas jalan kabupaten di daerah ini, sekitar 261 km di antaranya masih dalam kondisi rusak. Kalau bicara prosentase, total panjang ruas jalan kabupaten yang butuh penanganan sekitar 32,3 persen. Dibutuhkan anggaran perbaikan paling tidak Rp250 sampai Rp300 miliar untuk menuntaskannya.

Itu hanya untuk perbaikan ruas jalan yang rusak saja. Hal itu berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran perbaikan jalan setiap tahunnya. Di mana dalam satu tahun, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki jalan antara 10-20 km.

Belum termasuk anggaran pemeliharaan ruas-ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap. Mengingat, bukan hanya ruas jalan rusak saja yang butuh penanganan. Ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap pun tetap harus diperlihara. Jangan sampai rusak, sehingga bisa menambah beban anggaran perbaikan jalan.

Untuk pelayanan dasar lainnya seperti air bersih masih meninggalkan beberapa catatan yang cukup penting. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran tidak kurang dari 10 milyar rupiah dalam melakukan penyaluran air bersih. Pada tahun 2021 Pemerintah telah

melakukan upaya pembuatan sumur bor di beberapa titik. Bahkan dengan jumlah yang sangat fantastis yaitu sekitar 100 lebih sumur bor.

Bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuat tata kelola sumberdaya air ini masih setengah-setengah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang ada masih sifatnya ego sektoral. Belum ada titik temu antar semua pihak terkait dengan adanya tata kelola sumber daya air ini. Beberapa OPD masih jalan sendiri-sendiri. Contohnya PDAM, Dinas LH dan Dinas PUPR tidak pernah sinkron dalam melaksanakan program terkait tata kelola sumberdaya air ini.

Ini menunjukkan perencanaan dalam bidang pengelolaan sumberdaya air di Lombok Tengah masih tersekat-sekat. Untuk itu Lombok Tengah kedepannya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dalam melakukan program khususnya terkait dengan sumberdaya air ini. dikarenakan permasalahan ini merupakan permasalahan dasar dan permasalahan yang sudah ada sejak rezim rezim yang lalu. Jangan hanya pengelolaan sumberdaya air ini dijadikan komoditi politik saja.

### **Tantangan Pembangunan**

Pandemi virus Covid-19 memperbesar tantangan dalam meraih pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pandemi setidaknya akan berdampak pada sejumlah aspek yang termuat dalam SDGs seperti meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan di masyarakat, terhambatnya kemajuan kualitas pendidikan karena sekolah dan universitas tutup, melebarnya disparitas gender, dan juga berkurangnya kesempatan kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Namun disisi lain, pandemi sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun lebih baik dan melakukan akselerasi pencapaian SDGs pasca pandemi. Pengurangan beban dengan menggunakan sumber daya energi lebih efisien. Perbaikan kualitas

Khusus untuk bidang kesehatan, adanya pengalaman menghadapi pandemi, membuat masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga dan memperbaiki kualitas kesehatan. Melalui kebiasaan baru seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan.

Selain ini, kolaborasi merupakan kunci pencapaian pembangunan berkelanjutan, pemerintah jelas tidak dapat bekerja sendirian namun memerlukan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, berbagai langkah bersama bisa dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi dalam agenda aksi kolektif sektor bisnis untuk mendukung pencapaian SDGs.

Adanya event WSBK dan Motogp bisa dijadikan sebuah pelecut dan energi baru bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama kesiapan sumber daya manusianya. Jika SDM sudah maju, maka yang lainnya akan bisa mengikuti dengan sendirinya.

Mudah-mudahan pemerintah daerah mampu dan peka melihat potensi yang dimiliki oleh Lombok Tengah untuk dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan manusianya dan mampu menjadikan kelemahan yang ada menjadi perekat untuk merajut bolong-bolong pembangunan yang ada. Itu semua demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

## 11

SEKDA & TANTANGAN PEMBANGUNAN  
DI LOMBOK TENGAH

**M**asyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sedang mengharapkan adanya perubahan sebagai unsur penting terkait dengan peran pemerintah daerah untuk mampu dan ikut mendorong aktivitas masyarakat dan pembangunan. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah menyangkut sosok Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng pengganti H. Nursiah yang terpilih

menjadi wakil bupati menemani Fathul Bahri untuk periode 2021-2025.

Dalam beberapa diskusi dengan pelaku pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat Lombok Tengah secara umum, terdapat beberapa nama calon yang disebut seperti diantaranya adalah H. Idham Khalid yang saat ini menjabat Plt Sekretaris Daerah di Lombok

Tengah, Lalu Firman selaku kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, dan ada beberapa calon lain yang masih malu-malu untuk bertarung menjadi orang nomor satu di lingkup birokrasi Lombok Tengah ini. Terlepas dari benar atau tidaknya nama-nama tersebut, penulis tentunya berharap dan memberi penekanan bahwa sebisa mungkin didalam penentuan sekda Lombok Tengah mendatang, aspek politis dapat diminimalisir sehingga, para kandidat calon sekda loteng merupakan sosok yang ideal dan berkompeten.

Hal ini tentunya terkait juga dengan masih beragamnya tantangan pembangunan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah Lombok Tengah. Sosok seorang Sekda Loteng yang akan datang harus mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap pembangunan daerah dan bukan berkutat sebatas hanya pada peran konvensional semata. Sekda Loteng mendatang harus merupakan antitesa dari pada Sekda Loteng sebelumnya.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Sekda memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seorang Sekda memiliki fungsi seperti; (1) Penyusunan kebijakan kepala daerah; (2) Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; (3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan lembaga lain; (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; (5) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sosok Sekda Loteng mendatang akan dihadapi oleh beberapa tantangan pembangunan, dimana salah satunya yaitu fakta masih tingginya angka kemiskinan penduduk Loteng. Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Loteng menyebutkan dari 1.034.859 jiwa total penduduk Loteng pada tahun 2020, 13,44 persen atau 128,100 ribu orang termasuk dalam kategori pra sejahtera atau miskin. Selain masalah kemiskinan, tantangan seorang Sekda Loteng ke depannya adalah mengenai jumlah anak yang mengalami kurang dan stunting. Dalam laporan mengenai Profil Kesehatan Provinsi NTB tahun 2018 menyebutkan bahwa untuk anak yang mengalami gizi kurang di Lombok Tengah pada 2018 sebanyak 14,48 persen atau 9.119 anak dan untuk stunting sebanyak 30,95 persen atau 20.435 (Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2019).

Tentunya apabila diuraikan lebih panjang masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan Lombok Tengah yang akan dihadapi sosok Sekda Loteng yang akan datang seperti, persoalan alih fungsi lahan, pemerataan pembangunan, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya.

Untuk itu, Kabupaten Lombok Tengah membutuhkan seorang Sekda yang memiliki kemampuan serta kompetensi dalam mengatasi setiap permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut. Hal ini sangat penting mengingat berbagai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Lombok Tengah yang merupakan potensi besar yang dapat digali dan dimanfaatkan sebagai sarana pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan semua itu maka, Kabupaten Lombok Tengah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu fungsi seorang Sekda adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga, seorang Sekda Loteng ke depannya juga dituntut untuk mampu mencari peluang-peluang penerimaan daerah melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang dapat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mengelola PAD dengan baik dan sesuai dengan harapan dari otonomi daerah. Pada tahun 2018 PAD Loteng hanya mampu menyumbang 10,62 persen dari total Rp 2 triliun APBD. Suatu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar dan mampu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya serta mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi daerah tersebut stabil.

Sekda Loteng ke depan harus kuat dalam manajerial pemberdayaan masyarakat terutama apabila melihat sebagian besar penduduk Lombok Tengah sumber utama pencahariannya adalah petani. Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 139 Desa/Kelurahan sebagian besar wilayahnya adalah memiliki potensi pertanian. Terdapat 130 desa penduduknya bekerja pada sub sektor tanaman pangan, 14 desa tanaman palawija dan 18 desa pada tanaman hortikultura. Memaksimalkan potensi pertanian sebagai sumber PAD sangatlah beralasan karena kontribusi sektor pertanian bersama perkebunan dan kehutanan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Loteng sebesar 27,05 persen atau mencapai Rp 5.2 milyar.

Di luar sektor pertanian, Kabupaten Lombok Tengah juga dianugrahi kekayaan berupa keindahan panorama alamnya sebagai modal besar dalam sektor pariwisata. Sebut saja Pantai Kuta, Mawun dan Selong Belanak di wilayah Selatan, Kawasan Gunung Rinjani dengan berbagai keindahan air terjun didalamnya dan berbagai kebudayaan asli masyarakat Loteng serta masih banyak lagi potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Kemampuan dan kompetensi Sekda ini akan tercermin dari kinerja dalam membangun Kabupaten Lombok Tengah, baik menyangkut

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maupun kemampuan aparat aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publiknya di era otonomi daerah (otda) ini.

Untuk itu, penulis berharap masyarakat Loteng tentunya tidak boleh terjebak pada aspek-aspek yang bersifat subyektif ataupun politis terkait dengan penentuan kriteria calon sekda Loteng nantinya. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana melihat kemampuan dari seorang calon Sekda Loteng dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan pembangunan di daerah Gumi Tatas Tuhu Tresna ini.



## 12

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOMBOK TENGAH BERJALAN LAMBAN, KENAPA?



Sejak dilantik di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB di Kota Mataram pada Jum'at 26 Februari 2021 yang lalu. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih hasil Pilkada Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip-Dr. H. M. Nursiah (Pathul-Nursiah) sudah menjalani masa pemerintahannya sekitar 7 bulan. Namun sampai saat ini roda pemerintahannya masih berjalan sangat lambat. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa Organisasi Perangkat

daerah (OPD) yang masih belum memiliki pimpinan (Kepala).

Memang beberapa minggu yang lalu yakni minggu pertama September Bupati melantik 11 Kepala OPD di Lombok Tengah. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak OPD teknis yang belum memiliki Kepala. Dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan, ini akan berdampak kepada lambatnya kerja-kerja pemerintahan. Apalagi OPD teknis merupakan OPD yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan merupakan bentuk pengelolaan pemerintahan dengan bersandar kepada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat membicarakan masalah yang dihadapi sekaligus merencanakan apa yang akan dilakukan. selain itu, tata kelola pemerintahan merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan Pancasila agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Konsep dari *good governance* diadopsi dari ide dasar bagaimana menjalankan bisnis secara profesional. Hal ini terkait dengan target yang jelas, penampilan, komunikasi yang baik dan transparansi, pengawasan dan pengevaluasian dari sebuah hasil. Aspek teknis dari tata kelola pemerintahan yang baik ini merupakan sebuah tantangan, khususnya bagi administrasi model lama yang terbiasa dengan system tertutup dan tidak transparan, serta sedikit atau tidak ada control dari luar.

Pemerintah berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.

*Good governance* menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya).

Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar.

Dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), hal ini tidak sekedar melakukan perubahan dalam aspek teknis semata. Lebih dari itu, Good Governance juga harus dipahami bagaimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Reformasi Birokrasi menjadi salah satu isu utama yang harus dilakukan oleh Pathul-Nursiah.

Pertanyaannya adalah, kenapa reformasi birokrasi dalam pemerintahan Lombok Tengah berjalan sangat lambat?. Dalam bahasa sederhananya, kenapa Bupati lambat dalam menentukan pembantunya yaitu kepala-kepala dinas?.

Secara latar belakang, Bupati Lombok Tengah terpilih saat ini yaitu Lalu Fathul adalah seorang politisi murni. Pengalamannya dalam dunia politik tidak bisa diragukan lagi. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam dunia politik. Memulai kariernya dari salah satu partai kecil yaitu PKNU, beliau mampu memegang unsur pimpinan DPRD Lombok Tengah di saat-saat awal beliau memulai kariernya. Dan saat ini beliau memegang pucuk pimpinan daerah salah satu partai besar di Indonesia yaitu sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah.

Meskipun berpengalaman dalam dunia politik, Bupati Lombok Tengah belum memiliki pengalaman yang handal dalam dunia pemerintahan. Sebelum menjadi bupati di daerah dengan motto "Tatas Tuhu Tresna", Lalu Pathul Bahri telah memiliki pengalaman menjadi seorang wakil bupati mendampingi H. Suhaili, FT (bupati kala itu) namun, hingga saat

ini pengalaman sebagai wakil bupati belum mampu untuk diterapkan secara cepat dan tepat.

Sebagai anekdot, biasanya pelaut yang handal akan selalu berhati-hati dengan ombak yang berada dipinggir pantai. Ombak di awal akan kelihatan lebih besar dan biasanya kesalahan sering terjadi di awal. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang menjadikan kenapa bupati sampai saat ini masih dalam pusaran kebimbangan dalam menentukan pembantunya.

Sebenarnya dengan adanya wakil yang seorang birokrat akan membuat bupati lebih terarah dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, sampai saat ini wakil bupati masih belum beraktifitas 100 persen, dikarenakan kendala kesehatan beliau.

Kompleksnya permasalahan pembangunan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menunjuk calon-calon pembantunya yang mumpuni. Belum lagi, tahun ini merupakan tahun pertama dalam pemerintahan sehingga tarik ulur dan desakan dari orang-orang yang berjasa dalam perjuangan dahulu menjadi penting juga untuk dipertimbangkan.

Dengan kata lain, dalam pembangunan saat ini, Lombok Tengah menghadapi kerumitan yang semakin berkembang dan meningkatnya perubahan yang pesat sehingga mengalami beberapa kemungkinan, peluang dan tantangan. Ditambah adanya tekanan-tekanan kebijakan dari pemerintah pusat juga sangat mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah.

Bupati Lombok Tengah, jika ingin menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus memiliki tiga aspek yang sangat fundamental, yaitu etika dasar pemerintahan, prinsip persamaan, dan munculnya kerjasama antara pemerintahan dengan profesionalitas.

Beberapa minggu kemarin, bupati juga melantik orang ketiga dalam pemerintahan Lombok Tengah yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), seharusnya Sekda akan mampu menjadi penyeimbang dalam pemerintahan yang ada.

Sekda sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah, dengan tugas fungsi (tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2007, untuk menjalankan tupoksi tersebut kemampuan sebagai komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjembatani dan membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misinya, menyiapkan, menyusun dan menyepakati program legislatif daerah (prolegda) dengan DPRD, menjaga kestabilan kinerja aparatur masing-masing SKPD untuk mensinergikan implementasi kebijakan daerah melalui program-program nyata bagi masyarakat. Harapannya sekda akan bekerja dengan cepat untuk mengejar ketinggalan birokrasi. Akan tetapi sampai saat ini, peran sekda masih belum nampak.

Dengan terus berjalannya roda pemerintahan, dan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Sudah seharusnya bupati menutupi lubang-lubang kecil pembangunan yang ada. Dalam semua hal, seperti mempercepat mengisi posisi yang kosong dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik agar Lombok Tengah menjadi daerah yang sesuai dengan visi misinya dahulu pada saat kampanye.



## 13

ESTAFET KEPEMIMPINAN  
UNTUK LOMBOK TIMUR BARU

**S**iang itu mendung di langit Lombok Timur masih menyelimuti. Memang bulan ini masih suasana bulan Februari 2022. Musim penghujan masih cukup lama kedepannya. Apalagi menurut tradisi, bulan ini merupakan bulan saat perayaan event 'Bau Nyale" menurut penanggalan etnis Sasak (warige), sehingga seminggu ke depannya diprediksi akan terus turun hujan.

Walaupun susasana cuaca agak dingin, tidak membuat beberapa anak muda asik diskusi. Bahkan sesekali suasana menjadi agak hangat. Tempat diskusi kali ini di Benteng Van Flower, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan areal persawahan menjadi pemandangan utamanya. Lokasi ini menjadi salah satu idola baru bagi anak-anak muda untuk ngopi.

Anak-anak muda yang asik diskusi ini bisa dikatakan sebagai generasi “Emas”nya Lombok Timur. Tema yang dibahas tidak jauh-jauh masih terkait dengan isu-isu pembangunan di Lombok Timur. Tantangan dan potensi dalam mempercepat laju pembangunan bagi masyarakat dan peluang estafet kepemimpinan di Lombok Timur kedepannya.

Pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam pembangunan suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk yaitu satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda. Data seperti ini juga sama di Lombok Timur. Berdasarkan data BPS bahwa jumlah anak muda di Lombok Timur sekitar 25%.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam suatu pertemuan penting tingkat Nasional pernah mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi.

Salah satu alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ialah melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penilaian IPP didasari atas 15 indikator yang masing-masing dikelompokkan dalam lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Walaupun capaian IPP Lombok Timur masih dibilang cukup rendah, namun masih banyak waktu dan strategi untuk merubahnya kedepan. Itu pun jika pemimpinnya memiliki kepekaan, dan harapan itu ada pada kepemimpinan berikutnya. Sehingga estafet kepemimpinan itu harus dan mutlak direbut oleh anak-anak muda sebagai generasi penerus.

Selain itu, pembangunan pemuda tentu tidak hanya terkait dengan IPP namun juga dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's (SDG's) yang sudah dicanangkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015. Sehingga demikian, dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan akan mampu mengejar ketertinggalan dalam pembangunan kepemudaan.

Kehebatan kepemimpinan ada akhirnya, semua yang kita lakukan didunia ini ada batasnya. Kalau kita melihat kepemimpinan di Lombok Timur dari masa ke masa kita melihat bahwa setiap pemimpin memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda beda. Dengan gaya dan karakteristinya masing masing. Misalnya kepemimpinan Ali Bin Dahlan yang seorang pemimpin luar biasa, tegas, bijaksana dan sangat disegani. Tetapi ada masa untuk turun, ada waktu untuk beristirahat dan berakhir.

Kepemimpinan diumpamakan seperti pelari estafet, bukan pelari maraton. Kalau pelari maraton dia berlatih untuk berlari sendiri, segala halangan dan rintangan coba dilalui sendiri, dia berlatih agar dapat berlari dan mencapai garis finis lebih cepat dari yang lainnya. Daya tahan tubuh sangat dibutuhkan untuk pelari jenis ini. Sedangkan pelari estafet harus berlatih bersama, kerjasama sangat dibutuhkan dalam olah raga lari jenis ini. Itulah sebabnya kalau kita sering menyaksikan perlombaan lari internasional biasanya pusat perhatian ada ketika lari jenis ini dilombakan. Amerika, Canada, Jamaika, Brasil dan beberapa negara eropa merupakan jago-jago lari estafet.

Yang menarik dalam jenis lari ini adalah, setiap anggota dilatih untuk memiliki kecepatan lari yang sama, pelari yang paling cepat biasanya ditempatkan sebagai pelari terakhir. Latihan memindahkan tongkat dari satu pelari ke pelari berikutnya juga memakan waktu yang lama, perlu kesehatan dalam melakukan pemindahan tongkat estafet ini.

Dalam proses pemindahan tongkat dari pelari pertama ke pelari berikutnya tidak boleh ada perlambatan, artinya kecepatan harus tetap sama, perlu latihan yang seksama, sering terjadi kesalahan dalam proses pemindahan ini, kadang kala bahkan ada yang tongkatnya jatuh, sehingga sudah membuang waktu sekian detik.

Menyadari perlunya estafet kepemimpinan, maka pemimpin akan dikatakan berhasil dalam aspek regenerasi jika mampu mengkader orang dibawahnya untuk menggantikan kepemimpinannya. Tidak hanya berhasil dalam konteks pembangunan saja, regenerasi untuk melanjutkan kepemimpinan juga menjadi hal sangat penting.

Jika dilihat dari peluang anak-anak muda di Lombok Timur untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan tersebut, maka Lombok Timur memiliki banyak talenta. Sebut saja di bidang birokrasi, Lombok Timur memiliki orang-orang yang cukup layak memegang tongkat estafet kepemimpinan tersebut. Ada seorang Drs. H. Muhammad Juani Taofik, M.AP yang saat ini memegang amanah sebagai Sekretaris Daerah Lombok Timur, ada Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, ada drg. H. Asrul Sani, M.Kes yang saat ini menjabat sebagai Kadis Dispora Lombok Timur, ada dr. H.M. Tantowi Jauhari mantan direktur RSUD dr. Raden Soedjono.

Selain dari kalangan birokrasi, saat ini sistem pemilihan umum kita yang disebut demokrasi menghadirkan partai politik dalam mencetak pemimpin. Partai politik saat ini merupakan wadah seseorang untuk dapat menjadi peserta yang dipilih di dalam Pemilu. Partai memiliki tugas dan fungsi pokok untuk melakukan pendidikan politik, sosial-politik sekaligus melakukan artikulasi dan agregasi atau menghimpun kepentingan masyarakat.

Dari kalangan politisi, Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak politisi-politisi handal yang sangat cocok untuk memegang estafet kepemimpinan di Lombok Timur. Sebut saja H Tanwirul Anhar (DPRD Lotim-PBB), ada Ir.H. Moh. Edwin Hadiwijaya (DPRD Provinsi NTB-PBB), ada ketua DPRD NTB saat ini yaitu Murnan, S.Pd. (PKS), ada H Khairul Warisin dari Gerindra, ada H. Daeng Paelori, S.E. (Golkar) dan masih banyak lagi yang layak secara pengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Dalam sebuah acara, mantan Presiden RI ke-3, BJ Habibie, menyatakan perlunya mengembangkan budaya estafet dalam kehidupan berpolitik. Budaya itu ialah memberikan kepemimpinan politik kepada generasi lebih muda. "Bukalah pintu untuk pimpinan apakah itu partai, daerah dan negara, berikan kepada mereka yang usianya antara 40 sampai 60 tahun."

Budaya estafet memang tidak mudah dilaksanakan. Habibie, tokoh senior bangsa ini, sang pemimpin, telah mengingatkannya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita berlapang dada untuk membawa Lombok Timur rumah kita bersama ini menjadi daerah yang maju dan sejahtera yang kita sebut Lombok Timur Baru. Ya tentunya dengan mengkader anak-anak penerus generasi ini dan memberikan tongkat itu dengan legowo untuk kepentingan orang banyak.



## 14

"PR" DI ULANG TAHUN LOMBOK TIMUR  
KE-126

**P**ada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperingati hari jadinya yang ke 126 tahun. Di usia yang lebih satu abad ini, banyak capaian pembangunan dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Di awal tulisan ini kita akan coba membuka beberapa capaian dan klaim pembangunan dari pemimpin saat ini yaitu Bapak Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M.-H. Rumaksi S.J. SH.

Di beranda-beranda media online dan media sosial, beberapa bulan ini kita akan disajikan oleh klaim pembangunan yang dianggap berhasil oleh pasangan pemimpin Sukiman-Rumaksi. Yang pertama yaitu dengan masuknya Desa Tetebatu menjadi perwakilan Indonesia di ajang pariwisata dunia yaitu Acara yang digelar tahunan oleh United Nation

World Tourism Organization (UNWTO) ini merupakan ajang bergengsi di dunia pariwisata dunia.

Apalagi dengan hadirnya secara virtual Menteri Pariwisata dalam acara pelantikan Kepala Desa se-Lombok Timur pada saat acara perayaan hari jadi Lombok Timur. Kehadiran menteri Pariwisata sekaligus memberikan energi baru bagi Lombok Timur.

UNWTO meramalkan bahwa ke depan pasca Covid-19 pertumbuhan pariwisata domestik akan lebih dulu stabil dibandingkan dengan pariwisata internasional. Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) berharap tata kelola desa wisata yang ada di seluruh wilayah Lombok Timur lebih ditingkatkan, karena akan menguntungkan masyarakat pedesaan yang menjadi lokasi desa wisata. Apabila hal ini dapat

dipraktikkan maka, akan menjaga mata pencaharian masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 yang lalu yaitu sebanyak 3,7 juta pengunjung. Hanya 1% saja yang datang ke Lombok Timur. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Yang lebih ekstrim bisa kita katakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak pernah bekerja sama sekali dalam menunjang pembangunan pariwisata. Hal ini, dikuatkan lagi dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Lombok Timur dalam bidang pariwisata tidak pernah sampai 1 persen dari total anggaran belanja daerah. Lalu apa yang harus dibanggakan?.

### **Kesehatan Dasar**

Di dalam bidang kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. Ada beberapa pelayanan dasar yang memang mencapai target, bahkan melebihi dari target. Seperti Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang mencapai 104,91%. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mencapai 106,06% dan Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir sudah mencapai 106,22%.

Namun ada juga yang menjadi pekerjaan rumah kita yang masih harus memerlukan kolaborasi bersama dalam memecahkannya. Dikarenakan ini menyangkut generasi bangsa dan penerus bangsa. Permasalahan stunting dan gizi buruk yang ada di Lombok Timur masih terbilang cukup tinggi. Yaitu masih berada pada angka dua digit.

Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB) serta stunting di Lombok Timur (Lotim) masih menempati peringkat tertinggi se NTB. Jumlah kasus AKB di Lotim mencapai 171 dari 516 kematian di Provinsi NTB. Sementara AKI maternal angkanya mencapai 29 kasus dari 97 kasus di Provinsi NTB. Tiga persoalan besar di sektor kesehatan itu menjadi persoalan besar di Lotim.

Terkait kondisi ini bupati menegaskan dalam beberapa kali pertemuan penting bersama para stakeholder, Pemkab Lotim berkomitmen untuk menekan AKI, AKB dan stunting. Di bawah pimpinannya Sukiman-Rumaksi, pihaknya mengupayakan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Lotim yang saat ini masih berada di posisi ke-8 dari 10 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi NTB.

Salah satu upaya yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah adalah melakukan digitalisasi kesehatan dalam upaya menurunkan AKI, AKB dan stunting. Bupati memastikan tahun 2021, pada anggaran perubahan mendatang, program penanganan kesehatan khususnya penekanan AKI, AKB dan stunting ini akan diadakan prioritas.

Diharapkan, saat diprioritaskan, maka kasus AKI, AKB, dan stunting bisa diturunkan lebih signifikan. Dan saat ini dalam tahap pembahasan anggaran perubahan. Penulis belum melihat keseriusan pemerintah daerah dalam hal kebijakan anggaran untuk kasus ini. Atau apakah hanya sebatas wacana saja?.

Memang di hari ulang tahun yang ke 126 ini, Lombok Timur juga mendapatkan angin segar dengan memperoleh penghargaan dalam bidang pengelolaan posyandu. Hanya Lombok Timur yang mampu menjadikan posyandunya menjadi posyandu keluarga. Jadi 100 persen posyandu yang ada dilombok timur ini sudah naik kelas.

Namun ini juga menjadi catatan penting kita. Sejak tahun 2020 yang lalu, semua aktivitas posyandu di seluruh Indonesia berhenti sementara dikarenakan dengan adanya wabah covid-19. Namun, anehnya di Lombok Timur ini dengan adanya pembatasan kegiatan posyandu malah bisa menaikkan level posyandunya menjadi posyandu keluarga. 100 persen lagi. Ini capaian yang cukup luar biasa. Dan sudah sepatutnya Kabupaten seluruh Indonesia belajar ke Lombok Timur.

## Infrastruktur Dasar

Di bidang infrastruktur, dari total panjang ruas jalan kabupaten yang tersebar di 21 kecamatan 1.018.835 Km yang terbagi dalam 365 ruas jalan. Masih sekitar 300-an km yang masih belum dikerjakan sampai tahun 2021 ini. Belum lagi dengan perbaikan jalan yang harus dilakukan jumlah anggaran minimal 20 milyar untuk melakukan perawatan dan perbaikan setiap tahunnya.

Untuk pelayanan dasar lainnya seperti air bersih masih meninggalkan beberapa catatan yang cukup penting. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran tidak kurang dari 10 milyar dalam melakukan penyaluran air bersih. Pada tahun 2020 yang lalu 15 kecamatan dari 21 kecamatan di Lombok Timur mengalami kekeringan. Apakah kebijakan dalam bentuk penyaluran air bersih saja yang akan dilakukan? Kita akan menanti janji bapak bupati dalam bidang air bersih ini di tahun 2021.

Selentingan kabar penulis dapatkan informasi bahwa pada tahun 2021 ini pemerintah Daerah melakukan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank NTB Syariah untuk mengerjakan proyek infrastruktur dalam bidang air bersih. Itu bentuk komitmen pemerintah daerah. Akan tetapi dalam analisa kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) menemukan beberapa kebijakan yang hanya setengah-setengah.

Kenapa penulis mengatakan setengah-setengah?. Dalam bidang infrastruktur, di gelontorkan anggaran yang cukup besar yaitu sekitar Rp.90 milyar untuk program perpipaan dan irigasi. Namun dalam bidang pelestarian sumber-sumber mata air pada tahun 2021 ini tidak ada anggaran sama sekali atau bisa kita katakan 0 rupiah.

Ini menunjukkan perencanaan dalam bidang pengelolaan sumberdaya air di Lombok Timur masih tersekat-sekat. Untuk itu Lombok Timur kedepannya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dalam

melakukan program khususnya terkait dengan sumberdaya air ini. dikarenakan permasalahan ini merupakan permasalahan dasar dan permasalahan yang sudah ada sejak rezim rezim yang lalu. Jangan hanya pengelolaan sumberdaya air ini dijadikan komoditi politik saja.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Di tahun 2020 yang lalu, kita juga diberikan energi baru dengan berhasilnya Lombok Timur menjaga stabilitas ekonominya. Dari semua Kabupaten yang ada di NTB, hanya Lombok Timur yang mampu menjaga stabilitas ekonominya dan itu terbaik, walaupun minus 3%.

Pertumbuhan ekonomi yang bagus itu dikarenakan dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh Lombok Timur yaitu bidang pertanian. Sektor ini menyumbang PDRB yang paling tinggi bagi Lombok Timur yaitu 27%.

Untuk itu, sudah sepantasnya Sukiman-Rumaksi menjadikan sektor ini menjadi sektor prioritas dalam bidang kebijakan anggaran. Namun, sejak awal pemerintahan Sukiman-Rumaksi, bidang pertanian tidak pernah mendapatkan anggaran sampai 5%.

Sehingga penulis menyarankan, jika Lombok Timur ingin lebih maju lagi, harus ada perencanaan pembangunan yang berdasarkan kepada potensi lokal. Mana yang memberikan kontribusi besar harus diperhatikan. Jangan melakukan pembangunan hanya berdasarkan asumsi. Sehingga akan dihasilkan model pembangunan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan.



## 15

PEMBANGUNAN KAWASAN UTARA  
LOMBOK TIMUR HARUS TERINTEGRASI

Saat ini Kawasan Utara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipandang sebagai motor penggerak untuk pembangunan berkelanjutan di Lotim sehingga kawasan Utara dipandang sangat penting bagi masa depan Lombok Timur secara keseluruhan. Kawasan Utara memainkan peran penting dalam perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial maupun budaya bagi Lombok Timur. Untuk itu, pembangunan

terintegrasi semakin dibutuhkan saat ini karena kompleksitas isu, masalah, dan sumber daya.

Pembangunan terintegrasi akan mengatasi masalah ini dengan menyediakan solusi yang komprehensif dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah yang berbasis agraris yang saat ini mencoba menjadi daerah pariwisata.

Dalam rangka mencapai predikat sebagai daerah berbasis pertanian menuju pariwisata, Lombok Timur harus melaksanakan pembangunan terintegrasi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” ayat (2) menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Ayat (3) juga menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian integral dari prosedur perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan laporan tahunan yang dilakukan oleh unsur-unsur negara dan masyarakat di tingkat nasional dan lokal.

Pembangunan terintegrasi memerlukan perencanaan dan manajemen untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam suatu entitas. Jika tidak, maka situasi tersebut akan membawa berbagai masalah dalam pemerintahan Lombok Timur. Setiap lembaga memiliki program masing-masing yang mereka jalankan. Pembangunan terintegrasi terdiri dari sistem yang saling berhubungan untuk mencapai perbaikan meliputi ekonomi, fisik, sosial dan lingkungan daerah.

Kunci untuk seluruh proses pembangunan terintegrasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus dipertimbangkan dalam rangka memelihara hubungan satu sama lain. Sinergi antara unsur-unsur harus berjalan sedemikian rupa sehingga efek dari pembangunan terintegrasi akan lebih terasa dari pada setiap stakeholder berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini pariwisata menjadi sektor yang sangat menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan. The World Tourism Organization (UNWTO) memperkirakan bahwa pariwisata menyumbang hingga 10% dari produk domestik bruto global, sehingga pariwisata menjadi industri terbesar di dunia. Potensi pariwisata memberikan

kontribusi yang cukup besar dan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan (International Tourism Partnership, 2004: 3). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pariwisata dapat memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan bagi negara-negara berkembang. Pariwisata merupakan salah satu jalan yang layak diutamakan untuk pembangunan ekonomi lokal dewasa ini, termasuk di Lombok Timur.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), tingkat kemiskinan di Lombok Timur masih terbilang cukup tinggi. Penduduk miskin di Lombok Timur tersebar di tiga zona yaitu zona kawasan pinggir hutan, zona pesisir dan zona perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjumlah 15,38% dari total penduduk. Artinya, 1 dari 7 penduduk di Lombok Timur tersebut hidup di bawah garis kemiskinan.

### **Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Pusat pertumbuhan (growth center) merupakan wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya pesat. Sehingga dijadikan pusat pembangunan yang dipengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Dengan adanya kawasan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, diharapkan kawasan-kawasan di sekitarnya ikut maju.

Dalam buku *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi* (2008) karya Sjafrizal, seorang ekonom asal Prancis, Francois Perroux menyatakan pusat pertumbuhan adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan nasional. Selanjutnya berkembang menjadi konsep pusat pertumbuhan yang dalam bahasa Prancis dinamakan sebagai *pole de croissance*.

Lombok Timur memiliki kawasan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Rata-rata kawasan tersebut berada di kawasan Utara Lombok Timur. Sebut saja Kecamatan Masbagik, Kecamatan Aikmel

dan Kecamatan Pringgabaya. Ketiga kecamatan tersebut memiliki sumbangsih secara ekonomi cukup bagus bagi perekonomian Lombok Timur.

Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Aikmel menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memberikan sumbangan baik secara perekonomian daerah maupun secara langsung memberikan sumbangan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang cukup tinggi. Begitupun dengan kecamatan pringgabaya yang saat ini berdasarkan Rencana Tata ruangnya menjadi kawasan industry. Pringgabaya dengan konsep kawasan industrinya berkembang cukup pesat. Saat ini, di Pringgabaya sudah ada puluhan perusahaan yang bergerak dalam bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Listrik dan Pertanian.

Sumber PAD Lombok Timur yang paling besar adalah dari pendapatan pajak. Sedangkan pajak di himpun dari seluruh masyarakat di Lombok Timur. Apabila ada kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur akan menyebabkan kenaikan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak tumbuhnya nilai PDRB di Lombok Timur. PDRB yang tumbuh memiliki arti semakin berkembangnya perekonomian di provinsi Jawa Timur. Ketika perekonomian tumbuh akan membawa dampak tumbuhnya pajak yang dihimpun akibat tumbuhnya nilai PDRB.

Pemerintah Daerah Lombok Timur harus berani dalam pengelolaan anggaran yang berpihak bagi kawasan utara. Pengeluaran/belanja anggaran pemerintah daerah Lombok Timur untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur dasar harus jauh ditambah besarnya. Sarana dan prasarana yang baik sangat di perlukan untuk pengembangan dunia usaha yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

## Pembangunan Hijau Bagi Lombok Timur

Pembangunan kawasan Utara Lombok Timur harus mengikuti prinsip-prinsip pembangunan hijau. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang menjadi kunci dalam pelaksanaannya yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Outcome of UN World Summit, 2005). Selain pembangunan berkelanjutan, terdapat pula konsep pembangunan hijau yang sebenarnya berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan antara pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan terletak pada fokus pembangunan hijau yang lebih mengutamakan aspek lingkungan dalam pembangunan diantara tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan dimana makna hijau sendiri dari istilah pembangunan hijau dapat dikatakan merujuk pada alam dan kelestariannya.

Kawasan Utara Lombok Timur yang memiliki Sumberdaya Alam yang melimpah yaitu Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Swela, kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sikur, Kecamatan Montong Gading.

Dengan melihat bahwa kawasan utara Lombok Timur memiliki sumber daya alam yang kaya raya dan daerah Utara ini juga sebagai penyangga utama Lombok Timur secara keseluruhan. Maka, kedepannya memang diperlukan model pembangunan yang tidak hanya focus kepada ekonomi dan fisik saja, namun lebih mengedepankan bagaimana lingkungannya terjaga. Nasib Lombok Timur secara keseluruhan terletak pada kawasan-kawasan penyangga yang memiliki keunikan khusus dalam Sumberdaya alam. Sebut saja air. Pembangunan kedepannya harus mengedepankan kebermanfaatannya bagi lingkungan, tidak hanya bagi manusia semata.

Komitmen pemerintah daerah di semua tingkatan terhadap pembangunan hijau ini harus ditunjukkan dengan kebijakannya. Pemerintah juga harus memainkan peran kunci dalam memastikan kualitas tertinggi dari institusi publik, yang pada gilirannya, harus mendukung program dan kegiatan pertumbuhan ekonomi hijau, baik secara finansial atau sebagai entitas pelaksana.

Semoga, di sisa dua tahun kepemimpinan Sukiman-Rumaksi di Lombok Timur ini mampu menterjemahkan kebutuhan utama Lombok Timur secara utuh. Tidak hanya membangun dengan menggunakan ambisi politik semata. Ini semua demi menjaga keutuhan dan bagaimana mencapai visi dan misi awalnya dulu yaitu Lombok Timur yang sejahtera.

## 16

KOCOK ULANG OPD :  
OPTIMALISASI KINERJA VS BALAS BUDI

**M**inggu ini, pertengahan April 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan pergantian atau mutasi pada beberapa pejabat eselon II dan III. Kegiatan mutasi itu dihadiri langsung oleh Bupati H. M. Sukiman Azmy. Bahkan dalam kesempatan itu, Bupati Sukiman menyampaikan beberapa pesan yang secara tersirat bahwa ada “Kebijakan yang saling sikut” antara bupati dan wakil bupati.

Ada tiga poin pokok yang disampaikan bupati dalam pelantikan rotasi pejabat tersebut. Bupati menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai salah satu yang akan memperkuat pencapaian IPM Lombok Timur. Karena itu ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Selain itu sekolah tidak layak yang tak kunjung direnovasi

karena alasan kepala sekolah yang tidak mengisi Dapodik. Bupati meminta UPT Dikbud dan jajaran lainnya, bahkan kepala dinas dapat bergerak langsung melihat kondisi sekolah-sekolah tersebut untuk kemudian mengingatkan Kepala Sekolah mengisi Dapodik. Bupati meminta agar kepala sekolah yang tidak mengisi Dapodik dikenakan sanksi. Hal tersebut sebagai bentuk ketegasan dan upaya menegakkan aturan. Terkait aturan ini, ia pun menyinggung penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang harus untuk kepentingan sekolah.

Selanjutnya, Bupati menekankan agar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bupati mengingatkan agar tertib administrasi, serta tidak disusupi pihak-pihak yang hendak mengambil kesempatan untuk merugikan masyarakat.

Terakhir yaitu, setiap perizinan yang dikeluarkan memperhatikan pula aspek kepentingan masyarakat. Dipesankannya agar pejabat baru dapat melihat isu perizinan yang sensitif dan melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan. Sehingga izin yang dikeluarkan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Penataan sumber daya manusia (SDM) pada organisasi pemerintah berbentuk mutasi sebagai perwujudan dari dinamika organisasi. Menurut Mas'udi dalam (Hidayati, 2012) Mutasi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan kepekerjaan lain, Pegawai Negeri Sipil dapat berpindah antar jabatan fungsional maupun jabatan struktural di instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Ruang lingkup mutasi menurut Hasibuan dikutip (Kasiaheng, Kimbal, & Liando, 2017) mencakup semua perubahan baik posisi, pekerjaan, tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal (promosi dan demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer ataupun production transfer di dalam suatu organisasi.

Lalu, apakah dengan adanya kocok ulang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kali ini di Lombok Timur akan mempercepat capaian pembangunan atau hanya untuk mengejar capaian yang diinginkan oleh bupati semata?.

Padahal kalau kita merujuk kepada masa jabatan Bupati Sukiman, bisa kita katakan sudah dipenghujung masa jabatannya. Jabatan Sukiman akan berakhir pada pertengahan tahun depan yaitu pertengahan tahun 2023.

Selain itu, pembangunan di daerah memiliki garis yang jelas dan sudah disepakati bersama dalam bentuk peraturan daerah. Pembangunan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun dan disepakati bersama.

Di awal-awal kepemimpinannya dahulu, setiap melakukan Mutasi apalagi memilih atau mengganti kepala dinas, Bupati selalu melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, yaitu UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk mutasi jabatan dari eselon 3 ke eselon 2 itu ada namanya tes jabatan pimpinan tinggi pratama, dimana orang yang mau jadi eselon 2 itu harus di tes, jadi tes pratama jabatan itu tidak asal di angkat saja. Kemudian untuk eselon 3, jadi eselon 4 ke eselon 3 untuk mutasi jabatan nah itu juga melalui tes, tes itu namanya tes kompetensi.

Namun akhir-akhir ini aturan-aturan tersebut secara berlahan-lahan mulai ditinggalkan. Jika ingin melakukan mutasi ya, langsung saja, sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari sang Bupati. Dan sampai sekarang ini sudah berapakali era kepemimpinan Sukiman ini melakukan kegiatan Mutasi, bisa dikatakan sudah tidak terhitung kalinya.

Walaupun pada dasarnya kewenangan Bupati dalam melakukan mutasi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati) memiliki wewenang untuk menetapkan dan memberhentikan Sekretaris Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota. PPK Daerah Propinsi juga mempunyai kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi. Sedangkan, PPK Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya kewenangan yang begitu besar dari PPK Daerah bagaimanapun telah pula memunculkan permasalahan-permasalahan dalam konteks pembinaan kepegawaian daerah, antara lain terdapat kecenderungan penerapan PP Nomor 9 Tahun 2003 yang kurang proporsional oleh PPK Daerah. Dalam kaitan ini, seringkali terjadi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural yang berlangsung tanpa mengindahkan norma dan prosedur kepegawaian. Situasi seperti ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan diantara pejabat politis (gubernur/bupati/walikota) dengan kalangan birokrasi di bawahnya. Bahkan, persoalan seperti ini sering menimbulkan pertentangan yang pada gilirannya berujung di pengadilan (PTUN).

Di lingkup pemerintahan daerah, kecenderungan penggantian, pemindahan atau penurunan jabatan lebih terasa dan menjadi kekhawatiran “yang luar biasa” bagi pejabat-pejabat karier. Dalam hal ini, momen-momen yang dikhawatirkan adalah Pertama, saat terjadinya perpindahan kekuasaan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Tidak dipungkiri bahwa pergantian pejabat di suatu instansi pemerintah seringkali berdampak pada penggantian atau perpindahan pejabat-pejabat di bawahnya. Kecenderungan seperti ini didasari oleh banyak hal yang lebih terkait pada kepentingan-kepentingan (interests) pejabat yang baru tersebut.

Di penghujung jabatannya, setiap kebijakan yang diambil Bupati akan banyak sekali interpretasi dari masyarakat. Apalagi saat ini Bupati Sukiman dinilai oleh masyarakat fokus melakukan kegiatan untuk memenuhi hasrat politiknya maju ke NTB satu. Sebagai seorang politisi, memang sah-sah saja ingin maju ke jenjang yang lebih tinggi. Namun asal jangan mengabaikan sumpah janjinya saat dilantik menjadi bupati dahulu. Masih banyak pekerjaan rumah yang masih belum selesai di Lombok Timur.

Jika dilihat dari RPJMD Lombok Timur, pembangunan yang dilakukan masih bisa dikatakan sangat jauh dari kata memuaskan. Sebut saja pelayanan dasar seperti kesehatan dalam hal ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih tertinggi se-NTB. IPM Lombok Timur pun masih berada di nomor buncit. Kemiskinan yang target RPJMD menurun satu persen setiap tahunnya pun tahun 2021 ini mengalami peningkatan.

Pantasan saja dalam setiap rapat dengan pimpinan OPD Bupati Sukiman selalu marah-marah “ngomel”. Itupun penulis mengetahuinya dari beberapa media. Melihat hal ini, dalam mengambil keputusan yang penting di ujung masa kepemimpinannya bupati harus lebih jernih dalam berfikir dan bertindak. Agar keputusan yang diambil lebih tepat. Ini pun untuk Bupati meninggalkan kesan yang baik dimasa akhir jabatannya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat. Caranya adalah dengan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat.



## 17

IPM LOMBOK TIMUR MENINGKAT:  
KUALITAS ATAU KUANTITAS ?

## HDI

### HUMAN DEVELOPMENT INDEX



LIFE EXPECTANCY  
AT BIRTH



AVERAGE EDUCATION  
LEVEL



STANDARD OF LIVING  
(GNP PER CAPITA)

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur atas capaian peningkatan IPM tahun 2022. Namun, penulis juga melihat bahwa dibalik meningkatnya IPM Kabupaten Lombok Timur, juga disertai tantangan pembangunan yang tidak gampang di masa depan.

Kabupaten Lombok Timur berhasil meningkatkan capaian pembangunan yang

dilaksanakannya. Hal ini tercermin dari peringkat IPM atau Indeks Pembangunan Manusia pada 2022 yang berada pada posisi ke-7 dari 10 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Peringkat ini naik satu digit dibandingkan tahun lalu yang berada pada posisi ke-8 (BPS, 2023). Naiknya peringkat IPM Kabupaten Lombok Timur ini tentunya memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat Lombok Timur dapat mengakses hasil dari pembangunan yang dilakukan



oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan dimensi kebutuhan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Didalam komponen penghitungan IPM dengan metode baru, akses pendidikan menjadi salah satu indikator penghitungan (dimensi pendidikan), yaitu melalui kontribusi Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Timur pada 2022 mencapai 7,04, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,71. Kemudian untuk harapan lama sekolah, terjadi peningkatan yaitu dari 13,10 pada 2021 menjadi 14,05 pada tahun 2022.

Kemudian pada dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 66,16 pada 2021 menjadi 66,55 pada 2022. Hal ini memberikan gambaran sebagai usia rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat Lombok Timur sejak lahir. Hal ini juga dapat menjadi cerminan kondisi derajat kesehatan masyarakat Lombok Timur. Selanjutnya dalam penghitungan IPM terdapat komponen atau dimensi ekonomi dimana, komponen ini

diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Dalam komponen ini terjadi peningkatan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Lombok Timur dari Rp9.450.000/kapita/tahun pada 2021 menjadi Rp9.631.000/kapita/tahun pada 2022.

### Tantangan Dalam Komponen IPM

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Melalui definisi ini artinya, angka rata-rata lama sekolah pada 2022 yang mencapai 7,04 masih rendah atau belum tamat SMP. Sedangkan dalam program wajib belajar itu 9 tahun. Selanjutnya dalam angka Harapan Lama Sekolah, terjadi peningkatan 0,15 dari yang semula 13,90 pada 2021 menjadi 14,05 pada 2022. Hasil ini juga memberikan informasi mengenai secara rata-rata anak usia 7 tahun di Kabupaten Lombok Timur yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,05 tahun atau setara dengan Diploma III. Selain itu, tantangan terbesar pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi sekolah pada tingkat menengah atas dimana, untuk tahun 2021 angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan ini hanya mencapai 67,88. Kondisi ini berbeda dengan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD yang mencapai 98,14 dan SMP yang mencapai 81,98.

Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH ini juga mencerminkan kondisi derajat kesehatan masyarakat Lombok Timur. Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Kabupaten Lombok Timur pada 2022 yang mencapai 66,55 masih tergolong rendah.

Peningkatan dimensi pendidikan dan kesehatan dalam upaya perbaikan IPM Kabupaten Lombok Timur di masa depan memiliki

tantangan yang seragam, yaitu masih tingginya angka perkawinan usia anak. Menurut data Pengadilan Agama (PA) Selong terjadi peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu 44 perkara pada 2020 menjadi 140 perkara pada 2021. Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur juga menyebutkan bahwa pada 2021 terjadi persalinan usia remaja sebanyak 14.774 kasus.

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap dimensi pendidikan dan kesehatan dalam komponen IPM. Masih tingginya angka prevalensi stunting di Lombok Timur salah satunya disebabkan oleh usia perkawinan usia anak. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur mencapai 37,6 persen.

Kemudian, Masih rendahnya capaian UHH juga disebabkan beberapa hal yang menjadi penyebabnya, antara lain masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Timur, pada 2021 terdapat 183 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk angka kematian bayi pada 2021 mencapai 10 bayi meninggal per 1.000 kelahiran.

Persoalan lainnya yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yaitu mengenai persoalan kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur menyebutkan pada 2021 volume timbulan sampah mencapai 480,24 ton per hari atau mencapai 176.454 ton per tahun. Dari jumlah volume sampah setiap tahun tersebut, baru 55.115 ton sampah per tahun yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah.

Peningkatan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Lombok Timur dari Rp9.450.000/kapita/tahun pada 2021 menjadi Rp9.631.000/kapita/tahun pada 2022 tentu menjadi salah satu faktor yang

mendongkrak capaian IPM Lombok Timur pada tahun ini. Pengeluaran penduduk Lombok Timur masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam sebulan, setiap penduduk Lombok Timur mengeluarkan Rp663.288 untuk membeli makanan pada 2021, sedangkan untuk non-makanan sebesar Rp515.851.

### **Tahun 2023-Tahun Politik**

Euforia dengan naiknya peringkat IPM Kabupaten Lombok Timur pada tahun ini tentunya tidak boleh mengaburkan upaya pembangunan sumber daya manusia di daerah ini. Hal ini penting untuk mendapat perhatian, mengingat tahun depan merupakan tahun politik yang seringkali fokus pembangunan agak melambat.

Berdasarkan kuintil pengeluaran (40% terbawah), terdapat 28,24 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD pada 2021, 22,56 persen hanya menamatkan SD, 25,20 persen tamat SMP, dan 24 persen tamat SMA. Sisanya berada pada kuintil tengah dan kuintil atas.

Kebijakan daerah melalui Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Tingkat Kecamatan dan Desa harus disosialisasikan dan terimplementasi secara serius. Artinya, dibutuhkan suatu kolaborasi semua pihak dalam mengawal kebijakan tersebut.

Untuk itu, kebijakan investasi sumber daya manusia sekiranya sangat penting untuk terus diagendakan, karena sebagai daerah dengan penduduk paling banyak di NTB, persoalan pembangunan manusia harus menjadi skala prioritas dibandingkan beberapa program yang bersifat monumental lainnya. Saat ini menurut data BPS (2022) terdapat 189.640 jiwa penduduk Lombok Timur masuk dalam kategori miskin atau sebanyak 15,14 persen dari 1,3 juta lebih penduduk pada 2022.

Semoga dengan telah disahkannya Anggaran Belanja Daerah pada RAPBD Tahun 2023 yang mencapai Rp. 2,836 triliun dapat dimaksimalkan untuk digunakan dalam berbagai program yang mengarah pada upaya peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Lombok Timur.

## 18

IPM DAN PENGANGGURAN  
DI LOMBOK TIMUR

**P**embangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai suatu kemajuan masyarakat. Guna menuju kemajuan tersebut, diperlukan peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya akan tercipta pemerataan penghasilan pada suatu penduduk. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu proses adanya perubahan kondisi atau keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita meningkat dan dapat mengelola sumber daya alam dengan baik. PDRB Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 - 2021 turun sebesar 3% dari nilai jumlah PDRB sebesar Rp. 20 312 142,09 menjadi Rp. 20 018 948,94 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi sebesar 1% dari nilai Rp. 20 018 948,94 menjadi Rp. 21 054 174,87,.

Tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat/penduduk dapat dilihat dari kemampuan segi indeks pembangunan manusianya berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan ekonominya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, distribusi pendapatan tidak merata, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan semakin meningkat serta masih tingginya tingkat pengangguran (Noviyanti, 2014).

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh suatu daerah. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Menurut BPS (2016), pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Lombok Timur pada tahun 2021 mencapai 17.526 jiwa.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan.

Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

BPS (2016), dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak.

Napitupulu (2007), juga menegaskan bahwa indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kuliatas sumber daya manusia yang siap untuk berkerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Dalam teori klasik Adam Smith, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tinggi dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah tersebut artinya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran. Hal itu terjadi karena saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut naik dengan begitu proses produksinya akan mengalami kenaikan pula. Dan hal itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan output produksi yang diminta. Penyerapan tenaga kerja tersebut akan dapat mengurangi pengangguran di suatu wilayah tersebut.

Hukum Okun (Okun's Law) Marhoji dan Nurkhasanah, (2019:65) berpendapat bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Lalu bagaimana dengan pemerintahan Lombok Timur pada tahun 2023?. Dalam beberapa media sebelumnya, Pemerintah Lombok Timur menyampaikan keberhasilannya mampu menaikkan IPM dari nomor 8 dari 10 daerah kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi nomor 7 pada tahun 2022 ini. Namun, apakah peningkatan IPM tersebut akan diikuti oleh semakin terbukanya lapangan pekerjaan? Atau dengan kata lain akan mampu menekan angka penangguran yang cukup tinggi di Lombok Timur?.

Jika memang Pemerintah daerah Lombok Timur serius, maka kedepannya Pemerintah kabupaten Lombok Timur harus lebih memperhatikan nasib masyarakat yang belum memiliki pekerjaan/pengangguran serta adanya lapangan kerja yang seluas dan adanya kerja sama antar pemerintah dan berbagai instansi/perusahaan agar pengangguran di daerah yang kita cintai ini dapat tertanggulangi. Sesuai dengan Pidato Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah H. Hasni yang menjadi Inspektur pada apel bulanan ASN Timur Lombok, Senin (18/7). Yang mengatakan dengan tegas bahwa fokus prioritas kerja Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah untuk transformasi ekonomi yang inklusif dengan lima fokus prioritas pembangunan.

Peran pemerintah dalam menangani masalah ini adalah, pemerintah harus mampu memperhatikan pembangunan manusia dengan meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja dan meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat kecil. Melalui peningkatan pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup setiap manusia yang akhirnya dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Daerah tercinta ini.

Itu pun jangan hanya menjadi pemanis pada saat pidato saja. Semoga pidato tersebut diikuti oleh Political will yang kuat dalam hal pengangguran khususnya terkait bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Lombok Timur. Semoga dengan sudah disetujuinya RAPBD Lombok Timur tahun 2023 ini sudah tertuang semua terkait dengan program mengurangi tingkat pengangguran. Agar tidak terkesan bahwa tahun 2023 merupakan tahun politik sehingga kebijakan yang pro masyarakat miskin juga terabaikan.

## 19 IPM DAN INDEKS KEBAHAGIAAN LOTIM



**P**erekonomian yang matang menjadi sebuah instrumen tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah daeran dan Bangsa. Kabupaten Lombok Timur ke depannya akan menghadapi persaingan kualitas SDM yang semakin ketat, yaitu dimulai dari tingkat propinsi, Nasional maupun dalam tingkat internasional. Di Internasional seperti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2015, revolusi industri 4.0 sejak abad

21, hingga masyarakat 5.0 yang lahir sebagai pengembangan revolusi industri 4.0. Kualitas SDM Lombok Timur saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tercatat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditebitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Lombok Timur pada tahun 2022 menduduki peringkat 7 dari 10 Kabupaten/

Kota di NTB dengan nilai IPM sebesar 67,59. Peringkat IPM Lombok Timur masih jauh tertinggal dengan beberapa Kabupaten/Kota se NTB.

Selain dilihat dari IPM, kualitas perekonomian juga dapat diukur dari pendapatan penduduk di setiap daerah maupun Negara. Di setiap provinsi Indonesia memiliki nilai pendapatan yang berbeda. Kemudian di setiap Kabupaten/Kota Indonesia juga memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda pula. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pendapatan terbesar berada di provinsi DKI Jakarta, hal ini berbanding lurus dengan jumlah pengeluarannya yang juga terbesar diantara ke-34 provinsi Indonesia.

Jumlah besar atau kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja (Nuhradi & Widyawati, 2019). Rendahnya produktivitas tenaga kerja menyebabkan banyak orang yang menjadi tenaga kerja pada sektor informal. Tenaga kerja sektor informal hanya menyumbang 11,70% dari faktor yang mempengaruhi pendapatan, sedangkan pada tenaga kerja sektor formal telah menyumbang lebih besar yaitu sebesar 35,94% (Pertiwati, 2015).

Di Lombok Timur terdapat sebanyak 628 396 jiwa jumlah angkatan kerja dan 610 870 jiwa jumlah Angkatan Kerja yang bekerja (BPS, 2022). Dari data yang ada juga menunjukkan bahwa pekerja informal masih lebih banyak 34% jika dibandingkan tenaga kerja formal, artinya pendapatan di masyarakat Lombok Timur relatif rendah. Banyaknya pemilihan pekerja di sektor informal disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan (Yuniati, 2019).

Pertumbuhan perekonomian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kebahagiaan (IK) (Sodik et al., 2021). Selain dari IPM kualitas perekonomian juga dapat dilihat dari IK. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks kompositif yang diukur secara terimbang dan mencakup indikator kepuasan meliputi (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) pekerjaan, (4) pendapatan rumah tangga, (5) keharmonisan

keluarga, (6) ketersediaan waktu luang, (7) hubungan sosial, (8) kondisi rumah dan aset, (9) keadaan lingkungan, dan (10) kondisi keamanan.

Jika IK dikaitkan dengan IPM, maka akan berbanding lurus karena nilai kepuasan dalam indikator IK tercermin dalam kemudahan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya yang teruang dalam IPM. Pernyataan ini senada dengan hasil penelitian oleh (Amalia & Nurpita, 2017) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap indeks kebahagiaan. Semakin tinggi nilai IPM, maka nilai IK akan naik pula.

Meskipun berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa IPM berbanding lurus dengan IK, namun berbeda dengan hasil penelitian oleh (Buccioli & Burro, 2021) yang menyatakan bahwa kebahagiaan akan meningkat seiring dengan kondisi ekonomi hanya berlaku untuk individu dalam kondisi ekonomi yang relatif lebih miskin. Hasil ini membawa makna bahwa IPM belum tentu berbanding lurus dengan IK terutama bagi orang – orang yang sudah mapan.

Penelitian lain yang senada yaitu oleh (Lelkes, 2006) yang menyatakan bahwa dampak transisi ekonomi sangat bervariasi antar kelompok yang berbeda, dimana dampak ekonomi akan diterima oleh para pengusaha. Dengan adanya hasil ini membawa makna bahwa kebahagiaan seseorang tidak hanya dinilai dari perekonomian saja. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan terdapat kontradiksi yaitu apakah kebahagiaan dapat dilihat dari perekonomian, dimana dalam hal ini dilihat dari IPM.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Kebahagiaan 2021, NTB berada pada posisi ke-31 dari 34 provinsi. Provinsi NTB juga termasuk dari sepuluh provinsi yang indeks kebahagiaan penduduknya menurun. Pada tahun 2017, poin indeks kebahagiaan penduduk NTB yakni 70,70. Angka ini menurun

pada tahun 2021 menjadi 69,98. Lalu bagaimana dengan indeks kebahagiaan Lombok Timur?. Sementara, pada tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 masih melanda. Pertanyaan yang mengiringi adalah, apakah pandemi mengurangi kebahagiaan seseorang dalam pencapaian hidupnya? Kebahagiaan sebagai suatu ukuran subjektif dapat disandingkan dengan ukuran objektif hasil pembangunan lainnya. Sehingga, kebahagiaan juga perlu diukur perkembangannya.

Menurut BPS, tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia diukur 19 indikator yang tercakup dalam tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia).”Pengukuran tingkat kebahagiaan Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2014 melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali,” tulis BPS. Tingkat kebahagiaan penduduk tahun 2022 diukur berdasarkan hasil SPTK tahun 2022.

Penduduk perkotaan memiliki nilai Indeks Kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Kondisi ini konsisten terjadi pada tahun 2017 dan 2021. Pada tahun 2021, Indeks Kebahagiaan penduduk perkotaan lebih tinggi 0,56 poin dibandingkan perdesaan, sementara pada tahun 2017 capaian Indeks Kebahagiaan penduduk perkotaan lebih tinggi 2,07 poin dibanding perdesaan. Selisih nilai indeks tersebut menunjukkan, selisih (gap) perkotaan dan perdesaan pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2017. Di Kabupaten Lombok Timur, yang bisa dikatakan sebagai perkotaan hanya di Kecamatan selong saja. Itu pun masih ada beberapa desa juga masuk dalam bagian kecamatan Selong. Dari 21 Kecamatan, baru satu saja yang masuk kategori perkotaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa 90% masyarakat Lombok Timur tinggal di daerah perdesaan.

Jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki memiliki nilai Indeks Kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini konsisten terjadi pada tahun 2017 dan 2021.

Pada tahun 2021, Indeks Kebahagiaan penduduk laki-laki lebih tinggi 0,92 poin dibandingkan penduduk perempuan, sementara pada tahun 2017 indeks penduduk laki-laki lebih tinggi 0,82 poin dibanding perempuan. Saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur lebih banyak perempuan dengan jumlah 657,260 jiwa sedangkan laki-laki 586,921 jiwa.

Penggolongan kelompok penduduk berdasarkan literatur William H Frey, yang membagi kategori penduduk berdasarkan beberapa generasi. Penduduk Kabupaten Lombok timur didominasi oleh Generasi Z sebesar 27,31 persen. Generasi milenial 5,98 persen. Disusul, generasi X dengan populasi sebanyak 19,24 persen. Pada kelompok umur 20-39 tahun, grafiknya tampak mengecil terutama pada kelompok penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi keluar pada kelompok ini, baik untuk melanjutkan sekolah maupun untuk bekerja. Sampai dengan saat ini masih banyak penduduk laki-laki usia produktif di Kabupaten Lombok Timur yang berusaha memperoleh penghasilan sebagai tenaga kerja diluar negeri terutama ke Malaysia.

Melihat hal itu, kedepannya pemerintah daerah harus benar-benar membuat terobosan iklim ekonomi yang bagus agar lapangan pekerjaan bagi penduduk dengan usia produktif terbuka selebar-lebarnya. Terobosan kebijakan harus benar-benar jitu. Dikarenakan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin sulit. Political will yang kuat dari seorang pemimpin sangat diperlukan. Agar keseimbangan antara peningkatan IPM dengan Indeks Kebahagiaan dapat berbanding lurus di Gumi Patuh Karya yang kita cintai ini.





# **BAB III**

## **BUMD & PEMBANGUNAN DAERAH**



## 20

## ALTERNATIF STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES DI NTB



**P**enurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB yang masih berada di bawah 1 persen tingkat penurunannya sehingga, kesenjangan ekonomi berdasarkan indeks keparahan kemiskinan NTB semakin turun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan (0.384 pada September 2021 menjadi 0.374 pada September 2022).

Untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara desa dan kota di NTB maka, Pemerintah Provinsi NTB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2018-2023 menjadikan pembangunan BUMDes potensial sebagai salah satu progra unggulannya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kreativitas pengelola BUMDes di NTB menyebabkan usaha simpan

pinjam menjadi unit usaha favorit untuk pengembangan BUMDes di NTB. Banyak alternatif pengembangan usaha BUMDes di NTB yang dapat dilakukan seperti pada bidang pelayanan, perdagangan, dan lain sebagainya.

### Kemiskinan di NTB

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada 2022 mencapai 744,69 ribu orang (13,68 persen). Jika dilihat dalam periode September 2021 - September 2022, jumlah penduduk miskin bertambah 9.390 ribu orang (1,28 persen). BPS Provinsi NTB juga menyatakan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan meningkat dari 0,511 pada 2021 menjadi 0,676 pada 2022. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,471 pada 2021 menjadi 0,655 pada 2022. Dengan meningkatnya indeks keparahan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar.



Berdasarkan peringkat nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, dari 1005 jumlah total desa yang ada di NTB, masih terdapat 55 desa (5%) masuk dalam kategori tertinggal dan 333 (33%) kategori berkembang. Desa-desanya tersebut masih butuh penanganan serius agar menjadi desa maju dan mandiri. Terdapat 478 desa yang sudah masuk dalam kategori berkembang dan 139 masuk dalam kategori mandiri di seluruh Provinsi NTB pada 2022.

Dalam rancangan RPJMD 2018-2023, Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setahun. Sehingga, untuk mempersempit ruang kesenjangan ekonomi antara desa dan kota di Provinsi NTB maka, pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata serta BUMDes potensial menjadi salah satu program unggulan dalam visi Pemprov NTB lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Dr. Zulkifliemansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalillah selaku Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu untuk “Mewujudkan NTB yang Gemilang” (RPJMD Provinsi NTB 2018-2023).

### **BUMDes di NTB**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan asli desa.

Untuk itu, sesuai dengan tujuannya keberadaan BUMDes diharapkan mampu membangun pembangunan ekonomi di desa. Salah satu BUMDes di NTB yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2016 adalah

BUMDes Lentera Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Lombok Timur. BUMDes Lentera mendapatkan penghargaan karena inovasinya dalam pengelolaan sumber daya air yang dimiliki di wilayah tersebut. Melalui Tigasa perusahaan air minum yang dikelola BUMDes Lentera mampu menjual air dengan harga Rp. 200 per meter kubik yang melayani 778 pelanggan di 13 Dusun yang ada di Desa Lendang Nangka. Keuntungan yang diperoleh BUMDes Lentera dalam pengelolaan air minum sebesar Rp4 juta per bulan ([www.berdesa.com](http://www.berdesa.com)).

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa terdapat 424 BUMDes yang ada di NTB namun, hanya 224 BUMDes yang usahanya aktif selebihnya dalam kondisi tidak aktif (BPMPD, 2016). Kondisi BUMDes di NTB masih banyak yang tidak mampu membangun perekonomian di desa lebih disebabkan berbagai kendala. Salah satunya antara lain adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengembangan BUMDes serta tidak adanya ide kreativitas menyebabkan pengembangan BUMDes di NTB hanya fokus pada sektor permodalan yang secara umum telah banyak dilakukan. Sehingga banyak BUMDes di NTB bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro alias lembaga simpan pinjam.

Secara umum lembaga keuangan simpan pinjam memang masih menjadi jenis usaha yang mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa karena sebagai lembaga mampu mendukung para pelaku ekonomi desa. Namun, jenis usaha ini juga memiliki banyak resiko antara lain resiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, suku bunga, nilai tukar valuta asing, dan lingkungan peraturan dan kepatuhan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia dan kreativitas kondisi BUMDes di NTB masih terdapat berbagai kendala didalam usaha pengembangan BUMDes seperti fasilitas saran dan produksi yang

masih terbatas, akses promosi dan pemasaran, dan terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha. Sehingga, keberadaan BUMDes yang ada di NTB masih berjalan sendiri-sendiri dan belum adanya koordinasi antar wilayah untuk pengembangan BUMDes itu sendiri.

### **Alternatif Pengembangan Usaha BUMDes di NTB**

1. Pengembangan BUMDes pelayanan di NTB masih belum banyak dikembangkan. BUMDes menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yaitu bisa melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Desa pada umumnya. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan keuntungan sosial bagi warga desa, walaupun tidak memperoleh keuntungan materil yang besar.

Salah satu pengembangan BUMDes pelayanan yang dapat dilakukan oleh BUMDes di NTB adalah pelayanan dalam hal penarikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Peluang ini sangat terbuka mengingat jumlah kendaraan bermotor tahun 2022 sebanyak 1.837.342 unit dengan komposisi jumlah kendaraan bermotor terdiri dari: 108.539 unit mobil penumpang, 2.379 unit bus, 80.649 unit mobil barang, dan 1.645.775 unit sepeda motor (BPS : NTB Dalam Angka, 2023).

Pola kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah NTB dengan BUMDes akan memberikan keuntungan bagi BUMDes melalui fee atau upah yang diberikan dari setiap pajak yang dibayar masyarakat. Fungsi pelayanan BUMDes kepada masyarakat juga dapat dilakukan melalui usaha BUMDes untuk menalangi warga yang belum memiliki uang untuk membayar pajak kendaraan dimana selanjutnya warga akan membayar ke BUMDes secara berangsur. Selain itu kerjasama ini juga merupakan suatu upaya untuk membangun kesadaran tentang pentingnya membayar pajak.

2. BUMDes dapat menjalankan bisnis perdagangan dengan menjual hasil produksi Masyarakat Desa atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Atau pun bisa juga memasarkan produk tersebut pada pasar dengan skala pasar yang lebih luas.

Sebagai daerah agraris di Indonesia, lapangan usaha sektor pertanian memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi NTB (21,39 persen). BUMDes di NTB dapat memanfaatkan keberadaannya sebagai pengumpul hasil pertanian masyarakat. BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMD yang ada di tingkat Kabupaten/Kota ataupun dengan BUMD milik Provinsi sehingga, kepastian harga di tingkat petani yang selama ini dipermainkan oleh sistem pasar yang tidak berpihak menjadi lebih terjamin. Selain itu pengembangan BUMDes dalam kategori ini dapat dilakukan untuk potensi-potensi desa lainnya seperti pada kerajinan masyarakat, sektor makanan olahan desa, dan lain sebagainya.

3. Kelangkaan pupuk, obat-obatan, dan bibit yang seringkali dialami oleh petani di NTB ketika musim tanam tiba dapat menjadi potensi pengembangan usaha bagi BUMDes di NTB. Artinya BUMDes dapat berperan sebagai distributor input pertanian tersebut sehingga jaminan ketersediaan dan harga yang selama ini menjadi suatu persoalan ketika musim tanam tiba dapat diatasi. BUMDes dapat melakukannya melalui pengembangan beberapa sistem pembayaran. BUMDes dapat menyalurkan terlebih dahulu kebutuhan para petani ketika musim tanam tiba dengan syarat ketika panen maka, BUMDes menjadi prioritas pertama yang menjadi pembeli dari hasil panen masyarakat/petani.

### **Kesimpulan :**

1. Diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi pengelola BUMDes di NTB agar mampu memetakan potensi kewilayahan yang ada sebagai basis pengembangan BUMDes.
2. Paradigma BUMDes yang hanya mengejar keuntungan (profit) agar lebih diperluas seperti penambahan fungsi pelayanan yang apabila dikelola secara profesional juga akan mendatangkan pemasukan bagi usaha BUMDes.
3. Usaha-usaha BUMDes dalam perdagangan dapat diarahkan kepada usaha perdagangan yang mampu menyerap usaha masyarakat di desa, bukan hanya fokus pada perdagangan barang jadi yang selama ini dilakukan oleh sebagian BUMDes yang ada di NTB.



## 21

BANK NTB SYARIAH  
BELUM MERAKYAT DI NTB

**P**ada tahun 2022 ini, Bank NTB Syariah sudah berumur 58 tahun. Di tahun ke 58 ini, bisa kita katakan usia yang cukup matang bagi sebuah organisasi keuangan. Banyak lika liku yang pernah dihadapi sehingga mampu bertahan sampai usia ini.

Di era perkembangan jasa keuangan yang cukup cepat ini, Bank NTB Syariah harus mampu membaca peluang dan

mengatasi segala tantangan yang ada. Secara eksternal, Bank NTB Syariah dihadapkan dengan peraturan terbaru dari Otoritas Jasa keuangan (OJK). Peraturan tersebut terkait dengan redefinisi pengelompokan Bank Umum dari sebelumnya BUKU menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Hal tersebut terdapat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Bahkan dalam beberapa media online beberapa waktu yang lalu, Komisi III DPRD NTB mendorong Bank NTB Syariah bekerja lebih keras lagi dalam memenuhi modal inti menjadi 3 triliun sampai Desember 2024. Jika hal itu tidak dilakukan maka bank NTB Syariah akan turun kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Per September 2021, modal inti bank NTB syariah ini baru Rp 1,37 triliun.

Salah satu tahapan yang harus dilakukan juga yaitu mempercepat perubahan Anggaran dasar dan anggaran rumah Tangga terkait kebijakan keputusan membuka ruang bagi calon investor perorangan dan perusahaan swasta.

Sektor perbankan pada umumnya berperan sebagai institusi perantara keuangan (financial intermediaries) antara pihak pemberi dana atau penabung dengan peminjam atau penerima kredit di perekonomian suatu negara. Dari perspektif proses bisnis dan strategi yang diterapkan, perbankan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu traditional bank dan non-traditional bank.

Tradisional bank menjalankan fungsi penyaluran sumber dana yang sebagian besar berasal dari masyarakat dan dana pihak ketiga yang kemudian disalurkan menjadi portofolio pinjaman bank, baik untuk aktifitas komersial, maupun konsumsi rumah tangga. Sumber utama pendapatan dari traditional bank datang dari biaya transaksi maupun aktivitas simpan pinjam.

Kantor cabang memiliki peran yang vital sebagai sarana untuk menarik nasabah baru dan melayani nasabah lama dari traditional bank. Untuk kategori non-traditional bank, kegiatan yang dijalankan lebih luas, misalnya meliputi; Nontraditional Fee-for-Service seperti penjualan asuransi, layanan pinjaman, pialang sekuritas, penjaminan asuransi, dan aktivitas jual beli aset.

Balik kembali pada model bisnis dan strategi apa yang dijalankan saat ini oleh Bank NTB Syariah kebanggaan Pemerintah Daerah NTB ini. Sampai semester kedua tahun 2022 ini, belum ada strategi khusus dalam menjalankan bisnis dan memperluas jangkauan. Di awal tahun atau bisa dikatakan awal semester pertama 2022, kita sempat diberi angin segar oleh Bank NTB Syariah. Kita sebagai masyarakat NTB disuguhkan oleh strategi bisnis Bank Syariah NTB yang mau menyentuh sektor pertanian dan peternakan. Khususnya pada sektor peternakan dengan menggandeng peternak dengan program KUR sapinya. Namun, sejak adanya wabah PMK yang melanda peternak, hal ini membuat program ini layu sebelum berkembang.

Jika dilihat dari kondisi saat ini, UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di NTB bahkan secara nasional saat ini memiliki akses pembiayaan perbankan yang masih terbatas. Sampai saat ini, sejauh mana Bank NTB Syariah berupaya agar portofolio pembiayaan UMKM mencapai minimal 50% dari total kredit yang disalurkan sehingga secara tidak langsung Bank NTB Syariah mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian NTB.

Sumbangsih UMKM yang begitu besar terhadap perekonomian NTB, seharusnya mampu dilihat sebagai peluang yang bagus oleh Bank NTB Syariah. Jangan sampai pelaku UMKM tidak mengenal banknya sendiri. Bankan menurut data yang ada saat ini UMKM memberikan kontribusi 68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 97% bagi penyerapan tenaga kerja nasional. Dari 64,2 juta jumlah UMKM di Indonesia, lebih dari 70%-nya belum dapat mengakses pinjaman modal yang penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan selanjutnya berekspansi.

Di NTB, berdasarkan data dari Lombok Research Center (LRC) pelaku UMKM yang ada sekitar 643.679. itu tersebar dalam beberapa sektor seperti Pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil, makanan, industri olahan dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini belum 30% mendapatkan akses pinjaman modal.

Lalu kenapa Bank NTB Syariah enggan menyentuh bisnis ini?. Atau apakah Bank NTB Syariah hanya mampu bermain di bisnis yang bisa dikatakan level aman?. Padahal jika menggarap sektor UMKM ini akan dapat membuka akses terhadap modal kerja dan pinjaman bagi UMKM sekaligus membantu memulihkan ekonomi NTB yang akan berdampak kepada pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan.

Secara umum, Bank pembangunan daerah (BPD) dan bank pelat merah. hampir tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Lantaran menysasar berbagai kredit bagi para aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan data dari OJK kredit BPD tumbuh 6,4% year on year (yoy) dari Rp 470,2 triliun menjadi Rp 498,6 triliun per Juli 2021. Padahal secara industri, kredit perbankan baru tumbuh 0,5% yoy menjadi Rp 5.563,7 triliun per Juli 2021. Dan di sektor inilah Bank NTB Syariah bermain.

Dalam menjalankan bisnis perbankan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bank NTB Syariah. Seperti yang dilansir dalam websitenya yaitu empat tantangan besar yang harus dihadapi. Empat tantangan tersebut pertama, produk dan pelayanan, kedua, teknologi untuk membangun sistem dan kekuatan untuk bersaing. Pada prinsipnya, bisnis bank sangat bergantung pada ketersediaan dana dan likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika DPK menurun, tentu bank tidak bisa melakukan ekspansi.

DPK bisa tumbuh dengan baik jika bank memiliki pelayanan yang bagus dan profesional. Hal ini tentu perlu dukungan teknologi yang memadai dan sesuai kebutuhan nasabah. Teknologi merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi. Lalu, tantangan yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Klasifikasi SDM bisa dilihat dari profesionalisme dan kompetensi. Saat itu, SDM Bank NTB sangat jauh dari harapan.

Tantangan yang terakhir adalah masalah budaya atau *corporate culture*. Budaya perusahaan yang bagus akan menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Dengan melihat tantangan yang ada tersebut seharusnya bank NTB syariah mampu mengkreasi budaya yang tangkas atau lincah dalam beradaptasi dan memanfaatkan peluang. Kedua, harus melakukan transformasi digital. Di mana fokusnya bukan pada teknologinya tapi bagaimana sebuah layanan atau sebuah bisnis harus selalu bisa menawarkan nilai atau value bagi pelanggan.

Di tahun 2022 ini, Bank NTB Syariah sedang berbenah, seperti apa? Di beberapa cabangnya seperti Lombok Timur dan kantor pusat sedang melakukan renovasi besar-besaran. Sehingga mengganggu beberapa pelayanan yang ada. Seperti pelayanan di Lombok Timur yang berpusat di Selong. Karena sedang membangun ini, membuat beberapa nasabah pun merasa sangat sulit melakukan transaksi. Atau jangan-jangan pembangunan kantor yang besar-besaran ini merupakan strategi untuk 'Mengakali' kebijakan dari OJK.

Atau Bank NTB Syariah terkena dengan ungunya sendiri dan sudah merasa skeptis karena merasa sudah nyaman. Ibaratnya "Gua gini aja udah dapat captive market".



## 22

## MENUNGGU JURUS JITU BANK NTB SYARIAH UNTUK BERTAHAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturannya menegaskan bahwa akan melakukan perubahan klasifikasi bank dari bank umum kegiatan usaha (BUKU) menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) tidak mewajibkan penyesuaian modal inti menjadi Rp 6 triliun.

Di dalam peraturan tersebut juga menegaskan bahwa modal inti minimum perbankan yang akan berlaku tetap Rp 3 triliun. Modal minimal ini wajib dipenuhi pada tahun 2022 dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) diberi kelonggaran hingga tahun 2024.

OJK telah melakukan redefinisi pengelompokan Bank Umum dari sebelumnya BUKU menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Hal tersebut terdapat dalam Peraturan OJK

(POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Kelompok KBMI 1 memiliki modal inti sampai dengan Rp 6 triliun, KBMI 2 punya modal inti di atas Rp 6 triliun sampai dengan Rp14 triliun; KBMI 3 modal inti dari Rp14 triliun sampai dengan Rp 70 triliun, dan KBMI 4 modal intinya di atas Rp 70 triliun.

Dulunya, pengelompokan bank dilakukan berdasarkan BUKU dengan tujuan mendorong konsolidasi. Bank BUKU I dibatasi dalam membuat produk yang berkaitan dengan digital dengan harapan bank mau menambah modal agar naik BUKU.

Mengacu data Statistik Perbankan OJK sampai dengan November 2020, masih terdapat 8 bank BUKU I. Selanjutnya, ada sebanyak 56 bank BUKU II, 25 bank BUKU III dan 7 bank BUKU IV.

Perubahan ini dimaksudkan dengan tujuan agar dapat membuat klaster bank itu menjadi lebih tepat sehingga modal inti itu tidak terlalu jauh antara bank satu dan bank lain. Selain itu, pengelompokan baru ini juga bertujuan untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien. Adapun angka-angka pengelompokan baru tersebut sudah melalui kajian akademis dan menyesuaikan dengan best practice di negara lain.

Melihat adanya aturan tersebut, ini membuat bank daerah mulai berbenah. Termasuk bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Bank NTB Syariah pun mulai membuat anca-ancang dan strategi jitu. Jika tidak, selain ketinggalan kereta, bisa jadi Bank NTB akan diturunkan kelasnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kebijakan penambahan modal ini juga dilakukan mengingat semakin berkembangnya zaman dan ekosistem perbankan yang harus beradaptasi dengan tren digitalisasi yang tentunya memerlukan permodalan yang lebih besar.

Pihak perbankan harus mempunyai modal inti yang cukup kuat sejalan dengan telah terjadinya perubahan perilaku nasabah di era perbankan digital. Oleh sebab itu, dengan penerapan aturan ini, bank-bank di Indonesia akan lebih kuat dari sisi permodalannya.

### **Bagaimana dengan Bank NTB Syariah?**

Bank NTB Syariah harus mampu membuat terobosan bisnis perbankan dengan mengikuti perkembangan zaman. Tentunya juga dengan tidak melanggar aturan yang ada. Salah satu caranya harus melakukan berbagai upaya untuk menambah modal di antaranya melalui penghimpunan dana melalui pasar modal (initial public offering), atau melakukan konsolidasi dengan cara merger dan akuisisi.

Dikarenakan Bank NTB Syariah merupakan bank daerah, maka konsolidasi dengan pemegang saham terutama dengan para Bupati dan walikota se-NTB juga harus giat dilakukan. Di beberapa media online salah satu direktur Bank NTB Syariah menyebutkan telah melakukan konsolidasi dengan para pemimpin daerah yang nota bene menjadi pemegang saham.

Ada beberapa kesepakatan yang telah dilakukan yaitu dengan cara membiarkan bagi hasil yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota menjadi tambahan modal. Ada juga dengan beberapa daerah menyerahkan asset berupa tanah kepada Bank NTB Syariah untuk dikelola dan dijadikan modal tambahan.

Namun melihat hal itu, terobosan ini belum lah cukup. Sampai saat ini Bank NTB Syariah memiliki total kekayaan sekitar 1,3 triliun. Artinya masih kekurangan modal sampai 60%. Untuk itu, diperlukan jurus-jurus jitu dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah agar 2024 nanti modal intinya sudah mencapai 3 triliun.

Disinilah diperlukan kreatifitas dan model terobosan yang jitu dari para petinggi Bank NTB Syariah. Secara internal Bank NTB Syariah harus mampu melakukan pembenahan seperti latar belakang karyawan yang tidak sesuai, sarana yang kurang memadai, dan software yang kurang mempuni atau maksimal.

Berbicara potensi kedepan, Bank NTB Syariah pun harus mampu melihat potensi seperti semakin maraknya perusahaan rintisan (start-up) sebagai peluang emas membuat peran industri keuangan menjadi krusial. Financial technology atau yang biasa disebut fintech sebagai disruptive innovation memang menciptakan pasar baru dengan inovasi, namun bisa merusak pasar konvensional.

Namun, sebuah riset oleh Accenture mengungkapkan pasar fintech naik tiga kali lipat dari US\$928 juta US\$2,97 miliar dalam kurun waktu

2008 hingga 2013 dan terus meningkat pada 2018 yang diprediksi berkisar pada US\$6-8 miliar.

Data lainnya dari World Bank menyebutkan, pada 2014 penetrasi keuangan di Indonesia baru mencapai 35,8% dan fintech dinilai dapat mengambil peran dalam mengambil peranan penetrasi layanan keuangan yang senada dengan penetrasi broadband yang digalakkan pemerintah.

Apapun yang menjadi fokus layanan fintech seperti penyedia layanan keuangan, alat pembayaran tagihan, hingga fokus pada bisnis mikro tetap yang menjadi benang merahnya adalah solusi teknologi inovatif dalam sistem keuangan.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis e-commerce, dunia perbankan pun dituntut untuk bisa mengikuti tren transaksi digital termasuk dalam hal cashless payment, branchless banking, serta layanan perbankan keuangan berbasis internet lainnya.

Data Bank Indonesia (2016) tercatat, total transaksi e-money tahun 2015 melonjak tajam ke angka Rp 5,2 triliun dari Rp 4,3 triliun pada tahun 2014. Oleh karena itu, industri perbankan menjadi salah satu sektor bisnis yang dituntut untuk melakukan transformasi digital. Apabila tidak memanfaatkan teknologi secara maksimal, maka bank akan berisiko kehilangan 30% dari total nasabah (Accenture, 2015).

Untuk itu, sebagai masyarakat NTB, penulis akan menunggu seperti apa terobosan dan jurus jitu dari Petinggi Bank NTB Syariah dalam bertahan untuk menjadi Bank yang maju dan menjadi andalan masyarakat NTB. Jangan hanya menunggu dan meminta disusui terus oleh pemerintah daerah. Strategi jitu harus mampu dipraktikkan agar 3 tahun kedepan 2024, kita tidak mendengar ada Bank Kebanggaan kita akan turun kelas menjadi BPR.

## 23

STRATEGI UMKM DI NTB BERTAHAN  
DI MASA PANDEMI

**W**abah virus corona Covid-19 membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia terpukul. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat, bahkan mungkin tak mampu bertahan.

Begitu juga yang terjadi dengan para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB). Apalagi

NTB masih menggantungkan pertumbuhan ekonominya dari sector pariwisata. Beberapa sector yang sangat terpukul akibat Covid-19 ini, di mana di dalamnya ada UMKM, adalah pertama, sector pariwisata (tourism and travel), sector penerbangan, sector perdagangan eceran, cuma minus pedagang yang menjual consumer goods. Kedua, sector migas, otomotif, logistik, dan lainnya.

Secara nasional, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp150 triliun akan difokuskan untuk membantu sektor ini. Aturan ini teruang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter Cyclical. Restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dilakukan antara lain dengan memberikan penundaan keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit/pembiayaan leasing dengan jangka waktu 1 tahun.

Dan kebijakan stimulus itu antara lain penilaian kualitas kredit/pembiayaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga untuk kredit hingga Rp10 miliar. Pihak bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk UMKM.

### **Lantas, Bagaimana Jurus UMKM Menghadapi Kondisi Yang Menantang Akibat Covid-19?.**

Hingga triwulan ketiga tahun 2020, kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat terus membaik. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi NTB yang tumbuh positif 3,01% (qta) pada triwulan III-2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Bahkan menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, secara year on year sepanjang 2020 perekonomian NTB diperkirakan akan tumbuh positif di kisaran 0,2% sampai dengan 0,6% (Bank Indonesia Perwakilan NTB). Kondisi ini memberikan optimisme bahwa perekonomian NTB dapat terus bergerak positif walaupun dalam masa pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021 ini, ekonomi NTB juga diperkirakan tumbuh sebesar 3,8% (yoy) s.d. 4,2% (yoy). Indikator terjaganya perekonomian NTB juga bisa dilihat dari inflasi NTB pada bulan Oktober 2020 masih di koridor yang baik yaitu 0,51 % (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,50% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2020, inflasi

diprakirakan akan tumbuh di kisaran 0,4% s.d. 0,8%. Sedangkan pada tahun 2021, inflasi diprakirakan akan berada di kisaran 3+1 %.

Ada beberapa strategi yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM untuk dapat bertahan, bahkan mampu memberikan pertumbuhan yang positif di masa pandemi ini yaitu :

### **Digital Marketing**

Kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring social harus dilakukan saat ini, terutama dimasa Vandemi ini. Seperti memasarkan produk melalui instagram, facebook, twitter dan masih banyak lagi. Selain itu pemasaran digital juga bisa dilakukan pada e-commerce dan banyak media lainnya.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadikan digital marketing harus dapat dipahami dan dipelajari oleh UMKM. Penelitian (Hendrawan et al., 2019) menyatakan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan kinerja penjualan UMKM. 70% Pengusaha kreatif mengatakan digital marketing akan menjadi platform komunikasi utama dalam pemasaran, dan offline store akan menjadi pelengkap, dikarenakan kemudahan dan kemampuan digital marketing dalam menjangkau lebih banyak konsumen.

Ada beberapa bentuk pemasaran digital yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM untuk dapat melakukan pemasaran produk adalah sebagai berikut: (1) Publikasi video dan foto produk di akun sosial media secara intensif. Penggunaan sosial media juga disesuaikan dengan segmen produk yang kita miliki. (2) Memanfaatkan facebook ads, instagram ads, twitter ads, google disply network dll yang dapat dengan mudah diakses melalui sosial media dan dapat menjangkau konsumen dengan kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. (3) Membuat video produk pemasaran yang ditayangkan melalui sosial media atau melakukan live promosi produk. Strategi ini jika

dilakukan dengan benar akan berpengaruh positif terhadap bisnis. (4) Melibatkan konsumen didalam pemilihan produk, melakukan edukasi dan pengenalan terhadap kualitas produk secara intensif di akun media sosial dan menggunakan kata-kata kreatif dan menggunakan hastag (#) agar lebih mudah ditemukan konsumen.

### **Melakukan Perbaikan Kualitas Produk Dan Kualitas Serta Jenis Layanan.**

Ditengah Pandemi covid-19 ini, konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan barang dan jasa dan terjadi penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yg dijual oleh pelaku usaha. Selain itu keterbatasan konsumen dalam melakukan pembelian langsung juga berdampak pada berkurangnya secara signifikan jumlah pembelian konsumen.

Untuk itu pelaku UMKM harus melakukan perbaikan kualitas produk untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan secara intensif mengkomunikasikan terhadap kualitas produk. Penelitian (Lestari & R, 2019) dan (Tripayana & Pramono, 2020) menyatakan bahwa peningkatan kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk kepuasan konsumen dan menciptakan loyalitas konsumen bagi pelaku UMKM. Untuk itu pelaku usaha dalam masa pandemik covid-19 ini perlu untuk memperhatikan dimensi kualitas produk dan memperbaiki produk mereka untuk dapat semakin menambah kepercayaan konsumen.

Untuk itu penting untuk UMKM melakukan perbaikan kualitas produk secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Bentuk peningkatan kualitas produk yang bisa dilakukan adalah melakukan kontrol mutu produk lebih detail dan menjamin kebersihan dan keamanan produk. Selain itu pelaku UMKM dapat menyesuaikan ketahanan produk dan kemasan karena penjualan sekarang lebih sering menggunakan penjualan secara online

sehingga daya tahan dan keamanan produk harus lebih ditingkatkan. Selain peningkatkan kualitas produk, pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah jenis pelayanan seperti pesan antar dan pelayanan pembelian melalui online dan dengan menggunakan hotline layanan khusus terkait penjualan yang dapat dengan mudah diakses konsumen.

Untuk jasa, pelayanan bisa di kembangkan dengan melalui media online dan menggunakan aktifikatas layanan menggunakan daring sehingga bisa lebih efektif dan bisnis bisa berjalan seperti biasa. Pelayanan yang baik akan dapat membentuk kepercayaan konsumen sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan membentuk loyalitas konsumen. Pada masa pandemik ini, kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan usaha

Melakukan pemasaran hubungan pelanggan (customer relationship marketing) untuk menciptakan kepercayaan konsumen dan menumbuhkan loyalitas pelanggan.

Dimasa Pandemi ini, pelaku UKM sebaiknya tidak hanya berfokus pada menjaring pelangan baru tapi harus mempertahankan produk dan menjaga pelanggan yang sudah ada, menciptakan kepuasan pelanggan hingga akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak akan berpindah ke yang lain karena sudah memiliki kepercayaan terhadap produk kita.

Salah satu cara pelaku UMKM untuk dapat bertahan di tengah menurunnya geliat bisnis adalah dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan (customer relationship marketing). Customer relationship marketing adalah sebuah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, yaitu mempertahankan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi ulangan dan menciptakan loyalitas pelanggan.

Selain itu pelaku usaha yang berani mengambil resiko, sudah memiliki pengalaman dalam bisnis dan fleksibel terhadap bisnis, dapat meningkatkan jejaring dan menumbuhkan kepercayaan dari konsumen, sehingga konsumen akan bertahan.

Pelaku usaha dapat menunjukkan kepedulian yang juga bertujuan dalam memasarkan produk. Contoh cara membangun pemasaran hubungan pelanggan dengan cara meningkatkan empati atas wabah ini seperti memberikan promo atau skema free produk untuk kurir yang melakukan delivery service, menyisihkan sebagian pendapatan dari penjualan produk untuk orang-orang yang membutuhkan.

Cara seperti ini juga dapat membangun kepercayaan konsumen dan adanya *customer bonding*. Jadi saat pandemik ini kita pelaku UMKM tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun membangun hubungan pemasaran konsumen dengan menunjukkan kepedulian dan hal positif yang dilakukan pelaku usaha. Selain itu pelaku UMKM juga dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan di berbagai media promosi dan e-commerce yang dimiliki secara intensif, seperti menjawab keluhan penjualan atau menjawab respon baik dari konsumen, hal ini juga menciptakan customer engagement yang positif.

Semoga dengan semakin membaiknya dunia pariwisata di NTB kedepannya akan memberikan pengaruh yang positif juga kepada dunia usaha. Dan semoga dengan akan berlangsungnya pergelaran event skala internasional yaitu pergelaran motor GP nanti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan menjadikan dunia pariwisata di NTB dan Indonesia semakin cerah.

## 24 INDUSTRIALISASI, SIAPKAH NTB?



Saat ini Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mendorong pembangunannya dengan memaksimalkan kebijakan pembangunan kearah industrialisasi. Dalam opini Lombok Pos pada tanggal 10 april 2019. Wakil Gubernur menulis tentang bagaimana industrialisasi akan mampu mensejahterakan masyarakat NTB. Teknologi dihadirkan untuk bisa digunakan oleh para pelaku industry kecil menengah (IKM).

Tidak hanya itu. Dalam rapat bersama OPD di kantor BAPPEDA NTB Selasa 16 april yang lalu, Gubernur NTB mengatakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan harus ada strategi dan terobosan yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan daya saing industry. Industrialisasi akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mengikis kemiskinan. Sehingga kedepannya harus

mampu diterjemahkan oleh OPD-OPD yang ada dalam bentuk kebijakan dan program-program yang konkrit.

Untuk mengeksekusi program industrialisasi ini, pemerintah provinsi kini telah membangun **Science Techno and Industrial Park (STIP)** di dua tempat yaitu di Sumbawa dan di Lombok. Harapannya kedepan, melalui STIP inilah nantinya akan mampu memproduksi berbagai jenis teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat pelaku IKM.

Dan tahun 2019 ini STIP telah membentuk dan melaksanakan program wirausaha muda dalam bentuk pelatihan. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah seperti apa konsep industrialisasi yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur? Dan bagaimana konsep tersebut mampu diterjemahkan dalam bentuk program konkrit oleh STIP dan OPD yang lainnya?

Karena, jika hanya STIP didorong untuk menghasilkan teknologi dalam bentuk alat pengolahan hasil produk unggulan NTB misalnya. Kenapa tidak Pemerintah daerah mendorong industry rumah tangga yang sejak turun temurun sudah ada di NTB. Di Mataram misalnya sudah ada sentra industry Getap. Di Lombok Timur sudah ada kampung Marang di Desa Kotaraja. Dan masih banyak lainnya.

Kenapa tidak kelompok-kelompok industry masyarakat ini saja yang didorong lagi dalam bentuk skill dan modal. Kenapa harus membuat UPT baru yang konsekwensinya membutuhkan SDM dan Keuangan yang baru.

Di lain sisi, STIP melaksanakan program kewirausahaan bagi anak-anak muda. Ini membutuhkan modul, SDM dan banyak lainnya. Padahal kita memiliki balai latihan kerja di setiap kabupaten dan kota. Bahkan kita memiliki balai latihan kerja bertaraf internasional di Lombok

Timur. Selain balai latihan kerja, di NTB banyak Perguruan Tinggi yang memang diorong menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dengan memiliki fasilitas SDM, modul dan lainnya yang sudah terstandarisasi.

Difikiran saya, sebagai seorang praktisi dan peneliti. Ketika pemerintah daerah membangun STIP, kedepannya akan mampu membuat suatu terobosan dalam bentuk program kerja yang mampu mendongkrak lapangan kerja baru untuk mengikis kemiskinan. Namun, sesuai dengan potensi yang kita miliki, sehingga apa yang diharapkan oleh Gubernur bisa terjawab.

Wakil Gubernur juga menuliskan, bahwa konsep industrialisasi di NTB tidak menutup diri dari industri-industri besar atau investor yang mau serius berbisnis di NTB. Dikarenakan hitungan matematis Dinas Perindustrian bahwa jika saja 50 persen produk pertanian bisa diolah melalui industry pengolahan akan mampu memberikan nilai tambah pada PDRB sebesar 3,3 persen.

Memang benar, NTB memiliki beberapa produk unggulan daerah seperti jagung, kopi, coklat, sapi, bawang merah, cabe, padi dan lainnya. Bahkan 10 tahun pemerintahan sebelumnya membuat program unggulan yang sering kita kenal dengan PIJAR (Sapi, jagung dan rumput laut).

NTB memiliki banyak produk unggulan dengan kualitas yang cukup bagus. Namun sayang sekali, dikarenakan luas lahan kita tidak besar dan beberapa hasil komoditi kita tergantung pada musim, hal inilah yang menjadi factor penghambat industry besar untuk berinvestasi di NTB. Kita memiliki produk jagung yang cukup besar, bahkan dengan bangga pemerintah daerah ikut gunting pita dalam pelepasan kapal yang memuat jagung ke luar negeri pada awal 2018 yang lalu.

Berbicara komoditi jagung, NTB tidak akan kesulitan untuk membuat industri pengolahan jagung. Kenapa? Satu; jagung memang menjadi unggulan NTB. Bahkan produksinya sangat melimpah. Akan tetapi produksi jagung di NTB hanya pada bulan tertentu saja. Lombok Timur dan Pulau Sumbawa menjadi sentra jagung NTB, namun panen jagung hanya dapat dilakukan 3 bulan selama satu tahun yaitu Maret, April dan Mei saja. Untuk 9 bulan berikutnya produksi jagung di NTB tidak ada.

Kenapa penulis mengulas tentang industri ini, karena hal yang sama pernah terjadi. Tepatnya pada tahun 2009 yang lalu para peneliti di Universitas Mataram, para praktisi mendorong terbentuknya program industrialisasi kacang. Kegiatan ini didukung oleh Bank Dunia dalam bentuk program IFC SADI. Pada tahun itu juga terbentuklah Komisi Kacang Tanah di Provinsi NTB dan beberapa kabupaten penghasil kacang. Pada tahun itu juga berdirilah pabrik kacang tanah yang berlokasi di Mataram. Akan tetapi pabrik tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama gulung tikar dan pabriknya dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Dengan satu alasan bahwa bahan baku kacang tanah hanya mampu terpenuhi 3 bulan saja dalam satu tahun.

Kedua; rantai nilai komoditi jagung masih belum berpihak kepada petani secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), rantai nilai komoditi jagung masih memberikan keuntungan kepada tengkulak dan pebisnis besar saja, namun belum mampu memberikan dampak secara langsung kepada petani.

Ketiga; hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup NTB, bahwa dengan adanya program jagung secara besar-besaran mengakibatkan rusaknya hutan lindung sekitar 700 an ribu hektar pada tahun 2015-2018.

Di sisi lain, survey terbaru yang dilakukan oleh LRC pada akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa, peralatan yang diberikan dalam pertanian, baik peralatan budidaya, pengolahan hasil menunjukkan sekitar 65% peralatan tersebut tidak digunakan oleh petani.

Sangat bagus memang, apa yang diinginkan oleh Gubernur dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Dan bagaimana hasil komoditi NTB memiliki nilai tambah. Namun jangan sampai hal itu hanya diterjemahkan dalam bentuk program pengemasan hasil, program pelatihan pengolahan dan pembagian alat-alat saja. Jangan sampai kita latah, seperti saat ini semua berlomba-lomba membentuk Desa wisata. Pun dalam bidang industrialisasi yang ada kita berlomba-lomba membuat produk kemasan disetiap desa dan berlomba-lomba membagikan alat-alat yang pada dasarnya tidak dibutuhkan oleh para petani dan pelaku IKM kita.

Yang ada di pikiran penulis ketika Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menuangkan konsep industrialisasi disemua rapat-rapat, di tulisan koran adalah kita melalui Badan Usaha Milik daerah (BUMD) didorong untuk melakukan kegiatan ekspor dengan menjamin pasar bagi produk masyarakat NTB. Tidak hanya itu, masyarakat secara langsung didorong untuk jangan menjual hasil komoditi secara langsung, namun dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. BUMD yang menjamin pasarnya.

Hal ini harus dilakukan bersama. Tidak akan bisa jika jalan sendiri-sendiri. Dibidang teknologi yang lebih besar. Pemerintah memiliki banyak potensi seperti pelabuhan. Kenapa tidak anak-anak NTB yang memiliki kemampuan diajak duduk bersama untuk mendorong industry perkapalan dan perbaikan kapal. Sehingga kita NTB sebagai kiblat perkapalan untuk Indonesia bagian Timur. Yang saat ini peran itu masih dilakukan oleh Surabaya.



## 25

DAMPAK KEBERADAAN RITEL MODERN  
DI LOMBOK TIMUR

Dalam beberapa minggu terakhir terjadi polemik di tengah masyarakat Lombok Timur terkait dengan kabar pemberian persetujuan lokasi di 30 titik wilayah yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Sumber Alfamart Trijaya. Ada beberapa pihak yang menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemberian izin ini karena dikhawatirkan akan mematikan

usaha masyarakat terutama ritel-ritel tradisional seperti kios dan toko kelontong. Namun, terdapat pihak lainnya yang melihat bahwa keberadaan ritel modern yang beroperasi di Lombok Timur membuktikan perekonomian daerah yang sedang tumbuh dan membuktikan bahwa iklim investasi di Lombok Timur yang semakin kondusif.

Ritel (retail) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung

ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Begitulah terjemahan bebas dari kata ritel versi Wikipedia. Namun dinamika yang berkaitan dengan ritel tidak sesederhana definisi dari ritel itu sendiri. Mulai dari perkembangan ritel modern di Lombok Timur yang cukup cepat, kelangsungan hidup ritel tradisional seperti toko kelontong dan kios milik masyarakat yang mulai dipertanyakan, serta regulasi dan implementasi dari peraturan daerah Lombok Timur.

Pertanyaannya adalah sejauh mana syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dipenuhi oleh pelaku usaha ritel modern serta apakah pola kemitraan dengan pelaku UMKM di sekitar lokasi telah terakomodir, kemudian apakah perkembangan ritel modern mengganggu kelangsungan usaha toko/kios kelontong masyarakat? Apakah regulasi yang mengatur tentang ritel sudah tepat? Apakah implementasi dari peraturan ritel sudah sesuai dengan peraturan ritel?

### **Dampak Perkembangan Ritel Modern Terhadap Perekonomian Lombok Timur**

Investasi di daerah diyakini memiliki kontribusi didalam suatu pembangunan ekonomi daerah. Investasi juga berperan dalam komponen pendapatan daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat dilihat seberapa besar nilai investasi yang dihasilkan. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan hingga tahun 2022 realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,6 trilyun rupiah lebih yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 303,230 milyar rupiah dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 1,3 trilyun rupiah.



Kegiatan investasi di daerah ini tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dimana, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur tahun 2022 mencapai 3,18 persen, meningkat dari tahun 2021 yang mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,12 persen. Untuk itu, semakin mudah kegiatan investasi maka, semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Perkembangan ritel modern di Lombok Timur saat ini mencerminkan kemudahan investasi yang terjadi. Saat ini keberadaan ritel modern bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Ritel modern tidak hanya ditemukan di jalan-jalan arteri atau sudut jalan utama di Lombok Timur namun, usaha ini telah merambah hingga ke wilayah pedesaan. Sebagian besar ritel modern ada yang dimiliki oleh pengusaha lokal dan sebagian lagi merupakan frenchise waralaba, bahkan ritel-ritel tradisional yang merupakan binaan dari perusahaan besar nasional.

Ritel sendiri sebenarnya mata rantai dalam proses distribusi barang dan menjadi mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk

dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.

Kehadiran ritel modern khususnya minimarket franchise di Lombok Timur boleh dikatakan belum terlalu lama. Hal ini karena keran investasi yang dibuka untuk jenis usaha ritel ini baru ada sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh kebijakan Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 saat itu yang melarang adanya jaringan ritel ini beroperasi karena dikhawatirkan mematikan usaha pedagang kecil. Seiring dengan pergantian pimpinan daerah maka, kebijakan yang diterapkan juga ikut berubah sehingga, mulai muncul keberadaan ritel modern yang terus melakukan ekspansi usahanya hingga saat ini.

Hingga Desember 2018 telah muncul 45 gerai minimarket franchise yang tersebar di 21 Kecamatan di Lombok Timur. Jumlah ini mengalami peningkatan di tahun 2019 dimana, jumlah ritel modern yang telah mengantongi izin sebanyak 52 gerai yang terdiri dari 24 Alfamart dan 28 Indomaret. Apabila melihat dari sisi perekonomian daerah, kontribusi ritel secara umum pada pembentukan struktur ekonomi Lombok Timur cukup besar. Dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi sektor ini terus meningkat seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.



Selain itu, keberadaan ritel modern memberikan gambaran tentang iklim investasi yang terbuka lebar dan berpengaruh positif terhadap pengurangan angka pengangguran. Menurut data BPS pada tahun 2022 dari total 623.694 penduduk Lombok Timur usia 15 tahun ke atas yang bekerja terdapat 23,95 persen atau 149.367 ribu tenaga kerja yang bekerja dan terserap pada sektor ini. Angka ini menempati posisi kedua setelah sektor pertanian yang menampung 265.118 ribu tenaga kerja usia di atas 15 tahun.

**Penduduk Lombok Timur Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022**

Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase			Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,97%	37,08%	42,53%	160.976	104.873	265.849
Industri Pengolahan	8,42%	13,89%	10,57%	32.250	33.404	65.654
Konstruksi	9,79%	0%	5,38%	33.301	0	33.301
<b>Perdagangan, Sesar &amp; Loran, Reparasi &amp; Perawatan Mobil &amp; Sepeda Motor</b>	<b>15,10%</b>	<b>34,74%</b>	<b>24,97%</b>	<b>91.751</b>	<b>97.599</b>	<b>189.350</b>
Profesi Kesehatan dan Makin-Misim	7,07%	3,63%	2,77%	2.094	35.898	37.992
Manajemen dan Komunikasi	0,88%	0,47%	0,67%	1.300	1.300	2.600
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24%	1,00%	1,13%	4.215	2.809	7.024
Jasa Persewaan	1,25%	0,24%	0,74%	3.943	674	4.617
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,67%	1,91%	2,00%	8.052	3.680	11.732
Jasa Pendidikan	4,08%	3,73%	4,82%	13.983	10.094	24.077
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13%	1,10%	1,13%	3.404	3.709	7.113
Jasa Lainnya	3,64%	2,33%	3,14%	12.475	7.158	19.633
Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Transportasi dan Pergudangan & Real Estate	2,43%	0,23%	1,42%	8.260	608	8.868

Sumber: BPS, Statistik Angkatan Kerja 2022, 2023

Kemunculan ritel modern juga dipengaruhi oleh adanya pergeseran pola belanja konsumen. Dewasa ini, makin banyak konsumen yang tergiur untuk mencoba bahkan beralih berbelanja ke ritel modern. Alasannya, ritel modern menawarkan kenyamanan berbelanja yang tidak didapatkan konsumen di ritel tradisional, misalnya kebersihan dan beragam promosi yang ditawarkan.

Namun, didalam ekonomi sangat mustahil untuk menemukan keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang positif dan ditandai dengan geliat perdagangan yang terus meningkat pada akhirnya akan menimbulkan persaingan di tengah-tengah kondisi keberadaan konsumen yang tetap. Secara faktual, ritel tidak hanya membawa peluang tetapi juga ancaman. Menjamurnya pasar modern yang bergerak di bidang ritel, seperti supermarket dan

mini market modern yang telah merambah ke perkampungan dan desa, dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi keberadaan ritel tradisional tradisional.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bukannya tinggal diam saja melihat fenomena ini. Bahkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan telah memberikan panduan yang harus ditaati oleh pengusaha ritel modern dalam melakukan bisnisnya di daerah ini seperti pola kemitraan dengan pelaku UMKM, jarak serta zonasi, dan lain sebagainya.

### **Dampak Ritel Modern Terhadap Usaha Kecil di Lombok Timur**

Keberadaan ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur melalui pasar-pasar tradisional, warung-warung rakyat, kuliner rakyat, usaha kerajinan atau UMKM di pinggir-pinggir desa atau kampung dan usaha lain yang menyertakan rakyat sebagai stakeholder, seperti ini akan semakin mendapatkan pesaing berat dari gerai-gerai atau toko atau ritel modern seperti Indomart dan Alfamart.

Keberadaan ritel modern yang saat ini tidak hanya ditemukan di sudut-sudut jalan utama melainkan telah banyak merambah hingga ke sudut-sudut desa telah menyebabkan perubahan yaitu pada perilaku belanja masyarakat. Perilaku ini disebabkan karena mindset masyarakat sekarang telah terpola bahwa berbelanja di ritel modern merupakan suatu gengsi tersendiri. Apalagi keberadaan ritel modern yang dikelola secara profesional telah “memanjakan” masyarakat sebagai konsumen melalui berbagai fasilitas kemudahan yang tersedia seperti, ruangan yang sejuk ber “AC” dan wangi, dilengkapi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemudahan, kenyamanan, tersedianya berbagai fasilitas, dan perbedaan harga menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih berbelanja di pasar modern. Sehingga, tanpa disadari

masyarakat mereka lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di gerai ritel modern yang ada dibandingkan berbelanja di ritel-ritel tradisional yang lebih dulu eksis di dekatar lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bukannya tidak melihat fenomena ini karena, upaya-upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang kecil telah dilakukan yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Di dalam Perda tersebut ada upaya perlindungan, pemberdayaan, serta pola kemitraan yang harus dilaksanakan oleh ritel modern yang beroperasi di seluruh wilayah Lombok Timur. Yang didalamnya terdapat berbagai Satuan Perangkat Kerja Dinas (SKPD) memiliki kewenangan dan tugas untuk melaksanakan Perda 3/2019 ini. Sesuai dengan amanat dari UU. No.23 Tahun 2014, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai Perundang-undangan yang dihasilkan.

Kebijakan Pemkab Lotim dalam iklim usaha dengan memberikan izin kepada berbagai ritel modern untuk beroperasi di Lotim juga harus dibarengi dengan upaya perlindungan. Untuk itu, melalui Peraturan Dearah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keberlangsungan usaha masyarakat dan sebagai upaya pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil agar mampu bersaing, maju, dan mandiri.

Adapun beberapa upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi pedagang kecil tercantum dalam Pasal 32 yang berbunyi :

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan

Pasar Rakyat, toko eceran tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di suatu wilayah;

- Memperhatikan jumlah dan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1 );
  - Menyediakan areal parkir dengan luas paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dari luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
  - Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
2. Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi.
  3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain.

Di dalam Pasal 32 Perda Lotim No.3/2019 poin a dan b jelas bahwa pendirian ritel modern harus memperhatikan kewajiban terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan jarak lokasi.

Namun, implementasi di lapangan ternyata sebagian besar ritel modern tidak memperhatikan hal tersebut. Masih ditemukannya antara satu ritel modern dengan kompetitornya tidak memiliki jarak pada lokasi pendiriannya atau bahkan hanya dibatasi oleh jarak jalan raya saja. Belum lagi agresivitas ritel modern dalam mengembangkan

usahanya telah merambah hingga ke wilayah pedesaan bahkan berada di dekat pasar tradisional.

Kalau merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 5 menyebutkan Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Kemudian terkait dengan pemberdayaan pemerintah kabupaten lombok timur melalui Pasal 37 Perda Lotim No.3/19 telah memberikan gambaran terkait dengan aspek kemitraan yang dapat diukur dari manfaat kemitraan bagi semua sektor yang meliputi: (a) Menyediakan mekanisme kemitraan; (b) Menggalang lebih banyak sumberdaya; (c) Memastikan tumbuhnya kesadaran yang lebih dalam; (d) Menciptakan jejaring kontak yang dinamis; dan (e) Mengubah konflik menjadi kerjasama.



Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut data BPS dalam 5 tahun terakhir (periode 2018-2022) jumlah penduduk miskin di Lombok Timur terus mengalami penurunan. Tahun 2022 jumlah penduduk miskin adalah sebesar 15,14 persen atau 190.640 ribu jiwa lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 16,55 persen atau 196.870 ribu jiwa (BPS, 2023).

Kondisi ini tentunya menjadi pertimbangan dan mempengaruhi keputusan dari jaringan industri ritel modern sehingga, ekspansi bisnis yang dilakukan telah menjangkau hingga ke pelosok desa, memberdayakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pedagang, serta Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan mandiri, meminimalisir timbulnya persaingan yang saling mematikan antara Pelaku Usaha, terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat, usaha kecil, dan mikro, menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.

## 26

PEMBANGUNAN & INVESTASI  
DI LOMBOK TIMUR, PENTINGKAH?

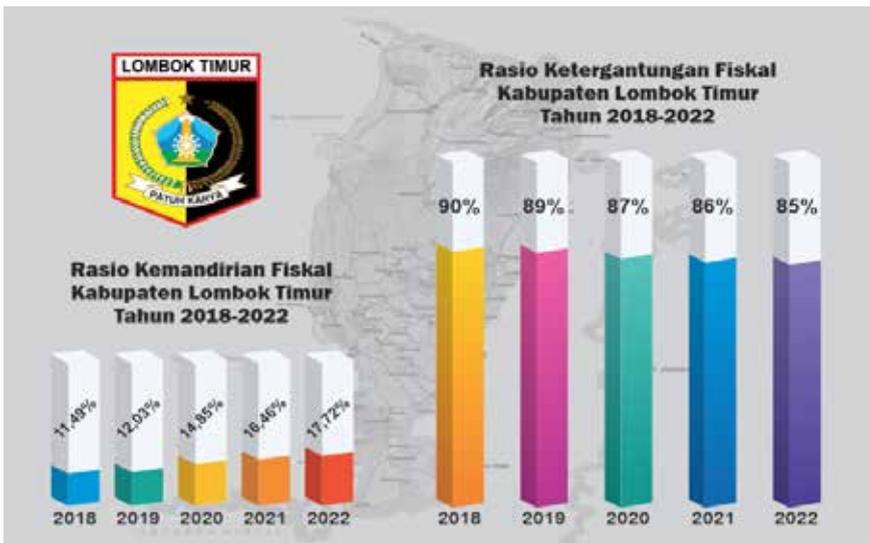
**P**ertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kondisi perekonomian menuju ke arah yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah.

Bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator prestasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan pemerintahan daerah Lotim. Untuk mendukung upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi di Lotim, pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk dapat menerapkan berbagai kebijakan yang dapat

menciptakan iklim pembangunan yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif pelaku ekonomi.

Didalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lotim, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu variabel kebijakan yang dapat diandalkan dan memiliki pengaruh terhadap terciptanya pembangunan ekonomi di daerah ini. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah memiliki pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah (baik itu belanja langsung maupun tidak langsung), dimana pengeluaran ini mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Lotim untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya keuangan yang dimiliki dan diperoleh pemerintah daerah Lotim sangat perlu untuk dialokasikan secara efektif dan efisien bagi pembangunan di daerah ini dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harapannya dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Lotim sekaligus juga akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan penduduknya.



Namun, masalahnya saat ini adalah sumber pembiayaan pembangunan Lombok Timur sebagian besar berasal dari dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Lombok Research Center (LRC) terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah Lotim periode 2018-2022 rata-rata mencapai 87,37 persen, artinya ketergantungan terhadap dana dari pusat sangat tinggi. Dengan kata lain Kabupaten Lombok Timur tingkat kemampuan keuangannya (kemandirian) untuk membiayai pembangunan di daerah masih rendah, yaitu baru sebatas 14,51 persen.

Pembiayaan belanja pembangunan Lombok Timur masih terbantu oleh adanya dana bagi hasil melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) karena daerah ini merupakan penghasil tembakau terbesar di Provinsi NTB. Untuk tahun anggaran 2020, Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 memperoleh dana bagi hasil sebesar Rp62.802.612 dari total Rp329.269.117 yang diterima di seluruh daerah se-Provinsi NTB untuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Selain dana bagi hasil, pembiayaan pembangunan di Lotim juga didukung oleh adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pada tahun anggaran tertentu..

Untuk DAU yang diterima Lotim dalam pelaksanaannya lebih besar digunakan untuk menggaji pegawai daerah, serta sebagian lagi digunakan untuk belanja pembangunan yang jumlahnya relatif kecil. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah Lotim untuk mencari alternatif lain berupa sumber pembiayaan pembangunan. Namun, pada sisi lainnya tuntutan untuk memenuhi fasilitas ataupun sarana dan prasarana bagi penduduk Lotim terus meningkat. Konsekuensinya adalah pemerintah Lotim daerah dituntut untuk kreatif dalam mencari sumber pendapatan dan pembiayaan yang memadai agar penyediaan infrastruktur serta fasilitas dan prasarana umum terealisasi.

Salah satu alternatif yang dapat diupayakan oleh pemerintah daerah Lotim untuk memperkuat dukungan pembiayaan pembangunannya adalah melalui dukungan terhadap kegiatan penanaman modal. Upaya ini akan menghasilkan investasi yang akan menambah stok modal atau capital stok daerah.

Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Investasi mengandung arti setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output dimasa yang akan datang. Dalam hal ini investasi tidak hanya berupa penambahan persediaan fisik modal tetapi juga menyangkut investasi sumber daya manusia.

Adanya arus investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui transfer modal, teknologi, manajemen dan kewirausahaan. Untuk dapat secara terus menarik minat investor berinvestasi, maka upaya-upaya perbaikan daya saing investasi harus ditingkatkan.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 mencapai Rp1.603.243.488.955. Realisasi investasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.452.999.546.206 namun lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.634.290.186.788.

Meskipun mengalami fluktuasi realisasi investasi namun, besaran capaian ini juga mengindikasikan bahwa, Kabupaten Lotim sangat kondusif bagi dunia usaha serta menjadi modal keparcayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Lombok Timur.

Dari sudut pemerintah, tujuan dari adanya investasi di Lotim yaitu adanya *public utilities* dan *public service* yang diharapkan mampu menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru guna penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur.

Hal ini juga berkaitan dengan kondisi dimana dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka bagi seluruh aspek wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Timur perlu menciptakan iklim penanaman modal baik modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang kondusif. Perlunya dilakukan berbagai kegiatan promosi yang lebih intensif lagi mengenai daerah Kabupaten Lombok Timur pada khalayak umum untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur hendaknya juga dapat memperbaiki sistem birokrasi yang ada di Kabupaten ini dan juga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan menciptakan kondisi yang efisien dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh investor lokal maupun investor asing di Kabupaten Kepulauan Lombok Timur.



## 27

FORMAT ULANG BUMD  
DI LOMBOK TIMUR

*“Kami belum melihat ikhtiar yang maksimal di jajaran Energi Selaparang ini”. Itu merupakan kalimat pembuka dari salah satu berita yang dimuat di salah satu media online pada hari Selasa 13 April 2021 yang lalu.*

**H**al ini menjadi tambah menarik dikarenakan judul berita tersebut adalah “ Pemda Lotim Tak Puas dengan Kinerja PT. Energi Selaparang”. Untuk meningkatkan target deviden dari semua BUMD yang ada di NTB, pemerintah Lombok Timur (Lotim) mendorong semua perusahaan daerah untuk bekerja lebih maksimal lagi, terutama di masa yang tidak normal ini, yaitu pada masa Pandemi Covid-19.

Yang menjadi pertanyaan adalah, seperti apakah motivasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah? Apakah

ada Reward dan Punishment yang akan diberlakukan oleh pemerintah daerah?. Atau apakah penurunan kinerja ini menyebabkan terjadinya penurunan deviden oleh perusahaan daerah dikarenakan jajaran direksi kurang memiliki orientasi bisnis yang menuntut kecepatan dan harus mengikuti perkembangan zaman?.

Meskipun perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan sebagai dampak Pandemi Covid-19 sepanjang 2020, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) Lombok Timur masih yang terbaik di Nusa Tenggara Barat, jika mengesampingkan sektor pertambangan atau tanpa bijih logam.

Berdasarkan rilis BPS per-26 Februari, Lombok Timur menduduki posisi Kabupaten dengan kontraksi ekonomi

terendah di antara seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Artinya, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB sepanjang tahun 2020. Sementara itu kontraksi pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Timur hanya minus 3,10 persen, merupakan daerah dengan kontraksi ekonomi terendah dari seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

Data dari BPS menunjukkan bahwa kontraksi ekonomi di Lombok Timur disebabkan menurunnya pertumbuhan di tiga sektor yang memiliki kontribusi paling besar dalam perekonomian daerah, di antaranya sektor pertanian yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,39 persen, sektor perdagangan sebesar minus 3,65 persen, dan sektor konstruksi sebesar minus 14,83 persen.

Mengingat sejak awal tahun 2020 yang lalu, daerah mengalami bencana non alam yang menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya perekonomian. Untuk itu, sesuai dengan visi misi dari Bupati Lombok Timur bahwa, di tahun ketiga pemerintahannya akan fokus membangun sektor ekonomi.

Selain misi utama saat ini adalah mempercepat rehabilitasi dan psikologi masyarakat akibat covid-19. Pemberdayaan ekonomi dan industri tidak kalah penting. Bupati harus mampu menggerakkan semua jajarannya untuk saling bahu membahu dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Kembali kepada permasalahan yang sedang dialami oleh BUMD yang ada di Lombok Timur saat ini. Selain fokus kepada peningkatan kinerja dari semua BUMD, BUMD-BUMD yang ada juga harus memiliki visi yang sama dengan apa yang diinginkan oleh bapak bupati.

Dari beberapa BUMD yang ada di Lombok Timur fokus bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mampu memberikan deviden yang agak besar kepada daerah. Sedangkan BUMD yang bergerak di

bidang perdagangan seperti Selaparang Agro dan Energi selaparang kinerjanya masih belum memuaskan. Hal ini dilihat dari sumbangan deviden yang masih sangat kecil ke daerah.

Kalau dilihat dari model bisnis yang dijalankan, bisa penulis simpulkan bahwa orientasi bisnis yang dimiliki oleh BUMD-BUMD di Lombok Timur masih hanya bergerak dan fokus kepada satu model usaha yaitu jasa keuangan. Padahal jikalau dilihat dari potensi pengembangan ekonomi yang ada di Lombok Timur ini sangat luas sekali. Kenapa hal itu masih belum bisa di maksimalkan potensinya?.

Wajar saja jika berdasarkan angka statistik menunjukkan setoran deviden turun sejak tahun 2018. Dan seharusnya pemerintah daerah juga harus berani mengumumkan kepada publik seberapa besar setoran deviden dari BUMD yang ada di Lombok Timur. Sehingga publik bisa mengetahui dengan jelas seperti apa kinerja dari BUMD yang ada.

Diperlukan sebuah penyamaan visi antara BUMD dengan visi dari pembangunan Lombok Timur. Melihat yang terjadi saat ini yaitu, BUMD masih fokus kepada sektor keuangan saja, padahal jika berbicara pertumbuhan ekonomi dan arah pembangunan pemerintah daerah harus dikolaborasikan semua sektor unggulan yang ada di Lombok Timur ini. Masih banyak sektor unggulan yang dimiliki seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri kreatif, pariwisata yang sejak awal merupakan arah pembangunan untuk peningkatan ekonomi lokal di Lombok Timur.

Jajaran direksi harus mampu menterjemahkan apa yang diinginkan oleh Bupati dalam bentuk kinerja bisnis yang berbasis potensi lokal. Dan jajaran direksi harus mampu mengkoneksikan visi pembangunan yang ingin dikerjakan oleh bupati dengan model pengembangan usaha BUMD ke depannya. Jangan terfokus kepada jenis usaha yang sifatnya konvensional semata, padahal tantangan bisnis ke depannya harus

mampu mengikuti perkembangan zaman dan arak perkembangan pertumbuhan ekonomi. Jika hanya masih diprioritaskan pada jasa keuangan saja, kita akan kalah bersaing dengan jasa keuangan swasta dan negara yang memiliki skala prioritas yang jelas dan didukung oleh kebijakan pusat yang kuat.

Untuk itu pengembangan model usaha harus sinergi dengan arah pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan keunikan potensi sumberdaya yang dimiliki Lombok Timur tidak akan dimiliki oleh daerah lain. Ini merupakan salah satu keunggulan kita, belum lagi jika kita kombinasikan dengan sumberdaya manusia dan teknologi yang kita miliki.

Salah satu contoh yaitu sektor pertanian. Lombok Timur memiliki keunikan dan keunggulan pertanian yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini dibuktikan dengan pertanian merupakan penyumbang PDRB yang tertinggi bagi daerah.

Yang menarik adalah, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Lombok Research Center pada tahun 2017 sampai 2020 yang lalu, sektor pertanian menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang utama di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini ditunjukkan dengan perputaran uang di sector pertanian di Lombok Timur mencapai 3 sampai 4 triliun rupiah setiap tahunnya.

Ini menjadi peluang pengembangan model bisnis bagi BUMD-BUMD di Lombok Timur. Apalagi jika dikolaborasikan dengan sektor unggulan yang dimiliki oleh Lombok Timur lainnya. Semoga visi pembangunan dari Bapak Sukiman dan Rumaksi mampu diejawantahkan oleh jajaran direksi BUMD, dengan tetap berpegang teguh kepada keuntungan sosial bagi masyarakat Lombok Timur. Atau jika tidak mampu, maka sebaiknya BUMD yang ada di Lombok Timur di format ulang semi kemaslahatan orang banyak.

## 28

BUMD LOMBOK TIMUR :  
ANTARA PAD ATAU BEBAN APBD

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kemampuan atau kapasitas fiskal yang dimiliki daerah menjadi bahan diskusi yang menarik terutama terhadap aspek ekonomi maupun politik. Pada aspek ekonomi yang paling menarik untuk didiskusikan adalah kemampuan daya dukung pendapatan daerah untuk menggantikan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Tentunya ini sangat

strategis karena pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing untuk dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan didalam pembiayaan pembangunan. Artinya, otonomi daerah harus juga dibarengi dengan kemandirian fiskal.



Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah otonom yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama ini sumber penerimaan Kabupaten Lombok Timur (Lihat Grafik 1) sebagian besarnya masih berasal dari pemerintah pusat. Pandemi Covid-19 yang berlangsung di awal tahun 2020 telah berdampak terhadap munculnya kebijakan pemerintah pusat melalui refocussing anggaran hingga saat ini. Hal ini tentunya berimplikasi pada berkurangnya porsi subsidi fiskal ke daerah sehingga, tidak ada jalan lain bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur selain menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah.

Lembaga Lombok Research Center (LRC) didalam kajiannya melihat persoalan fiskal pada Kabupaten Lombok Timur akan tergantung pada kebijakan pemerintah daerah didalam merestrukturisasi berbagai sumber-sumber penerimaan daerah. Kesimpulan lembaga kajian kebijakan publik ini didasarkan pada fakta bahwa sesungguhnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebenarnya telah memiliki sumber-sumber pendapatan yang sangat potensial namun belum dapat diberdayakan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan

daerah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara “memoles” Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dimiliki untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan potensial bagi pemerintah kabupaten Lombok Timur.

### **Kontribusi BUMD Terhadap PAD Kabupaten Lombok Timur**

Otonomi daerah yang dibarengi dengan kebijakan desentralisasi fiskal memberikan konsekuensi besar terhadap peran serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu pilar ekonomi terutama di daerah, BUMD tentunya harus mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah. Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang akan berdampak kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka, salah satu kuncinya adalah diperlukan BUMD yang sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan BUMD yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah. Keberadaan BUMD tentunya diharapkan dapat membantu keuangan daerah dalam upaya membiayai program-program pembangunan yang dilaksanakan. Bagian laba atas atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan dari salah satu sumber pendapatan asli daerah dan masuk dalam perhitungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

Saat ini di Kabupaten Lombok Timur terdapat setidaknya empat BUMD yang memiliki potensi besar untuk dapat berkontribusi terhadap PAD, BUMD tersebut adalah: PT Selaparang Finansial, PT Energi Selaparang, PD Agro Selaparang dan, PDAM Tirta Dharma. Selain BUMD tersebut

yang memang mayoritas sahamnya 100 persen milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, masih terdapat beberapa BUMD yang dikelola oleh Provinsi NTB yang Pemkab Lombok Timur juga memiliki saham. Adapun BUMD-BUMD tersebut antara lain, yaitu PT. Bank NTB Syariah dan PD. BPR NTB.



Pada periode 2018-2021, keuntungan atau deviden yang disetorkan oleh BUMD-BUMD yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah terus mengalami penurunan, baik itu pada BUMD yang kepemilikan sahamnya 100 persen maupun pada penyertaan modal pada BUMD milik Provinsi NTB.

Namun, kenyataannya kontribusi BUMD-BUMD tersebut hingga saat ini belum terlihat secara signifikan mampu memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, bahkan lebih sering menjadi beban bagi APBD. Seperti yang terlihat pada grafik di atas dimana, selama periode tahun 2018-2022 rata-rata kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 5,07 persen. Data pada grafik di atas sudah termasuk penerimaan deviden pada penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada perusahaan daerah yang dimiliki oleh Provinsi NTB.

Sedangkan kalau deviden yang bersumber dari BUMD Kabupaten Lombok Timur, kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat rendah. Pada periode tahun 2018-2022 rata-rata persentase kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 2 persen saja seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

### KONTRIBUSI DEVIDEN BUMD MILIK PEMKAB. LOTIM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2018-2021

	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DEVIDEN BUMD MILIK PEMKAB LOTIM	PERSENTASE (%)
2018	261.931.377.630	6.459.951.307	2%
2019	289.621.500.124	6.154.424.538	2%
2020	329.110.520.620	5.768.410.319	2%
2021	386.846.220.594	3.364.260.832	1%

1. PT Selaparang Finansial 2. PD Selaparang Agro 3. PT Energi Selaparang 4. PDAM Lombok Timur

### Kinerja BUMD Lombok Timur

Persoalan BUMD di Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan kurang terekspos padahal keberadaan BUMD sangat penting didalam mendukung perekonomian daerah. Rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah mencerminkan kinerja BUMD milik Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal. BUMD yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk mencari pundi-pundi keuntungan, dalam perjalanannya ternyata masih jauh dari harapan.

Ada empat BUMD yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa BUMD yang layak untuk dilakukan evaluasi namun, terhadap BUMD yang eksis menopang PAD tentunya layak untuk diapresiasi. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja BUMD dimaksudkan sebagai kesehatan perusahaan/badan usaha dalam rangka kemampuannya untuk:

1. Membayar hutang-hutangnya terutama jangka pendek (diukur oleh likuiditas)
2. Menghasilkan keuntungan (diukur oleh rentabilitas)
3. Aktiva/kekayaannya cukup/lebih besar dari utang-utangnya (diukur oleh solvabilitas).

Saat ini terdapat beberapa BUMD di Kabupaten Lombok Timur yang kinerjanya dapat dikatakan kurang efisien. Tidak sedikit dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur yang digunakan sebagai penyertaan modal. Apabila melihat data pada tabel di bawah terlihat pada beberapa BUMD antara penyertaan modal dengan keuntungan yang diperoleh sangat tidak efisien.

**PENYERTAAN MODAL PEMDA LOMBOK TIMUR PADA BUMD TAHUN 2018-2021**

NAMA BUMD	2018	2019	2020	2021
PT BANK NTB SYARIAH	Rp75.230.838.288	Rp75.230.838.288	Rp75.230.838.288	Rp79.646.838.288
PT SELAPARANG FINANSIAL	Rp101.108.997.408	Rp101.234.807.566	Rp88.172.560.940	Rp105.738.555.374
PD BPR NTB	Rp10.753.187.481	Rp12.744.384.962	Rp14.204.931.685	Rp13.618.581.787
PD SELAPARANG AGRO	Rp8.392.610.644	Rp13.683.546.641	Rp9.214.541.745	Rp9.536.917.626
PT ENERGI SELAPARANG	Rp.15.365.114.784	Rp.15.321.333.948	Rp16.439.014.211	Rp14.921.555.808
PDAM LOMBOK TIMUR	Rp51.521.445.580	Rp55.460.839.079	Rp59.597.650.024	Rp67.068.669.632
<b>TOTAL PENYERTAAN MODAL</b>	<b>Rp262.372.194.187</b>	<b>Rp273.675.750.485</b>	<b>Rp273.259.536.894</b>	<b>Rp290.529.138.520</b>

**PENDAPATAN DEVIDEN (LABA) BUMD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018-2021**

TAHUN	PT SELAPARANG FINANSIAL		PD SELAPARANG AGRO		PT ENERGI SELAPARANG		PDAM LOMBOK TIMUR	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2018	5.382.552.019	5.382.551.094	5.503.436.000	5.659.462.538	5.503.436.000	5.517.824.319	-	3.364.260.832
2019	800.000.000	353.426.503	684.500.000	-	684.500.000	-	-	-
2020	150.000.000	-	100.000.000	-	100.100.000	50.000.000	-	-
2021	229.234.420	723.973.710	725.000.000	494.962.000	725.000.000	20.586.000	-	-

Untuk mewujudkan kinerja BUMD Lombok Timur yang kuat dan tahan lama serta mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah tentunya harus didukung oleh konsep manajemen yang baik, terutama perencanaan dan strategi yang teliti karena manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan, pengendalian sumber daya dalam organisasi.

Manajemen yang baik untuk mewujudkan kinerja yang maksimal tentu juga harus didukung oleh sumber daya (human capital) yang memiliki kemampuan serta kompetensi didalam bidangnya. Keberadaan human capital sangat penting dan perlu untuk diperhatikan agar perusahaan daerah mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi.

Problem sebagian besar BUMD di Indonesia adalah masalah sumber daya manusia (human capital), dimana banyak dari jajaran direksi maupun komisaris pada BUMD-BUMD yang tidak sesuai dengan kompetensinya didalam mengelola perusahaan daerah. Hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pemegang saham mayoritas pada BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Aktivitas perusahaan daerah tidak seharusnya hanya dilihat pada perspektif bisnis yang menghasilkan keuntungan semata melainkan keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah merupakan dukungan aktivitas yang berasal dari keberadaan sumber daya manusia (human capital). Pemilihan sumber daya manusia yang ditempatkan menjadi direksi maupun komisaris harus didasarkan kepada pemahaman dan kemampuan membaca analisis keuangan perseroan, paham regulasi dalam mengatur industri, serta paham nature of business perseroan.

Kinerja dan daya saing yang rendah dari BUMD yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur akan menjadi persoalan serta tantangan

terutama di zaman revolusi industri 4.0 saat ini. Perusahaan daerah Lombok Timur akan menghadapi tantangan disparitas antar daerah, kelembagaan, SDM, penggunaan teknologi, market global, serta permodalan. Diperlukan kesiapan BUMD dalam menghadapi perubahan di era digital agar bisa menghadapi persaingan di dunia usaha. Perusahaan daerah Kabupaten Lombok Timur harus mampu bertransformasi dalam menghadapi perubahan global untuk menjadi kekuatan ekonomi di daerah.

Sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 mencapai 26,87 persen atau Rp6.073.189,50 dari total PDRB sebesar Rp22.599.855,80.

Artinya, terdapat peluang bagi BUMD untuk dapat memanfaatkan di era Industri 4.0 yang berjalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sangat mudah untuk diakses. Kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut akan menjadikan pasar bagi produk-produk pertanian yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur semakin luas. Selain itu, kemajuan-kemajuan tersebut akan mempermudah proses baik distribusi maupun penjualan sehingga dapat mengurangi biaya dan lain sebagainya.

Peluang-peluang tersebut harus mampu ditangkap oleh BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur. Terlebih telah ada payung hukum seperti adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Bab XII dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Perusahaan daerah Kabupaten Lombok Timur tidak seharusnya saat ini untuk berdiam di tempat saja melainkan juga sudah harus pro aktif menjemput peluang-peluang bisnis dengan cara mendekati para investor, pengusaha. Terlebih lagi dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika maka, BUMD Lombok Timur harus berani untuk menambah dan mengembangkan unit-unit bisnis yang berpotensi untuk menambah penghasilan daerah.

Sebagai salah satu daerah penyangga KEK Mandalika maka, peluang sektor pertanian sebagai daya dukung sektor pariwisata dapat dimanfaatkan peluangnya. Artinya perusahaan daerah mampu memaksimalkan potensi melalui mengkombinasikan peluang pariwisata dan pertanian. Untuk itu, Pemkab Lombok Timur perlu untuk melakukan pengembangan pariwisata dengan cara memanfaatkan potensi pertanian sebagai salah satu daya dukungnya. Pertanian juga dapat menjadi daya tarik sektor pariwisata melalui kuliner. Indonesia memiliki beragam jenis makanan yang berasal dari hasil pertanian, seperti nasi, sayur, buah-buahan, dan rempah-rempah. Selain kuliner, produk olahan dari hasil pertanian juga dapat menjadi daya tarik sektor pariwisata.

Pertanian juga dapat menjadi daya tarik sektor pariwisata melalui wisata edukasi. Wisata edukasi dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi wisatawan, terutama bagi anak-anak. Wisata edukasi pertanian dapat memberikan edukasi tentang cara menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian. Wisata edukasi juga dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pertanian bagi kehidupan manusia.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur harus mampu memanfaatkan dan memaksimalkan potensi pertanian yang dimiliki untuk dapat menjadi daya dukung sektor pariwisata. Maka, pemerintah daerah

dapat mengupayakan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti jalan, irigasi, dan pasar. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai dapat memudahkan petani dan perusahaan daerah dalam memproduksi dan memasarkan hasil pertanian.

Selain itu, keberadaan BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai salah satu sarana promosi pariwisata melalui keberadaan mitra usaha dan konsumennya. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, dan website. Promosi yang tepat dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata yang berkaitan dengan pertanian.

Perusahaan daerah harus dapat menjadi katalisator perekonomian di daerah melalui kerjasama dengan petani, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya memaksimalkan peran dan keberadaan perusahaan daerah, terutama dalam hal peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Dimana, ujung dari semua upaya tersebut adalah untuk mendatangkan pendapatan daerah sehingga, dapat menjadi daya dukung didalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 29

MTQ KE-29 TINGKAT PROVINSI NTB  
BERKAH BAGI UMKM DI LOMBOK TIMUR

**A**jang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke - 29 Tingkat Provinsi NTB telah berakhir pada rabo malam kemarin. Acara yang spektakuler tersebut langsung ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB DR. Hj. Sitti Rohmi Djalillah di lapangan umum Gotong Royong, Masbagik, Lombok Timur.

Sejak digelar mulai tanggal 29 Juni hingga 6 Juli 2022, beragam komentar dari sejumlah peserta mewakili daerahnya masing-masing memberikan penilaian atas pelaksanaan MTQ kali ini.

Kabupaten Lombok Timur selaku tuan rumah patut berbangga telah dinobatkan sebagai kabupaten yang memiliki reputasi terbaik dalam penyelenggaraan MTQ tingkat propinsi NTB selama ini.

Tidak hanya peserta dan panitia yang mendapatkan keberkahan dalam acara spritual tersebut. Banyak masyarakat bahkan pedagang kecil mendapatkan keberkahan dari event spritual yang diselenggarakan. Ribuan pedagang kecil ikut bergembira menikmati dampak secara

langsung. Setiap hari ribuan pedagang kecil seperti pedagang kacang, pedagang cilok, pedagang minuman, pedagang makanan sampai ke bisnis yang menengah seperti konveksi dan jasa penginapan pun menikmati keberkahan tersebut.

Seperti yang disampaikan dalam acara pembukaan kemarin, Bapak Gubernur NTB mendorong program-program yang berbentuk Event untuk menggerakkan perekonomian NTB. Dan NTB membutuhkan event-event yang sifatnya mampu memberikan dampak mercusuar bagi NTB agar dapat dilirik oleh pemerintah pusat, investor bahkan dunia internasional.

Namun, tulisan ini akan lebih mengupas seperti apa dampak langsung yang diterima oleh pedagang mikro dan kecil atas terselenggaranya event MTQ ini. sejak dibukanya event MTQ ini, penulis mencoba menggali informasi dalam bentuk wawancara langsung dengan pedagang dan pelaku UMKM yang terlibat secara langsung dalam MTQ yang diselenggarakan.

Kita ketahu bersama bahwa Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Begitupapun secara daerah yaitu NTB yang selama ini menggantungkan perekonomiannya secara makro pada pergerakan pariwisata. walaupun sebenarnya pondasinya tetap pada sektor pertanian secara umum. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Perekonomian nasional sendiri, baru mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3%. Beruntung pada semester I tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan walaupun pergerakan sedikit melambat.

Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, dan penurunan realisasi belanja pemerintah

termasuk belanja barang. Disamping itu, terjadi penurunan perdagangan luar negeri yang cukup tajam. Palung penurunan pertumbuhan ekonomi telah dilalui pada triwulan II, namun Covid-19 masih akan menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan performance ekonomi nasional pada triwulan III dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar -0,4% sampai 1%.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan efektif mulai triwulan III. PEN tersebut terdiri dari 3 (tiga) kebijakan utama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas dunia usaha (supply) serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Ketiga kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat.

### **Bagaimana Kebijakan Ekonomi NTB?**

Dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, harus mengutamakan UMKM. Pola usaha harus meneruskan kearifan lokal, sesuai dengan apa yang menjadi kekayaan dasar masyarakat NTB.

Melihat hal itu, pemerintah daerah terus membuat strategi dan kebijakan yang menggerakkan roda bisnis pada sektor UMKM. Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah daerah NTB yaitu dengan memperbanyak event. Baik yang berskala lokal, nasional maupun Internasional.

Dimulai dengan perhelatan super bike di penghujung tahun 2021 dan perhelatan event MotoGP pada awal tahun 2022 yang lalu. Dan saat ini pemerintah daerah pun sedang melaksanakan event Motorcross Grand Prix atau MXGP yang berlangsung di pulau Sumbawa.

Pelaksanaan event tersebut diharapkan akan mampu menggerakkan sektor UMKM. Sebagai contoh berdasarkan beberapa analisa, pada perhelatan MotoGP yang lalu, perputaran ekonomi bagi UMKM cukup pantastis. Jika dilihat dari perputaran peredaran uang sampai 2 triliun.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membaca peluang yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan mengambil tawaran menjadi tuan rumah event MTQ. Penulis melihat bahwa event MTQ ini merupakan pintu masuk yang paling cocok bagi daerah Lombok Timur. Hal ini dikarenakan bahwa Lombok Timur merupakan daerah yang berpondasi religi. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya organisasi keagamaan yang ada di Lombok Timur. Organisasi keagamaan ini dimanivestasikan dalam bentuk menjamurnya pondok-pondok formal yang didirikan di semua desa.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa perputaran uang secara langsung yang terjadi setiap malamnya sekitar 1,5 sampai 2 Milyar. Kesimpulan ini berdarkan analisa sederhana dari seberapa banyak transaksi yang dilakukan selama event berlangsung. Hal ini dilihat dari jumlah pedagang kecil, jumlah penonton, aktivitas peserta, panitia dan masyarakat di sekitar lokasi event MTQ.

Dalam putaran ekonomi tersebut, yang paling dominan mendapatkan dampaknya adalah pedagang mikro dan kecil yang berjumlah 98,68%. "Dagangan kami, paling lama habis sekitar jam 9 malam. Mungkin ini mukjizat dari Al'Quran" ungkap Amaq Ifin salah satu pedagang kacang rebus ketika diajak diskusi oleh penulis.

Salah satu pedagang Cilok juga mengatakan bahwa kami pedagang merasakan keberkahan atas rezeki yang diperoleh. Pedagang sangat mengharapkan event-event yang sifatnya religi. Karena secara emosional dan secara spritual kami yang merasakannya, dari pada kami dibuatkan event-event yang sifatnya hura-hura.

Dilihat dari jumlahnya dana yang dikeluarkan, jumlah sumberdaya yang dilibatkan maupun promosi yang dilakukan penulis berani mengatakan bahwa event MTQ ini lebih menguntungkan secara ekonomi bagi pedagang mikro dan kecil dari pada event MXGP Samota. Namun, kita sebagai masyarakat NTB pun harus memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membuat pondasi atas event-event yang berskala internasional maupun lokal.

Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (*road map*) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggaran pemerintah maupun dari lembaga keuangan.

Pemerintah harus mendorong pengusaha mikro dan kecil yang ada di NTB untuk secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran atau dengan kata lain menciptakan iklim pasar yang baik bagi para pelaku-pelaku mikro ini.

Jika tidak, maka akan membuka kembali pintu-pintu migrasi bagi masyarakat NTB ke luar negeri. Kita harus belajar banyak dari kejadian kapal cepat yang tenggelam di perairan Riau kemarin. Karena kebanyakan yang menjadi korban adalah masyarakat NTB.

Sehingga jangan sampai seperti yang diungkapkan oleh teman-teman aktivis bahwa Event-Event Besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah hanya memberikan keuntungan bagi para pihak bukan untuk semua pihak. Namun MTQ ini mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil". Semoga saja tidak seperti itu. Kita harus berfikir positif bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi NTB Gemilang.





# **BAB IV**

## **TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH**



## 30

KEBIJAKAN FISKAL NTB:  
ANTARA KEMANDIRIAN ATAU HUTANG

Desentralisasi fiskal telah berjalan selama dua dekade lebih namun, pengelolaan dana di daerah masih belum efektif. Kemandirian fiskal daerah terpantau masih rendah dan sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Belanja daerah pun tidak efektif dan masih dibayangi problem klasik menumpuknya dana pemerintah daerah di perbankan dari tahun ke tahun.

Kemandirian fiskal dapat diukur dari perbandingan antara

pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan yang diterima daerah terkait dalam suatu waktu. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, dengan perbandingan itu, tingkat kemandirian fiskal daerah tercatat masih sangat rendah meski desentralisasi fiskal sudah berlangsung selama 23 tahun.

kondisi tersebut kemudian bertambah sulit dengan adanya

kejadian Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 yang lalu. Dimana, situasi itu tidak hanya mempengaruhi stabilitas keuangan nasional, namun kejadian pandemi tersebut juga mempengaruhi stabilitas keuangan daerah, bahkan sampai tahun 2023 ini. Kebijakan realokasi atau refocussing anggaran yang harus dilakukan berimplikasi kepada pengurangan belanja infrastruktur di daerah, sementara kemampuan pendapatan dan belanja daerah menjadi semakin tertekan.

Banyak sektor pajak di daerah mengalami gangguan yang dapat terlihat dari kontribusi sektor ini menurun selama pandemi Covid-19. Selain itu, berbagai pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat seperti, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Daerah sampai Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan akibat adanya kebijakan pengalihan untuk penanganan Covid-19. Sejumlah program kerja banyak yang mengalami penundaan ataupun dirubah yang disebabkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang mengatur pemotongan program pembangunan minimal 50 persen.

Kondisi tersebut saat ini terjadi pada Provinsi NTB dimana, saat ini mengalami defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 sebesar Rp 394 Miliar. Memastikan ketersediaan dan kecukupan fiskal untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 yang termuat dalam Perda NTB No. 12 Tahun 2019 menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi NTB.

Wacana mengenai Pemrov NTB yang akan menutup defisit anggaran melalui skema pinjaman menjadi perhatian berbagai pihak terutama terkait urgensi rencana kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemrov NTB. Ada yang memberikan dukungan dengan alasan bahwa melalui pinjaman daerah tersebut akan kembali membuat APBD NTB sehat dan normal kembali. Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan

rencana tersebut dengan alasan pada aspek tata kelola keuangan Pemprov NTB yang diidentifikasi masih buruk.

Sebagai mitra pembangunan pemerintah, Lombok Research Center (LRC) juga merasa perlu untuk memberikan pandangan terkait dengan wacana skema pinjaman daerah untuk menutupi defisit fiskal Provinsi NTB.

### **Keadaan Fiskal NTB**

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari pihak luar, termasuk dari pemerintah pusat (BPK, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya pemberian diskresi didalam penentuan tarif pajak. Tercapainya kemandirian fiskal akan menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya.

Selain itu, penguatan pendapatan asli daerah juga membuat keuangan daerah lebih stabil apabila keuangan Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020 (Gambar 1), terlihat bahwa Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Provinsi NTB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 memiliki tren yang datar (flat/tidak berubah). Nilai IKF Provinsi NTB pada tahun 2013 mencapai 0,3606 termasuk dalam kategori Menuju Kemandirian. Capaian IKF ini tidak berubah hingga tahun 2020 yang mencapai 0,3509 dan masih tetap dalam kategori Menuju Kemandirian.

Desentralisasi fiskal menuntut daerah menjadi mandiri dalam mengelola keuangannya dan melakukan pembangunan. Kemandirian daerah tersebut salah satunya dapat diukur atau tercermin dari kapasitas fiskal daerah. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah?



Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Data terakhir menyebutkan yang diperoleh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi NTB memiliki Indeks KFD sebesar 1,465 dan termasuk dalam kategori “Rendah”.

KONDISI FISKAL PROVINSI NTB TAHUN 2018-2022 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAPASITAS FISKAL DAERAH									
No. 107/PMK. 07/2018		No. 126/PMK. 07/2019		No. 120/PMK. 07/2020		No. 116/PMK.07 /2021		No. 193 /PMK.07/2022	
0.478		0.395		0.318		0.408		1.465	
Rentang IKFD	Kategori Peta KFD	Rentang IKFD	Kategori Peta KFD	Rentang IKFD	Kategori Peta KFD	Rentang IKFD	Kategori Peta KFD	Rentang IKFD	Kategori Peta KFD
IKFD < 0.351	Sangat Rendah	IKFD < 0.304	Sangat Rendah	IKFD < 0.277	Sangat Rendah	IKFD < 0.530	Sangat Rendah	IKFD < 1.171	Sangat Rendah
0.351 ≤ IKFD < 0.530	Rendah	0.304 ≤ IKFD < 0.445	Rendah	0.277 ≤ IKFD < 0.564	Rendah	0.530 ≤ IKFD < 0.727	Rendah	1.171 ≤ IKFD < 1.504	Rendah
0.530 ≤ IKFD < 0.823	Sedang	0.445 ≤ IKFD < 0.808	Sedang	0.564 ≤ IKFD < 0.934	Sedang	0.727 ≤ IKFD < 1.053	Sedang	1.504 ≤ IKFD < 1.838	Sedang
0.823 ≤ IKFD < 1.531	Tinggi	0.808 ≤ IKFD < 1.564	Tinggi	0.934 ≤ IKFD < 1.920	Tinggi	1.053 ≤ IKFD < 1.838	Tinggi	1.838 ≤ IKFD < 2.171	Tinggi
IKFD ≥ 1.531	Sangat Tinggi	IKFD ≥ 1.564	Sangat Tinggi	IKFD ≥ 1.920	Sangat Tinggi	IKFD ≥ 1.838	Sangat Tinggi	IKFD ≥ 2.171	Sangat Tinggi
RENDAH		RENDAH		RENDAH		RENDAH		RENDAH	

Melihat Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) serta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi NTB seperti di atas maka, kejadian pandemi Covid-19 sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi status/kategori kemandirian fiskal maupun kapasitas fiskal Provinsi NTB sejak tahun 2013 bahkan sampai dengan adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif di dalam tata kelola keuangan daerah terutama memaksimalkan berbagai potensi

sumber pendapatan seperti sumber pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang sah (kontribusi dividen BUMN) serta menjadikan berbagai aset daerah menjadi profit center bukan sebagai cost center seperti yang selama ini terjadi.

## **Pinjaman Daerah Dan Tantangannya**

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 56 Tahun 2018).

Wacana mengenai rencana Pemprov NTB akan mengajukan pinjaman daerah untuk menutupi kekurangan arus kas daerah sebesar Rp750 miliar kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memang dibenarkan oleh aturan. Namun demikian, dalam melakukan pinjaman Pemerintah Daerah harus dapat memperhitungkan risiko yang mungkin timbul, memperhatikan asas kecermatan dan kehati-hatian serta melakukan pengelolaan pinjaman secara profesional dan akuntabel.

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian terutama terhadap tantangan yang harus dihadapi yaitu pengembalian pokok dan bunga dari pinjaman tersebut. Pengembalian pokok pinjaman dan bunga akan menjadikan permasalahan kedepan jika tidak mampu di rencanakan dengan baik. Perencanaan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan dalam pengembalian baik pokok pinjaman maupun bunga karena penerimaan daerah baik yang berasal dari PAD dan Transfer Ke Daerah bisa saja mengalami fluktuasi.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah terdapat beberapa syarat seperti; (1) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0, 185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan (2) biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.

Masih dalam Pasal 2 (3) PMK No. 43/PMK. 07/2021 Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
2. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Karena melihat rencana waktu peminjaman berada pada tahun anggaran 2021 maka, skema suku bunga yang ditetapkan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan; (1) Pinjaman PEN dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen); (2) Pinjaman PEN dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 5,66% (lima koma enam enam persen); dan (3) Pinjaman PEN dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun sebesar 6,19% (enam koma satu sembilan persen) .

Bila wacana pinjaman daerah disesuaikan dengan masa kepemimpinan Gubernur NTB maka, skema yang digunakan adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu 3 tahun. Dimana kewajiban-kewajiban yang

harus dikeluarkan oleh Pemprov NTB yaitu biaya pengelolaan sebesar 0,185% setahun atau sebesar Rp1.387,5 Miliar, kemudian biaya provisi yang dibayar 1 kali sebesar 1% atau Rp7.5 Miliar. Selanjutnya apabila durasi pinjaman selama 3 tahun dengan suku bunga 5,30% maka, untuk pembayaran bunga pinjaman Pemprov NTB harus menganggarkan dana sebesar Rp39.750 Miliar.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, Lombok Research Center (LRC) berpendapat wacana mengenai rencana Pemprov NTB untuk menyehatkan APBD melalui pinjaman kepada PT. SMI telah melalui analisis market discipline, direct administrative control, cooperative control, dan rule – based control.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi lebih kreatif dan inovatif didalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tingkat kemandirian serta kapasitas fiskal daerah menjadi lebih meningkat. Pinjaman daerah akan berfungsi optimal bagi pembangunan daerah bila disertai dengan tata kelola yang baik. Pembangunan sistem yang baik menjadi penting karena tidak hanya bisa menyinergikan orientasi pembangunan, tapi juga konsekuensinya terhadap tujuan peningkatan kesejahteraan

Kebutuhan pembiayaan pembangunan di NTB yang terus meningkat terutama seiring dengan upaya mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memang tidak mungkin dapat ditanggung sepenuhnya oleh APBD Provinsi NTB saat ini. Pembiayaan melalui hutang sebagai sumber alternatif untuk kepentingan daerah memang masih dimungkinkan.

Namun, meskipun dimungkinkan sesuai aturan perundang-undangan seharusnya Pemprov NTB juga tidak boleh terlena dengan kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat tersebut, karena masih banyak potensi sumber daya yang ada di NTB belum dimaksimalkan.

Misalnya menjadikan aset daerah sebagai Profit Centre. Banyak pemberitaan mengenai permasalahan aset Pemprov NTB yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan namun, kondisinya saat ini terbengkalai atau tidak terurus. Salah satu contoh adalah bangunan pusat agrobisnis di Kabupaten Lombok Timur, kemudian Pabrik pengolahan rumput laut menjadi kosmetik di kawasan Science Technology and Industrial Park (STIPark) yang mangkrak atau tak dimanfaatkan, dan masih banyak lagi aset-aset Pemprov NTB yang lainnya.

Apabila keberadaan aset-aset tersebut mampu dimanfaatkan secara produktif maka, akan sangat membantu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Untuk itu, LRC berpendapat bahwa sangat penting untuk melakukan pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna dengan didasari prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien.

## 31

## NTB: INDUSTRIALISASI, HUTANG DAN CAPRES

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dalam rangka pembangunan dan pemerataan daerah. Kebijakan mengenai desentralisasi fiskal ini diyakini mampu mempercepat proses pembangunan serta mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerah di Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Didalam desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur yang harus diupayakan secara optimal, mengingat pemerintah daerah membutuhkan biaya atau dana yang cukup untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam pelayanan dan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006, h.5) yaitu pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran.

Namun didalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah menyebabkan adanya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari

pemerintah pusat. Dana transfer pemerintah pusat ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. Kementerian Keuangan (2019) menyatakan secara rata-rata nasional, ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer Pemerintah Pusat sebesar 80,1 persen. Sementara itu kontribusi PAD hanya sekitar 12,87 persen.

Angka rata-rata nasional tersebut merupakan angka pada level provinsi dan untuk level kabupaten/kota, Kementerian Keuangan juga menyatakan kondisinya lebih parah. Padahal fokus otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ada pada daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Dari hal tersebut Provinsi NTB dalam perolehan PAD sumber utamanya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Adapun komponen pajak daerah dan retribusi daerah yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

### **Derajat Desentralisasi**

Kemampuan atau indikator ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dapat terlihat dari besaran PAD-nya. Semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan semakin kecil ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya apabila sumbangan PAD

terhadap APBD menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal antara lain untuk memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik rasio dirumuskan desentralisasi fiskal dengan membagi antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

Sejak terjadinya Pandemi Covid-19 awal tahun 2020 sampai saat ini sangat berimbas terhadap pendapatan daerah NTB. Saat ini pendapatan dianggap tidak mampu menutupi berbagai rencana pembangunan dan pembiayaan pemerintah provinsi. Dari data yang ada pendapatan daerah tahun ini baru Rp 186 Miliar lebih (Lombok Post, 7 Juli 2021).

Namun di samping pendapatan itu, ternyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan Pemprov NTB mengalami defisit keuangan sebesar Rp 11 Miliar lebih. Di sisi lain defisit Rp 11 Miliar, pemerintah juga menghitung kekurangan anggaran untuk APBD perubahan 2021 sebesar Rp 394 Miliar lebih.

Dengan melihat defisit yang ada, banyak anggota DPRD yang mengusulkan untuk melakukan pinjaman melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2021 ini, postur APBD murni Pemprov NTB sebesar Rp 5,4 Triliun dengan PAD sebesar Rp 195,4 Miliar. Tetapi kemudian kebutuhan membengkak di APBD perubahan 2021 menjadi Rp 5,587 Triliun. Hal ini sudah ditetapkan melalui Perda No 12/2019 yang kontraknya sudah ditandatangani dan sedang

berjalan. Perda itu berisi tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak. Kala itu perda disusun berdasarkan asumsi tidak ada dampak resesi ekonomi.

Berdasarkan kajian Lombok Resarch Center (LRC) yang menyatakan tingkat desentralisasi fiskal NTB tergolong kurang. Hal ini dibuktikan dengan mengukur rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah. Dari data yang ada, tingkat desentralisasi NTB pada 2019 adalah sebesar 10 persen. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah NTB masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan daerahnya. Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal NTB tahun 2016-2018, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah sebesar 12 persen.

Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif kurang, karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Provinsi NTB.

### **Alternatif Kebijakan Peningkatan PAD NTB**

Masih tingginya ketergantungan pemerintah Provinsi NTB terhadap pemerintah pusat yang terlihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah menandakan bahwa kemampuan pemerintah NTB dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Bahkan hal ini juga membuktikan optimalisasi usaha pemerintah NTB dalam penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Untuk itu, Lombok Research Center menyarankan agar pemerintah NTB dapat memanfaatkan potensi daerah seperti pada sektor pertanian sebagai salah satu cara peningkatan PAD. Usaha ekstensifikasi mutlak dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi daerah yang dimiliki sehingga, menimbulkan peluang baru sebagai sumber penerimaan daerah. Peluang penerimaan PAD melalui sektor pertanian sangat terbuka lebar. Terbukti sektor pertanian bersama kehutanan dan perkebunan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada tahun 2020 yaitu mencapai 23,19 persen.

Memaksimalkan potensi pertanian melalui kerjasama atau konektivitas antar daerah perlu dijalani oleh pemerintah NTB, mengingat kebutuhan produk pertanian di NTB berdasarkan kajian sangat luar biasa mencapai lima triliun rupiah. Apalagi kedepannya kita ditunggu oleh peluang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan event motogp sebagai andalannya. Dinas Pariwisata NTB menyebutkan bahwa jumlah akomodasi penginapan di NTB tahun 2019 sebanyak 1.332 unit, terdiri dari 88 hotel berbintang dan 1.244 hotel melati.

Selain itu, dengan program unggulan yang selama ini didengungkan oleh Gubernur melalui industrialisasinya juga harus memperkuat pondasi di sector hulu. Jangan sector hilir saja yang diperhatikan. Konsep awal industrialisasi yaitu untuk meningkatkan nilai tambah bagi komoditi unggulan yang ada di NTB. Sehingga akan didorong industry berskala local yang mampu menciptakan teknologi pengolahan hasil. Namun pada ujungnya konsep itu berubah dengan dikeluarkannya "Lebui" motor listrik sebagai produk unggulannya.

Gubernur seharusnya fokus kepada konsep awalnya untuk membangun pondasi dasar industrialisasi. Jangan melebar kemana-mana. Sehingga sampai 3 tahun kepemimpinannya masih belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam sector peningkatan nilai tambah komoditi unggulan local NTB.

Adapun alternatif lainnya yang dapat dijalankan oleh pemerintah NTB untuk meningkatkan PAD adalah melalui pemberian wewenang dan pendelegasian kepada organisasi Perangkat daerah (OPD) yang potensial menyumbangkan pendapatan murni untuk penarikan retribusi pajak. Namun, tetap dengan melakukan kajian dan uji petik yang professional.

## Penutup

Sebagai salah satu daerah otonomi, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), harusnya mampu memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Target produksi pertanian yang selama ini menjadi barometer keberhasilan pemerintah daerah juga harusnya dibarengi oleh peningkatan PAD dari sektor ini melalui peluang-peluang penerimaan baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga integrasi berbagai sector dalam menunjang industrialisasi harus benar-benar dilaksanakan. Dengan harus memperkuat pondasi disektor hulu agar produksi dan teknologi peningkatan hasil bisa berkelanjutan tanpa adanya ketimpangan di hulu maupun hilir.

Dibutuhkan “pembisik” yang cerdas dan memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat oleh gubernur sebagai upaya memberikan masukan yang tepat terkait dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Supaya, jangnan yang dibisikkan adalah keberhasilan yang semu sehingga mimpi untuk menjadi capres yang selalu didengungkan.

## 32

## TATA KELOLA PEMBANGUNAN DI NTB MELALUI HUTANG



**M**asa “Panceklik” bagi pembangunan terjadi selama dua tahun ini. Khususnya di semua Kabupaten Kota yang ada di NTB. Selain adanya aturan yang mengharuskan belanja daerah diperuntukkan bagi kestabilan ekonomi menghadapi pandemic Covid. Belanja pembangunan lebih di prioritaskan bagi belanja barang yang peruntukannya untuk masyarakat miskin.

Selama dua tahun anggaran berjalan, daerah banyak menunda pembangunan khususnya yang terkait dengan fisik/infrastruktur. Yang lebih diutamakan yaitu bagaimana

daerah menjaga jaminan sosial bagi masyarakatnya dan menjaga perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik. Itu adalah niatan (Konsep) awalnya. Namun, apakah hal tersebut berjalan sesuai dengan konsep awalnya?.

Pemerintah memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penarikan utang daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tujuannya untuk mengakselerasi pembangunan namun harus tetap menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan menganut sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah, pemerintah daerah bisa melakukan penarikan utang dengan catatan harus bisa mengelola utang.

Tahun 2022 ini, Pemkab Lotim sudah melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastuktur (PT. SMI) senilai Rp. 155 miliar dan Sindikasi Bank PT Bank NTB Syariah sebesar Rp. 130 miliar. Untuk pemerintah Propinsi NTB pun memiliki utang kepada pihak ketiga. Pada tahun anggaran 2021, laporan keuangan Pemprov NTB mencatat utang sebesar Rp 685,054 miliar atau tumbuh 144 persen dari total utang pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 280,78 Miliar.

Sedangkan untuk pendapatan yang diterima oleh daerah pada tahun 2019, total pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp5,197 triliun. Pada 2020, pendapatan sedikit terkoreksi sekitar 0,45 persen menjadi 5,174 triliun. Sekali lagi, datangnya Covid-19 hanya mengoreksi sedikit total pendapatan daerah. pada 2021? Total pendapatan tahun 2021 meningkat 2,9 persen atau setara Rp 152 miliar menjadi Rp 5,326 triliun.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, dari tahun ketahun ada peningkatan, lalu kenapa bisa terjadi devisa anggaran?. Pada tahun 2021, total pendapatan provinsi meningkat Rp152 miliar (2,9 persen).

Dilihat dari belanja daerah yang ada, pemerintah propinsi dan beberapa pemerintah kabupaten yang ada sedikit keluar dari perencanaan yang sudah dibuatnya. Sebagai contoh, di propinsi sejak awal tidak pernah merencanakan kegiatan-kegiatan secara teknis pemerintah propinsi terlibat langsung dalam eveny yang dibuat. Namun, sejak tahun 2020 yang lalu, seolah-olah muncul "Ambisi" kepala daerah untuk melaksanakan program yang sifatnya spektakuler. Sebagai contoh adanya belanja dan kegiatan daerah yang tidak direncanakan secara matang, tapi tiba-tiba nyelip menjadi agenda strategis daerah.

Misalnya MXGP, kegiatannya bagus, tapi menguras sumber daya daerah, perhatian birokrasi dan sumber daya keuangannya.

Sejak awal, Gubernur NTB selalu mengatakan bahwa, kegiatan itu tidak menggunakan APBD. Sebuah kegiatan yang “disponsori” daerah, dan tidak ada nomenklaturinya pada APBD niscaya menggunakan dana non-budgeter. Apakah itu sehat?

Tindakan pemerintah non-budgeter, itu menunjukkan buruknya perencanaan dan tata kelola keuangan daerah. Menurut penulis, memobilisasi dukungan acara, pergerakan ribuan ASN untuk menonton acara MXGP, dukungan logistik untuk pelaksanaan MXGP, itu bersumber dari dana charity (shodaqoh dan yang semacamnya) atau dari sponsor yang baik hati?.

Selain itu, adanya gesekan antara legislative dan eksekutif selalu terdengar oleh publik. Gesekan yang terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan wewenang yang dimiliki. Yang mungkin ditafsirkan menjadi ajang adu mengambil jatah oleh publik NTB. Membengkaknya belanja daerah, terjadi karena membengkaknya kegiatan direktif kepala daerah (khususnya gubernur) dan aspirasi pikir dari para anggota dewan.

Selama ini, utang Pemerintah menjadi isu yang sangat seksi, dan sering dibawa-bawa ke ranah politik. Beberapa pihak berpandangan, bahwa jumlah utang Pemerintah daerah saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan Pemerintah daerah untuk membayarnya.

Namun, perlu diketahui, dalam melakukan dan mengelola utang/pinjaman, Pemerintah mempunyai aturan main yaitu undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan menteri, best practices dan prinsip kehati-hatian (prudent). Hal penting yang juga perlu dipahami, bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan di daerah berjalan lancar, disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD ketika membahas dan menetapkan APBD.

## Hutang sebagai Instrumen Pembangunan

Pembangunan di daerah membutuhkan dana yang besar, yang dicantumkan dalam APBD. Sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBD berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan dari pemerintah pusat. Pendapatan Daerah berasal dari Perpajakan, Retribusi dan Hibah. Sementara Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan utang.

Beberapa kebijakan pembangunan yang tiba-tiba muncul di pertengahan masa pemerintahan, menjadi alasan kuat bagi pihak eksekutif mengapa daerah bisa memiliki utang dan devisit anggaran. Beberapa kebijakan tersebut diungkapkan secara langsung di beberapa media oleh bapak sekretaris daerah NTB. Kegiatan tersebut antara lain perhelatan MotoGP Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Serta, ajang balap motorcros bertajuk MXGP di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa.

Tentunya, keuangan daerah juga kian tertekan. Ini karena tidak mungkin tidak mempersiapkan segala sesuatunya melalui dukungan dana yang bersumber dari APBD Provinsi untuk menstimulus kegiatan tersebut meski kegiatan tersebut merupakan program pusat. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan tersebut pun harus pemerintah propinsi siapkan. Salah satunya, yaitu mempersiapkan Rumah Sakit Umum (RSU) Mandalika untuk memperlancar MotoGP Mandalika. Termasuk, pengelolaan sampahnya. Ini belum termasuk pelebaran bandara Sumbawa yang memerlukan tambahan aspal agar bisa didarati pesawat berbadan besar.

## Pengelolaan Utang Pemerintah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP nomor 54 tahun 2005 dan PP nomor 30 tahun 2011 pada prinsipnya diturunkan dari Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini menandakan, Pemerintah daerah juga menggunakan APBD untuk memperoleh aset yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan niat terbut memang benar-benar ada di dalam pemimpin daerah di NTB.



## 33

KEMAMPUAN FISKAL LOMBOK TIMUR  
& PELUANG PENINGKATAN PAD

**P**enerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dalam rangka pembangunan dan pemerataan daerah. Kebijakan mengenai desentralisasi fiskal ini diyakini mampu mempercepat proses pembangunan serta mengurangi

kesenjangan pembangunan masing-masing daerah di Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Didalam desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur yang harus diupayakan secara optimal, mengingat pemerintah daerah membutuhkan biaya atau dana yang cukup untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam pelayanan dan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006, h.5) yaitu pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran.

Namun didalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah menyebabkan adanya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer pemerintah pusat ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. Kementerian Keuangan (2019) menyatakan secara rata-rata nasional, ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat sebesar 80,1 persen. Sementara itu kontribusi PAD hanya sekitar 12,87 persen.

Angka rata-rata nasional tersebut merupakan angka pada level Provinsi dan untuk level kabupaten/kota, Kementerian keuangan juga menyatakan kondisinya lebih parah. Padahal fokus otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ada pada daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Dari hal tersebut Kabupaten Lombok Timur dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah sumber utamanya berasal dari pajak Daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lain- lain yang sah. Adapun komponen pajak daerah dan retribusi

daerah yaitu : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

## Derajat Desentralisasi

Kemampuan atau indikator ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dapat terlihat dari besaran PAD-nya. Semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan semakin kecil ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya apabila sumbangan PAD terhadap APBD menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal antara lain untuk memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Rasio dirumuskan Desentralisasi Fiskal dengan membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

**Tabel 1. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Desentralisasi Fiskal**

Persentase Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria Rasio Desentralisasi
00,00% – 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam (Bisma, 2010)

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Persentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00% – 10,00%	Sangat Rendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Tinggi
>50,00%	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri– Fisipol UGM, 2010

## Penilaian Kemampuan Fiskal Kabupaten Lombok Timur

Tabel. 3. Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2018

Tahun	Jenis Pendapatan			Total Pendapatan Daerah
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang sah	
2018	261,931,377,630.96	2,145,605,911,159.00	133,694,744,676.00	2,541,232,033,465.96
2019	289,621,500,124.36	2,285,953,045,258.00	121,564,140,349.34	2,697,138,685,731.70
2020	328,110,520,620.86	2,054,356,596,013.00	154,920,874,856.48	2,537,387,991,490.34
2021	386,846,220,594.48	2,179,913,539,403.00	170,403,841,354.64	2,737,163,601,352.12
2022	349,179,330,079.91	2,439,127,844,699.00	30,334,579,869.67	2,818,641,754,648.58

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - LHP LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022

Berdasarkan kajian Lombok Resarch Center (LRC) yang menyatakan tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Lombok Timur tergolong kurang. Hal ini dibuktikan dengan mengukur rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah. Dari data yang ada, tingkat desentralisasi Kabupaten Lombok Timur pada 2022 adalah sebesar 12 persen. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan daerahnya. Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal Lombok Timur tahun 2018-2022, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 12 persen.

### Derajat Desentralisasi & Derajat Ketergantungan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Derajat Desentralisasi		Derajat Ketergantungan	
	Persentase	Kriteria	Persentase	Kriteria
2018	10%	Sangat Kurang	84%	Sangat Tinggi
2019	11%	Kurang	85%	Sangat Tinggi
2020	13%	Kurang	81%	Sangat Tinggi
2021	14%	Kurang	80%	Sangat Tinggi
2022	12%	Kurang	87%	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - LHP LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2022

Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif kurang, karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya

ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, yaitu rata-rata mencapai 83 persen. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

## **Alternatif Kebijakan Peningkatan PAD Kabupaten Lombok Timur**

Masih tingginya ketergantungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap pemerintah pusat yang terlihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah menandakan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Bahkan hal ini juga membuktikan optimalisasi usaha pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Untuk itu, Lombok Research Center menyarankan agar pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan potensi daerah seperti pada sektor pertanian sebagai salah satu cara peningkatan PAD. Usaha ekstensifikasi mutlak dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi daerah yang dimiliki sehingga, menimbulkan peluang baru sebagai sumber penerimaan daerah. Peluang penerimaan PAD melalui sektor pertanian sangat terbuka lebar. Terbukti sektor pertanian bersama kehutanan dan perkebunan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lotim pada tahun 2022 yaitu mencapai 26,87 persen atau mencapai Rp 60,371 miliar. Selain itu pula, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 254 Desa/kelurahan sebagian besar wilayahnya adalah memiliki potensi pertanian. Terdapat 241 Desa yang terbagi dalam 193 desa penduduknya bekerja pada sub sektor tanaman pangan, 14 desa tanaman palawija dan 18 desa pada tanaman hortikultura.

Dinas Pertanian Lombok Timur menyebutkan bahwa produksi Bawang Merah pada tahun 2021 sebesar 14.476 ton, Cabe besar 7.428 ton, Cabe Rawit 49.398 ton, Tomat 20.981 ton dan Kubis 10.047 ton. Sedangkan untuk buah-buahan terdiri atas Mangga 6.568 ton, Alpukat 6.412 ton, Jeruk 3.976 ton, Pisang 65.232 ton, dan Pepaya 14.042 ton.

Memaksimalkan potensi pertanian melalui kerjasama atau konektivitas antar daerah perlu dijalani oleh pemerintah Lombok Timur, mengingat kebutuhan produk pertanian di sebagian besar wilayah NTB disuplay dari Lombok Timur baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk kebutuhan hotel dan restoran. Dinas Pariwisata NTB menyebutkan bahwa jumlah akomodasi penginapan di NTB hingga tahun 2022 sebanyak 1.476 unit, terdiri dari 86 hotel berbintang dan 1.390 hotel non bintang.

Selain itu, sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata di Provinsi NTB tentunya potensi ini dapat dimaksimalkan sebagai alternatif penerimaan PAD bagi daerah Lombok Timur. Salah satu alternatif pengembangan pariwisata di Lombok Timur adalah merevitalisasi keberadaan pasar Paokmotong sebagai pusat oleh-oleh yang berisi berbagai kerajinan tangan dan produk olahan pertanian. Keberadaan pasar Paokmotong ini juga didasari oleh posisinya yang sangat strategis karena termasuk dalam jalur mobilitas wisatawan di samping juga masuk dalam jalan negara dengan mobilitas pengendara yang padat.

Selama ini kecenderungan wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh di Lombok Timur sangat rendah karena tidak adanya suatu tempat sebagai pusat berbelanja oleh-oleh. Sehingga, wisatawan yang datang ke Lombok Timur lebih memilih untuk membeli oleh-oleh di daerah sekitar seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Potensi ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Lombok Timur.

Adapun alternatif lainnya yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan PAD adalah melalui pemberian wewenang dan pendelegasian kepada kecamatan untuk penarikan retribusi pajak. Lombok Research Center dalam kajiannya melihat bahwa potensi parkir sebagai salah satu sumber PAD belum maksimal karena masih banyak lokasi-lokasi parkir yang tidak memberikan kontribusinya pada daerah. Pemberian wewenang dan pendelegasian kepada pihak Kecamatan merupakan solusi terhadap keterbatasan SDM pada Dinas Perhubungan yang menjadi leading sector.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), harusnya Kabupaten Lombok Timur mampu memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Target produksi pertanian yang selama ini menjadi barometer keberhasilan pemerintah daerah juga harusnya dibarengi oleh peningkatan PAD yang dari sektor ini melalui peluang-peluang penerimaan baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan “pembisik” yang cerdas dan memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat kepada Bupati Lombok Timur sebagai upaya memberikan masukan yang tepat terkait dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD.

34

## HUTANG & STRATEGI FISKAL LOMBOK TIMUR DI MASA PANDEMI



**M**amasuki semester kedua di tahun 2021, geliat perekonomian Kabupaten Lombok Timur belum menunjukkan ke arah yang menggembirakan. Apalagi dengan di keluarkannya peraturan oleh pemerintah daerah dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level II. Perubahan istilah dari zona warna ke level tersebut berdasarkan Instruksi Menteri

Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2021 Tentang PPKM penggunaan level di semua wilayah Indonesia.

Kebijakan ini secara tidak langsung akan berdampak kepada semua aktivitas masyarakat. Khususnya sektor ekonomi. Tidak hanya sektor rill. Beberapa sektor skala besar seperti perdagangan besar dan eceran kebutuhan rumah tangga pun mengalami dampak yang

cukup signifikan. Kebijakan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara luas yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat, mendorong daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Timur ke dalam resesi pada tiga triwulan terakhir.

Pemerintah Pusat melalui kebijakan fiskal segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 serta program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal berperan sebagai countercyclical bagi perekonomian, menahan laju perlambatan ekonomi serta peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

Melihat hal ini, seharusnya Lombok Timur pun harus mampu berbenah dan membuat strategi dalam pengelolaan fiskal daerah. Kita bisa mengatakan bahwa saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sedang diuji. Turunnya penerimaan akibat perlambatan ekonomi dihadapkan dengan kenaikan kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka mendukung PC PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Hal ini tentunya meningkatkan potensi melebarnya defisit anggaran pemerintah.

### **Kedanaan Fiskal Lombok Timur**

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari pihak luar, termasuk dari pemerintah pusat (BPK, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya pemberian diskresi didalam penentuan tarif pajak. Tercapainya kemandirian fiskal akan menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya.

Selain itu, penguatan pendapatan asli daerah juga membuat keuangan daerah lebih stabil untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal antara lain untuk memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Rasio dirumuskan Desentralisasi Fiskal dengan membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Sejak terjadinya Pandemi dari tahun 2020 sampai saat ini sangat berimbas terhadap pendapatan Lombok Timur. Saat ini pendapatan dianggap tidak mampu menutupi berbagai rencana pembangunan dan pembiayaan pemerintah daerah Lombok Timur. Dari target awal PAD sekitar 400 milyar, kini pemerintah daerah sudah mulai melunak. Ini dilihat dari beberapa rapat OPD akhir-akhir ini Bapak Bupati sudah mulai menurunkan target penerimaan asli daerah menjadi sekitar 280 milyar.

Dengan melihat defisit yang ada, Pemerintahan Sukiman-Rumaksi membuat skema pinjaman dan mengusulkannya kepada DPRD melalui skema Pemulihan ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2021 ini, postur APBD Murni Lombok Timur sebesar Rp 2,822 Triliun dengan PAD sebesar Rp 415,32 Miliar. Tetapi kemudian kebutuhan mengalami pengurangan di APBD perubahan 2021 menjadi Rp 2,815 Triliun.

Berdasarkan kajian Lombok Resarch Center (LRC) yang menyatakan tingkat desentralisasi fiskal Lombok Timur tergolong kurang. Hal ini dibuktikan dengan mengukur rasio antara PAD dengan total

penerimaan daerah. Dari data yang ada, tingkat desentralisasi Lombok Timur pada 2019 adalah sebesar 10 persen. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah Lombok Timur masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan daerahnya. Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal Lombok Timur tahun 2016-2018, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 12 persen.

Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif kurang, karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Lombok Timur.

### **Hutang Dan Tantangannya**

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 56 Tahun 2018).

Lombok Timur sudah mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman pada tahun 2021 ini. Pinjaman pertama sebesar Rp155 Miliar kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dan yang kedua yaitu kepada Bank NTB Syariah sebesar 90 milyar.

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian terutama terhadap tantangan yang harus dihadapi yaitu pengembalian pokok dan

bunga dari pinjaman tersebut. Pengembalian pokok pinjaman dan bunga akan menjadikan permasalahan kedepan jika tidak mampu di rencanakan dengan baik. Perencanaan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan dalam pengembalian baik pokok pinjaman maupun bunga karena penerimaan daerah baik yang berasal dari PAD dan Transfer Ke Daerah bisa saja mengalami fluktuasi.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah terdapat beberapa syarat seperti; (1) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan (2) biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.

Masih dalam Pasal 2 (3) PMK No. 43/PMK. 07/2021 Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
2. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Karena melihat rencana waktu peminjaman berada pada tahun anggaran 2021 maka, skema suku bunga yang ditetapkan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan; (1) Pinjaman PEN dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen); (2)

Pinjaman PEN dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 5,66% (lima koma enam enam persen); dan (3) Pinjaman PEN dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun sebesar 6,19% (enam koma satu sembilan persen).

Berdasarkan uraian singkat tersebut, Lombok Research Center (LRC) berpendapat wacana mengenai rencana Pemprov NTB untuk menyetahkan APBD melalui pinjaman kepada PT. SMI dan bank NTB Syariah telah melalui analisis market discipline, direct administrative control, cooperative control, dan rule – based control.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi lebih kreatif dan inovatif didalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tingkat kemandirian serta kapasitas fiskal daerah menjadi lebih meningkat. Pinjaman daerah akan berfungsi optimal bagi pembangunan daerah bila disertai dengan tata kelola yang baik. Pembangunan sistem yang baik menjadi penting karena tidak hanya bisa menyinergikan orientasi pembangunan, tapi juga konsekuensinya terhadap tujuan peningkatan kesejahteraan

Kebutuhan pembiayaan pembangunan di Lombok Timur yang terus meningkat terutama seiring dengan Lombok Timur yang menjadi daerah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memang tidak mungkin dapat ditanggung sepenuhnya oleh APBD saat ini. apalagi dengan semakin kompleksnya pembangunan yang harus diselesaikan di 21 kecamatan yang ada. Pembiayaan melalui hutang sebagai sumber alternatif untuk kepentingan daerah memang masih dimungkinkan.

Namun, meskipun dimungkinkan sesuai aturan perundang-undangan seharusnya Lombok Timur juga tidak boleh terlena dengan kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat tersebut, karena masih banyak potensi sumber daya yang ada di Lombok Timur belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, Lombok Timur memiliki potensi

yang sangat luar biasa di bidang Pertanian dan sumberdaya alam. Hal ini dilihat dari begitu besarnya sumbangan sektor pertanian ini dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar 27% bagi PDRB Lombok Timur.

Belum lagi di sektor pariwisata. Desa desa di Lombok Timur memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh desa di daerah lain di NTB bahkan di Indonesia. Namun sampai saat ini dari 3,7 juta kunjungan wisatawan ke NTB tahun 2019 yang lalu, hanya 1 persen yang mampu di gaet untuk datang ke Lombok Timur. Ini menjadi catatan penting kita kedepannya.

Belum lagi asset yang dimiliki oleh Lombok Timur yang mencapai lebih dari 3 trilun. Apabila keberadaan aset-aset tersebut mampu dimanfaatkan secara produktif maka, akan sangat membantu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Untuk itu, LRC berpendapat bahwa sangat penting untuk melakukan pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna dengan didasari prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien.



## 35

## TANTANGAN PENINGKATAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**PAJAK RESTORAN**

**D**alam satu pemberitaan di salah satu media online lokal saya tertarik untuk mempelajarinya karena judulnya yang menyebut ada dugaan pungutan liar yang berkedok pajak daerah. Hal ini didasarkan adanya kewajiban bagi pedagang bakso untuk membayar pajak daerah sebesar 5 juta rupiah dan dianggap sangat membebani karena tidak melalui mekanisme uji petik. Selain itu dalam pemberitaan itu

juga menyebutkan bahwa iklim investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Lombok Timur akan terganggu apabila penerapan pajak daerah bilamana penerapan pajak daerah tidak berdasarkan pada asas keadilan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah giat untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah untuk

membayai pembangunan. Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Lombok Timur dalam urusan pemerintahannya masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat karena kontribusi PAD terhadap APBD yang masih rendah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi kemampuan kontribusi PAD Kabupaten Lombok Timur terhadap total pendapatan daerah pada 2022 sebesar 12 persen. Hal ini mengandung arti bahwa Kabupaten Lombok Timur masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Di beberapa tempat kuliner yang ada di Kabupaten Lombok Timur selama ini memang telah menerapkan pajak restoran namun, di beberapa tempat lainnya masih banyak yang tidak menerapkan pajak restoran. Saya pernah bertanya kepada pemilik usaha penyedia makanan dan/atau minuman yang tidak mengenakan pajak restoran kepada pembeli seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemilik usaha penyedia makanan dan/atau minuman menjawab “ sebagian besar pembeli di tempat kami berasal dari masyarakat perdesaan dan mereka merasa keberatan apabila dikenakan pajak restoran karena mereka tidak mengetahui adanya kebijakan daerah terkait dengan pengenaan pajak restoran apabila makan dan/atau minum di rumah makan dan/atau dibungkus”.

Namun terdapat juga dari beberapa pelangganya yang menyatakan “kebijakan ini sangat cocok diterapkan pada usaha-usaha penyedia makanan dan/atau minuman yang telah menerapkan manajemen modern, seperti restoran cepat saji franchise, kalau di tempat itu wajar dikenakan pajak sebesar 10%” sedangkan kami masa harus ikut dikenakan.

Hal tersebut bagi penulis memang sangat dilematis karena pada aspek penerimaan pendapatan daerah saat ini sangat dituntut untuk meningkatkan target capaiannya untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya melunasi kewajibannya pada PT. SMI dan PT. Bank NTB Syariah yang selama ini digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan di Lombok Timur. Namun pada sisi lainnya, kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah tersebut, terutama pada masyarakat telah menyebabkan para pengusaha/pelaku usaha penyedia makanan dan/atau minuman merasakan adanya kekhawatiran akan penurunan omset karena secara tidak langsung konsumen/pembeli merasa adanya tambahan biaya makan yang disebabkan oleh pajak 10%. Meskipun ada juga konsumen yang taat pajak dan meminta langsung bil/bon faktur dan supaya dikenakan pajak restoran.

Untuk menyikapi permasalahan yang ada dalam pemberitaan yang penulis uraikan dan sebutkan di atas maka, sebaiknya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pungutan pajak melalui Badan Pengelolaan dan Pendapatan daerah (Bappenda) menempatkan petugasnya di lokasi rumah makan dan tidak dilakukan oleh pemilik rumah makan langsung dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Bahkan, kalau bisa semua rumah makan atau usaha penyedia makanan dan/atau minuman yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah dilakukan uji petik selama satu minggu penuh, karena hal ini juga untuk memberikan kepastian asas keadilan seperti yang termuat dalam Perda Lotim No. 8 Tahun 2016 dan menghindari kesan pilih pilih seperti yang dimaksudkan dalam pemberitaan media lokal tersebut.

Budaya membayar pajak atas pelayanan di restoran/rumah makan maupun di tempat-tempat usaha penyedia makanan dan/atau minuman lainnya memang masih belum terbangun di tengah masyarakat, karena hal itu baru dapat diaplikasikan di wilayah perkotaan yang memang sumber pendapatan daerahnya sebagian

besar berasal dari sektor pajak. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Timur, menurut saya masih banyak sumber-sumber PAD yang bisa dimaksimalkan pengelolaannya. Selain itu, berdasarkan pemberitaan tersebut, kemungkinan keluhan para pelaku usaha penyedia makanan dan/atau minuman secara tidak langsung mempertanyakan apa manfaat bagi mereka selaku pelaku usaha.

### **Regulasi Kebijakan Pajak dan Retribusi di Lombok Timur**

Kalau kita analisis dasar hukum dari upaya yang dilakukan oleh Pemda Lombok Timur dalam melakukan pemungutan pajak restoran yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Dimana restoran yang dimaksudkan sesuai Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Selanjutnya juga pada Pasal 37 ayat (2) yang menyebutkan Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana yang dimaksud dengan pada Pasal 37 ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Selanjutnya pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Permasalahannya adalah adanya ketidaksinkronan antara Pasal 37 ayat (1) dengan Pasal 38 ayat (1). Objek yang dikenakan Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Namun, dalam implementasi pemungutannya di lapangan terhadap pelaksanaan UU No. 28/2009 tersebut maupun Perda Lotim No. 8/2016, perhitungan pajak restoran tersebut adalah 10% yang diterima atau yang seharusnya diterima (kita asumsikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya restoran hanya dihitung dari jumlah biaya makanan dan/atau minuman penjualan, tidak ada biaya jasa servis/pelayanan).

Jadi sebenarnya perlu ada evaluasi pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan objek pajak dimana, yang seharusnya menjadikan makanan dan/atau minuman sebagai objek pajak restoran bukan pada pelayanan. Hal ini karena subjek pajak restoran adalah merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Objek Pajak Restoran seharusnya makanan dan/atau minuman yang dijual. Untuk itu, kami menyarankan agar pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera merevisi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terlebih dengan telah terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

### **Peningkatan PAD Tanpa Membebani Masyarakat**

Dalam rangka mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi kebijakan pajak, dan memberikan informasi transparan tentang penggunaan dana pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya edukasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan masyarakat membayar pajak. Sehingga adanya polemik

yang terjadi di tengah masyarakat (sesuai dengan pemberitaan pada paragraf pertama) seharusnya tidak perlu terjadi, bahkan sampai menimbulkan rasa kecurigaan.

Untuk itu, kami mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar penerapan pajak restoran (terutama bagi pelaku usaha penjualan makanan/minuman) yang selama ini tidak menerapkan manajemen pembukuan dikenakan berdasarkan pada omzet penjualan penyedia makanan dan/atau minuman setiap bulannya namun, mekanisme tersebut tetap harus melakukan uji petik terlebih dahulu untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar ke pemerintah daerah. Contoh kalau omzet penjualan per bulannya adalah Rp. 100 juta maka dapat dikenakan tarif 10 % tapi kalau omzet penjualan Rp. 10 juta per bulan maka dapat dikenakan tarif 5 %.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan oleh pemkab Lotim dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak restoran adalah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat telah semakin maju, yaitu penerapan sistem pembayaran online. Pemkab Lotim dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dan berbagai perusahaan penyedia pembayaran secara online yang ada. Kerjasama ini dimaksudkan agar mereka dapat menyediakan alat-alat pembayaran secara online di tempat-tempat penyedia usaha makanan dan/atau minuman yang ada di Lombok Timur. Langkah ini penting untuk mendapat atensi dari Pemkab Lotim sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku subjek pajak sekaligus juga untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dari pajak restoran. Selain itu, dengan menerapkan strategi ini juga akan semakin memberikan kemudahan terkait pelaporan penerimaan pajak restoran yang berguna dalam penghitungan pajak penghasilan usaha restoran setiap tahun.

Namun, yang paling utama dari semua hal tersebut adalah terkait dengan pemanfaatan dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan baik oleh Pemkab Lotim maka, pemerintah daerah juga harus mendukungnya melalui aturan yang jelas. Salah satu contohnya adalah pembangunan drainase ataupun penataan parkir di sekitar lokasi penyedia usaha makanan dan/atau minuman agar masyarakat juga memiliki kepercayaan dan meningkat kesadarannya untuk membayar pajak.

Apabila semua hal tersebut sudah dapat dilaksanakan, baru kemudian Pemkab Lotim fokus pada upaya pemberian sanksi yang jelas, tegas, dan menyeluruh (tidak diskriminatif) kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dimana, tentunya dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan terkait dengan berbagai permasalahan dan alternatif kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dengan harapan bahwa PAD Kabupaten Lombok Timur dapat meningkat sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen APBD. Selain itu juga, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak semakin tinggi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Semoga bermanfaat !!!



## 36

## MENUNGGU STRATEGI PENINGKATAN PAD LOMBOK TENGAH

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Untuk itu, salah satu strategi didalam mencapai kemandirian daerah adalah melalui tata kelola serta pengembangan potensi PAD. Keberhasilan suatu daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercermin dari tingkat peranan PAD. Atas dasar tersebut maka, diharapkan setiap daerah agar mampu untuk mengoptimalkan peranan dan kontribusi PAD melalui penggalan serta pengelolaan berbagai sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi.

Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki potensi dalam meningkatkan peranan dan kontribusi PAD terhadap pembangunan. Hal ini dibuktikan

dengan berbagai potensi dari berbagai sektor yang ada, seperti pariwisata, pertanian, pertambangan dan, lain sebagainya.

**Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah**

PAD Kabupaten Lombok Tengah		Pertumbuhan PAD
2018	187,324,721,970.60	-
2019	204,512,599,142.12	9%
2020	206,419,405,625.90	1%
2021	163,077,512,900.58	-21%

Dalam periode 2018-2021, terlihat bahwa mengalami fluktuasi dan cenderung negatif pada tahun 2021 terkait dengan penerimaan pendapatan daerah. Pertumbuhan terbesar terjadi pada 2019 dimana, terjadi peningkatan PAD sebesar 9 persen dan 1 persen pada tahun 2020. Penurunan ini dapat dimaklumi karena pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 mulai melanda yang berdampak terhadap penurunan aktivitas perekonomian akibat upaya pembatasan-pembatasan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19. Situasi ini berlangsung hingga tahun 2021 dimana, pendapatan daerah menurun hingga minus 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya dapat terlihat dari pertumbuhan PAD setiap tahunnya. Pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Tengah yang terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2021 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Lombok Tengah belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Rata-rata penerimaan pajak di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 2 persen (periode 2018-2021).

**Tabel 2. Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Lombok Tengah**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran	Total Pajak Hotel Dan Restoran
2018	8,151,261,407.00	9,603,359,493.00	17,754,620,900.00
2019	9,600,602,686.00	10,571,961,635.00	20,172,564,321.00
2020	3,367,321,310.00	5,061,542,720.55	8,428,864,030.55
2021	2,295,788,899.14	6,153,217,945.15	8,449,006,844.29
<b>Rata-Rata</b>	<b>5,853,743,575.54</b>	<b>7,847,520,448.43</b>	<b>13,701,264,023.96</b>

Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Lombok Tengah pada 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dalam dua tahun terakhir (2020-2021) penerimaan dari pajak hotel ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Artinya, kinerja pemerintah daerah didalam memungut pajak hotel tidak maksimal. Rata-rata penerimaan pajak hotel dalam tiga tahun (2019-2021) pertumbuhannya mengalami penurunan, yaitu sebesar -26%.

Kontribusi pajak hotel dan restoran pada PAD Kabupaten Lombok Tengah dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) rata-ratanya sebesar 6 persen. Kontribusi tertinggi dari pajak hotel dan restoran terhadap PAD Lombok Tengah terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 10 persen. Tahun berikutnya pajak hotel dan dan restoran mengalami penurunan tajam hingga mencapai 4 persen terhadap kontribusinya pada PAD. Tahun 2021 kontribusi ini kemudian meningkat menjadi 5 persen, yang kemungkinan dipengaruhi oleh adanya event kejuaraan World Superbike pada akhir tahun 2021.



## 37

## POTENSI &amp; STRATEGI MEMAKSIMALKAN PAD LOMBOK TENGAH



Dengan sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Disamping itu masyarakat diberikan kemudahan untuk memantau dan mengontrol mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa

tergantung bantuan dari pihak luar, termasuk dari pemerintah pusat (BPK, 2020)<sup>4</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan objek

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya pemberian diskresi didalam penentuan tarif pajak. Tercapainya kemandirian fiskal akan menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya. Selain itu, penguatan pendapatan asli daerah juga membuat keuangan daerah lebih stabil.

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari terselenggaranya desentralisasi fiskal antara lain untuk memperkecil kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Rasio dirumuskan Desentralisasi Fiskal dengan membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Dilihat dari Target PAD Lombok tengah tahun 2022 ini sekitar 315 milyar rupiah, sampai saat ini masih jauh dari kata yang memuaskan. Sehingga diperlukan sebuah strategi yang matang untuk mengefektifkan penerimaan PAD dan mengurangi menguapnya PAD atau kebocoran PAD ini.

Sebagai contoh, kita mendapatkan dana bagi hasil pajak dari Provinsi NTB sebesar 91 miliar rupiah, namun yang realisasi 84 miliar. Selanjutnya sumbangan PAD dari BLUD tahun 2020 mencapai 61,8 miliar rupiah terus tahun 2021 mencapai 62,9 miliar rupiH.

Juka dianalaisi lebih detail, realisasi yang ada masih sangat jauh dari kata memuaskan. Untuk sumbangan PAD dari beberapa badan yang mendapatkan kucuran penyertaan modal dari Pemerintah Daerah juga masih belum bisa maksimal dimana tahun 2020 baru 10 miliar tapi tahun 2021 cuma 8,4 miliar.

Sektor lain yang memiliki potensi sebagai penyumbang PAD cukup besar adalah sektor perdagangan yaitu Pasar, Pajak Restoran dan yang sangat terbuka lebar yaitu MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Dari uraian di atas, bisa dikatakan kita memiliki permasalahan sebagai berikut:

KOMPONEN	KONDISI SETIAP KOMPONEN	KONDISI YANG PERLU INTERVENSI	DAMPAK PERUBAHAN
<b>Struktur</b>	Belum optimalnya pendapatan pajak daerah di Kabupaten Lombok tengah melalui ssstem aplikasi online	Integrasi data dari database dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah di Lombok Tengah melalui sistem aplikasi online	Meningkatnya pendapatan Lombok Tengah
<b>People</b>	Belum optimalnya kualitas Sumber daya Aparatur dan Penempatan pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan	Perlu pelatihan Sumber Daya Aparatur dalam bidang teknologi informasi	Terpenuhinya kualitas Sumber daya Aparatur dan Penempatan pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan
<b>Technology</b>	Belum tersedianya sarana aplikasi yang memudahkan pengelolaan pajak daerah	Penyediaan sarana aplikasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak	Tersedianya sarana aplikasi yang memudahkan pengelolaan pemungutan pajak daerah
<b>Task</b>	Belum tersedianya Perbub yang mengatur tentang pajak daerah (masih belum fokus dan detail)	Perumusan Peraturan Bupati yang kemudian untuk diundangkan	Tersedianya Peraturan Bupati yang mengatur tentang pajak daerah secara online/Peraturan Bupati lebih detail sesuai dengan potensi daerah

Berdasarkan analisa tersebut diatas pajak dan retribusi daerah merupakan unsur / komponen PAD yang penting karena memberikan dukungan anggaran yang signifikan. Kontribusi retribusi daerah yang tergolong masih relatif kecil dalam total penerimaan daerah, hal ini disebabkan antara lain :

- Basis data potensi pajak dan retribusi daerah yang belum valid.
- Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
- Masih rendahnya kemampuan dalam pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya
- Belum adanya payung hukum berupa peraturan perundangan di daerah yang perlu di buat, disesuaikan dan disempurnakan yang menyangkut tata cara peningkatan pendapatan
- Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD

Sedangkan pendapatan dari retribusi dirasa juga masih belum optimal hal ini dikarenakan :

- OPD pengelola pendapatan belum memaksimalkan dalam pendataan obyek – obyek retribusi
- OPD pengelola pendapatan kurang berkoordinasi dengan instansi terkait dan kurang berinovasi dalam penggalian potensi retribusi

Strategi kebijakan yang harus dilakukan yaitu :

1. Jangka Pendek

- Pembentukan Tim Kerja.
- Penyusunan Perbub.
- Pendataan dan pendaftaran serta input data pada sistem .
- Perancangan dan Pembuatan Sistem.
- Sosialisasi Peraturan bupati
- Launching sistem online dan talkshow, Uji coba pembayaran e-hotel, e-restoran, e-hiburan, e-PBB dan e-BPHTB.
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan.

2. Jangka menengah dan

- Melanjutkan input data dari basis data manual ke basis data sistem
- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Potensi Pajak Daerah.

3. Jangka panjang

- Menyusun data potensi pajak daerah berbasis IT.

## 38

ASET UNTUK PAD  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Aset Daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemafaatan;

Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Tuntutan ganti rugi.

Aset daerah juga menjadi sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendagri No 17 tahun 2007 agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Secara sederhana pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat; (2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) Pengawasan (monitoring) (Soleh, 2010). Namun demikian, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dari ketiga fungsi yang telah disebutkan di atas adalah berkenaan dengan upaya optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan kekayaan daerah.

Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dalam pemanfaatan aset daerah. Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan/pemanfaatan aset daerah antara lain : (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan ruislag; (2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; dan (4) Tersedianya data informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (Soleh, 2010).

Salah satu optimalisasi barang daerah/aset daerah yang dapat dilakukan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahkan meningkatkan PAD yaitu melalui: perjanjian sewa menyewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT); dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate). Terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut dikenakan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan harga pasar.

Pengenaan retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah merupakan perwujudan kegotong royongan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Namun demikian, perlu disadari bahwa mengelola aset

daerah jangan seperti menangani harta warisan nenek moyang yang dapat dilakukan sehendaknya sendiri.

Aset daerah merupakan titipan generasi mendatang yang membutuhkan profesionalisasi dan political will yang kokoh. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manajemen aset termasuk aset pemerintah pusat dan daerah merupakan bidang profesi atau keahlian tersendiri. Sayangnya, pada saat ini belum berkembang dengan baik di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi.

### **Pengelolaan Aset Daerah di Lombok Tengah**

Beberapa minggu yang lalu, di media online kita disajikan dengan adanya berita terkait dengan bagaimana pengelolaan aset di kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bahkan, di DPRD Lombok Tengah di bentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan pengelolaan aset yang “Katanya” masih banyak yang belum jelas.

Asset Daerah Lombok Tengah yang dipertanyakan secara khusus dalam pansus Aset di DPRD Lombok Tengah yaitu terkait dengan lahan milik Lombok tengah yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Lahan milik Pemerintah daerah Lombok Tengah tersebut dulunya merupakan bangunan berbentuk Hotel, Dan saat ini pun lahan tersebut dibangun hotel baru. Yang menjadi pertanyaan dari pihak DPRD yaitu bagaimana mekanismenya sehingga hotel milik pemda tersebut di ratakan dan dibangun hotel baru dan dikelola oleh swasta.

Bahkan Pansus Aset DPRD Lombok Tengah akan menjadwalkan pemanggilan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengklarifikasi berapa banyak Aset milik Pemda. Termasuk, yang saat ini menjadi perbincangan publik yakni, Aset Tastura Hotel yang ada di Kuta Lombok. Manajemen aset itu terbagi menjadi lima tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berkaitan dan terintegrasi.

*Tahap yang pertama* adalah Inventarisasi Aset. Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Kemudian, yang dimaksud aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi atau labelling, pengelompokan dan pembukuan (Haryanto, 2019).

*Tahapan kedua* adalah Legal Audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset (Haryanto, 2019).

*Tahapan Ketiga* adalah Penilaian Aset. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual maupun untuk disewakan, dimanfaatkan, maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

*Tahapan keempat* adalah Optimalisasi Aset. Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang terkandung dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasaipemerintah daerahdiidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sector-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi daerah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun

jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai (Antoh, 2017).

Tahapan yang kelima adalah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset sebagai wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset. Melalui wahana tersebut transparansi dalam pengelolaan aset dapat terjamin, sehingga setiap penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor secara jelas. Mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya (Arie, 2011).

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mmilik Daerah, OPD, Pemerintah Daerah, wajib melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan arah kebijakan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah tersebut.

Pelaksanaan pengelolaannya mulai dari tingkat Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah hingga kepala OPD selaku pengguna barang, telah diatur tugas dan tanggungjawabnya dalam mendukung terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Jadi, pada dasarnya. Pengelolaan aset di Lombok Tengah sudah melalui tahapan yang sangat jelas. Baik pada saat pembentukan panitia pelaksana, maupun pada proses pelelangan kerjasamanya. Sehingga, jika sekarang ini DPRD melakukan pansus terkait hal ini,

malah penulis mempertanyakan kinerjanya selama ini, dalam arti yang sangat sederhana “Kemana saja selama ini”.

Terkait asset ini juga menjadi perhatian yang sangat serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga setiap tahunnya semua daerah termasuk Lombok Tengah juga selalu berkoordinasi dengan pihak BPK dan pihak-pihak terkait lainnya.

Yang penting bagaimana pengelolaan asset yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat. Apakah dalam bentuk PAD ataupun hak kelola bagi masyarakat lokal dengan prinsip saling menguntungkan.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2018. Statistik Potensi Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Katalog Nomor : 1105014.52.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Jakarta.
- BPS Kabupaten Lombok Timur. 2021. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Kemiskinan Ekstrem NTB. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Nusa Tenggara Dalam Angka 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2023. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur. 2023. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2022.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur. 2022. Jumlah Timbulan Sampah Di Lombok Timur 2021.
- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB. 2023. Jumlah Pekerja Migran NTB Periode Tahun 2019-2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.
- Nurkse, R. (1961) International Trade Theory and Development Policy. In: Ellis, H.S., Ed., Development for Latin America, St. Martin's Press, New York, 234-263.
- Myrdal Gunnar, 1968, "Asian Drama in Inquiry Into The Poverty of Nation", Volume III, Pinguin Books Ltd, Hagrmondsworth.
- Pal Roy, P. and Mohanty, B. 2002. A study on the usage of sawdust in ANFO, Proc. 7th Int. Conf. on 'Rock fragmentation by blasting (FRAGBLAST'7)', Beijing, China, August, China Society of Engineering Blasting and Chinese Society of Mechanics, 73-77.
- Pujiati, Amin. (1990) Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70.

Nuri Taufik. 2022. Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan

Kemiskinan Ekstrem. Badan Pusat Statistik RI.

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Niaga Swadaya. Jakarta.

The World Tourism Organization (UNWTO). 2005. International Tourism Partnership, 2004: 3.

World Bank. (2021). What is human capital and why does it matter.

<https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions#HCP1>. [13 Juni 2022

<https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-menurut-kabupaten-kota>

<https://suararinjaninews.co.id/?p=12263>

<https://radarlombok.co.id/pemda-lotim-belum-pikirkan-cabut-izin-ritel-modern.html#:~:text=Dia%20menyebutkan%20jumlah%20ritel%20modern,izin%20usahnya%20tahun%202019%20ini.>

<https://www.suarantb.com/tidak-respons-izin-baru-45-ritel-modern-beroperasi-di-lotim/>

<https://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id/realisasi-investasi/>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/31/ofwd5383-bpmpd-ntb-200-bumdes-berstatus-tidak-aktif>

<http://www.berdesa.com/risiko-yang-dihadapi-bum-desal-km/>

<https://berdesa.wordpress.com/2016/11/16/bumdesa-bumdesa-jawara-nasional-2016-bagian-1/>

[https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/dua-dekade-lebih-desentralisasi-tata-kelola-dana-daerah-belum-efektif?status=sukses\\_login&status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2023%2F01%2F30%2Fdua-dekade-lebih-desentralisasi-tata-kelola-dana-daerah-belum-efektif&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/dua-dekade-lebih-desentralisasi-tata-kelola-dana-daerah-belum-efektif?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2023%2F01%2F30%2Fdua-dekade-lebih-desentralisasi-tata-kelola-dana-daerah-belum-efektif&status_login=login)

<https://www.kompasiana.com/sabrinachaerani/5a32d0d7bde57507c1766862/tingkat-kemandirian-keuangan-pemerintah-daerah-studi-kasus-provinsi-jambi?page=all>

<https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah>

<https://www.postkotantb.com/2023/05/diduga-pungli-berkedok-pajak-lsm-garuda.html>

<https://djpk.kemenukeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=23&pemda=05>

- Todaro, Michael P. 2010. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas, jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Higgins, K.L. 2015. Economic Growth and Sustainability: Chapter 4 Addicted to Growth: Economic Growth Promises Happiness and Well-Being.
- Ismail, Munawar, Dwi Budi Santosa dan Ahmad Erani Yustika. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Wolfers, Justin & Betsey Stevenson. 2008. Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox . Brookings Paper on Economic Activity.

Tata kelola keuangan daerah yang baik dapat menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ini karena pendapatan dan pengeluaran yang efisien dan transparan dapat menghasilkan sumber daya yang cukup untuk mengatasi tantangan kemiskinan. Namun, tata kelola keuangan daerah yang buruk dapat menghambat upaya mengurangi kemiskinan dan bahkan memperburuk situasi masyarakat miskin.

Tata kelola keuangan daerah yang baik dapat memberikan fondasi yang kuat untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui alokasi dana yang efisien, pelayanan dasar yang memadai, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, tata kelola keuangan yang buruk dapat memperburuk kemiskinan dengan menghambat akses terhadap layanan penting dan peluang ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk berkomitmen pada tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berhasil.

## **LOMBOK RESEARCH CENTER**

Jalan Raya Mataram-Masbagik Km. 45  
Perumahan Bumi Cakra-Regency Blok 63 No. 8  
Semar, Desa Denger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,  
Nusa Tenggara Barat - Indonesia

Info.lrc2014@gmail.com    www.lrcfoundation.com

ISBN 978-623-02952-6-4

